



Badan Ketahanan Pangan  
Kementerian Pertanian

# PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

## *FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS*

# 2019



**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN**  
*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS*  
**2019**



**Badan Ketahanan Pangan**  
**Kementerian Pertanian**



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

## SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN/ KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan telah berhasil menghantarkan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sendiri bahkan ekspor untuk komoditas strategis yaitu padi, bawang merah, cabai dan jagung. Tidak hanya dalam aspek ketersediaan saja, keberhasilan pembangunan ditunjukkan pula dengan penurunan angka kemiskinan dari 11,25% pada Maret 2014 menjadi 9,41% tahun 2019. *Prevalence of Undernourishment* turun dari 12,89% tahun 2014 menjadi 7,66% tahun 2019. Prevalensi balita *stunting* menurut Kementerian Kesehatan juga turun dari 37,2% tahun 2013 menjadi 27,67% pada tahun 2019. Jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan turun dari 88 kabupaten/kota pada tahun 2018 menjadi 76 kabupaten/kota pada tahun 2019.

Pembuktian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu melaksanakan komitmennya kepada dunia untuk mengurangi kemiskinan dan kerawanan pangan sebagaimana telah disepakati dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. *Global Food Security Index (GFSI)* juga menunjukkan ketahanan pangan Indonesia terus meningkat dari urutan 74 tahun 2015 menjadi urutan ke 62 pada tahun 2019.

Dengan kondisi wilayah negara Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau dan jumlah penduduk mencapai 267 juta jiwa tentu masih terdapat masyarakat yang miskin, rentan rawan pangan dan mengalami masalah *stunting*. Saya berharap Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) ini, dapat dijadikan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan baik tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota agar lebih fokus dalam memprioritaskan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan.

Saya akan terus mendukung program-program yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan program yang disinergikan melalui kerja sama lintas sektor baik di tingkat pusat dan daerah. Pembangunan pangan harus fokus mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal untuk mengentaskan daerah rentan rawan pangan, penurunan *stunting*, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai target SDGs.

Menteri Pertanian/  
Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H



## KATA PENGANTAR

### KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan selalu menjadi isu strategis, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya. Pemenuhan kecukupan pangan dan gizi merupakan prasyarat untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) ditugaskan untuk melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan nasional. BKP juga ditugaskan untuk mengkoordinasikan kegiatan lintas sektor dalam pengentasan daerah rentan rawan pangan.

Target yang ditetapkan adalah berkurangnya daerah rentan rawan pangan dari 18% menjadi 10% pada tahun 2024. Untuk mengevaluasi pencapaian target ketahanan pangan, BKP menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) yang di-update setiap tahun pada tingkat kabupaten dan kecamatan di seluruh Indonesia. Akurasi peta terus ditingkatkan dengan mendetailkan pemetaan sampai tingkat desa, agar permasalahan dan tantangan yang menyebabkan terjadinya masalah pangan, kemiskinan dan stunting dapat dilakukan intervensi program/kegiatan secara lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Berdasarkan FSVA 2019 diketahui bahwa program pembangunan ketahanan pangan selama satu tahun telah berhasil menurunkan jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan dari 88 kab/kota pada tahun 2018 turun menjadi 76 kab/kota (terjadi penurunan sebanyak 12 kabupaten/kota) pada tahun 2019. Peningkatan status ketahanan pangan di wilayah terjadi karena angka kemiskinan menurun, akses pangan dan akses terhadap fasilitas kesehatan juga meningkat.

Saya berharap, FSVA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten selalu dimutakhirkan agar dapat digunakan sebagai alat evaluasi program dan dasar penetapan lokus dan program intervensi pengentasan daerah rentan rawan pangan.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kelompok Kerja FSVA Nasional dari lintas Kementerian dan Lembaga, Perguruan Tinggi dan serta Dinas Ketahanan Pangan serta lembaga/unit kerja ketahanan pangan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten atas kontribusinya dalam penyusunan FSVA 2019 ini. Selanjutnya yang lebih penting adalah sinergi lintas sektor dalam program intervensi kerentanan pangan di daerah prioritas agar seluruh wilayah Indonesia tahan pangan dan setiap individu sehat, cerdas, aktif, dan produktif.

Selamat bekerja.

Kepala Badan Ketahanan Pangan/  
Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan



Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng.



## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran untuk Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2
1.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	3
1.3 Metodologi	5
BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN	13
2.1 Rasio Konsumsi Normatif per Kapita Terhadap Produksi	15
2.2 Pencapaian dalam Ketersediaan Pangan	17
2.3 Tantangan untuk Ketersediaan Pangan	21
BAB 3 AKSES TERHADAP PANGAN	23
3.1 Akses Terhadap Listrik	23
3.2 Kemiskinan	26
3.3 Pangsa Pengeluaran Pangan	30
BAB 4 PEMANFAATAN PANGAN	35
4.1 Tenaga Kesehatan	35
4.2 Akses ke Air Bersih	39
4.3 Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun	43
4.4 Tantangan Peningkatan Pemanfaatan Pangan	47
BAB 5 DAMPAK DARI STATUS GIZI DAN KESEHATAN	49
5.1 Dampak dari Status Gizi	49
5.2 Dampak dari Status Kesehatan	54
BAB 6 ANALISIS KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	57
6.1 Ketahanan Pangan di Indonesia	57
6.2 Perubahan Tingkat Kerentanan terhadap Ketahanan Pangan Kronis Tahun 2018-2019	66
BAB 7 KERENTANAN PANGAN TRANSIEN	71
7.1 Bencana Alam	71
7.2 Variabilitas Iklim	73
7.3 Kehilangan Produksi yang Disebabkan oleh Kekeringan, Banjir dan Organisme Pengganggu Tanaman	74

<b>BAB 8</b>	<b>REKOMENDASI KEBIJAKAN</b>	<b>77</b>
8.1	Wilayah Kabupaten	78
8.2	Wilayah Perkotaan	80
8.3	Kerja Sama Lintas Program dan Lintas Sektor	81

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ringkasan Indikator FSVA 2019	6
Tabel 1.2	<i>Cut off Point</i> Indikator Individu	8
Tabel 1.3	Bobot Indikator Individu	10
Tabel 1.4	<i>Cut off Point</i> Komposit	11
Tabel 2.1	Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar Tahun 2009-2018	13
Tabel 2.2	Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar Tahun 2018	14
Tabel 3.1	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik per Provinsi 2015-2018	23
Tabel 3.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan per Provinsi 2015-2018	27
Tabel 3.3	Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan Lebih dari 65% 2017 dan 2018	30
Tabel 4.1	Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk 2017-2018	35
Tabel 4.2	Sebaran Kelompok Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk Kota	37
Tabel 4.3	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih 2017 – 2018	39
Tabel 4.4	Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun 2017 – 2018	43
Tabel 4.5	Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2016-2018	47
Tabel 5.1	Klasifikasi WHO tentang Masalah Kesehatan Masyarakat untuk Prevalensi Kurang Gizi	50
Tabel 5.2	Prevalensi Kurang Gizi pada Balita per Provinsi ( <i>Stunting, Underweight dan Wasting</i> ) Tahun 2018	51
Tabel 5.3	Angka Harapan Hidup per Provinsi	54
Tabel 6.1	Sebaran Prioritas Kabupaten di Setiap Provinsi (Persentase)	59
Tabel 6.2	Nilai Rata-Rata Kelompok Kabupaten Prioritas Rentan dan Prioritas Tahan	61
Tabel 6.3	Sebaran Prioritas Kota di Setiap Provinsi (Persentase)	63
Tabel 6.4	Nilai Rata-rata Kelompok Kota Prioritas Rentan dan Prioritas Tahan	64
Tabel 6.5	Perubahan Tingkat Prioritas Kabupaten per Provinsi 2018 – 2019 (Persentase)	67
Tabel 6.6	Perubahan Tingkat Prioritas Kota per Provinsi 2018 – 2019 (Persentase)	68
Tabel 6.7	Sebaran Kabupaten/Kota per Prioritas 2018-2019	69
Tabel 7.1	Negara yang Mengalami Bencana Alam Terbanyak 2018	72
Tabel 7.2	Bencana Alam yang Terjadi di Indonesia dan Kerusakannya 2004-2018	72
Tabel 7.3	Perbandingan Area Puso Padi dan Jagung Akibat Banjir, Kekeringan dan Organisme Pengganggu Tanaman 2014-2018	75



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi	5
Gambar 2.1	Sebaran Kelompok Rasio Konsumsi Normatif per Kapita Terhadap Produksi Bersih Serealia Kabupaten	15
Gambar 2.2	Sebaran Kelompok Rasio Konsumsi Normatif per Kapita Terhadap Produksi Bersih Serealia Kota	17
Gambar 3.1	Sebaran Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik Kabupaten	26
Gambar 3.2	Sebaran Kelompok Penduduk Miskin Kabupaten	29
Gambar 3.3	Sebaran Kelompok Penduduk Miskin Kota	29
Gambar 3.4	Sebaran Kelompok Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan Lebih dari 65% Kabupaten	31
Gambar 3.5	Sebaran Kelompok Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan Lebih dari 65% Kota	33
Gambar 4.1	Sebaran Kelompok Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten	37
Gambar 4.2	Sebaran Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih Kabupaten	40
Gambar 4.3	Sebaran Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih Kota	41
Gambar 4.4	Sebaran Kelompok Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun Kabupaten	45
Gambar 4.5	Sebaran Kelompok Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun Kota	45
Gambar 5.1	Sebaran Kelompok Persentase Balita <i>Stunting</i> Kabupaten	52
Gambar 5.2	Sebaran Kelompok Persentase Balita <i>Stunting</i> Kota	52
Gambar 5.3	Sebaran Kelompok Angka Harapan Hidup Kabupaten	55
Gambar 5.4	Sebaran Kelompok Angka Harapan Hidup Kota	55
Gambar 6.1	Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas 1 per Provinsi	58
Gambar 6.2	Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas 2 per Provinsi	58
Gambar 6.3	Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas 3 per Provinsi	59
Gambar 6.4	Jumlah Kota Rentan di Prioritas 1 per Provinsi	62
Gambar 6.5	Jumlah Kota Rentan di Prioritas 2 per Provinsi	62
Gambar 6.6	Jumlah Kota Rentan di Prioritas 3 per Provinsi	62
Gambar 7.1	Bencana Alam per Provinsi 2004 – 2018	73
Gambar 8.1	Kerangka Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan	77
Gambar 8.2	Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Kabupaten	79
Gambar 8.3	Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Kota	80
Gambar 8.4	Peran Aktif Pemangku Kepentingan dalam Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan	82



## DAFTAR PETA

Peta 2.1	Rasio Konsumsi Normatif per Kapita Terhadap Produksi Bersih Sereal	20
Peta 3.1	Rumah Tangga Tanpa Akses Terhadap Listrik	25
Peta 3.2	Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan	28
Peta 3.3	Rumah Tangga dengan Proporsi Pengeluaran untuk Pangan Lebih dari 65% Terhadap Total Pengeluaran	32
Peta 4.1	Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk	38
Peta 4.2	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih	42
Peta 4.3	Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun	46
Peta 5.1	Persentase Balita dengan Tinggi Badan di Bawah Standar ( <i>Stunting</i> )	53
Peta 5.2	Angka Harapan Hidup	56
Peta 6.1	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2019	65
Peta 6.2	Perubahan Status Prioritas Kabupaten antara FSVA 2018 dan FSVA 2019	70
Peta 7.1	Sifat Hujan Indonesia Tahun 2018	76



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Indikator Individu dan Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Wilayah Kabupaten	87
Lampiran 2	Data Indikator Individu dan Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Wilayah Kota	99



## RINGKASAN EKSEKUTIF

### PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

#### FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA) 2019

1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
2. FSVA 2019 adalah pemutakhiran dari peta 2018. Pemutakhiran dilakukan pada data yang digunakan sesuai perkembangan kondisi terkini dari setiap indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan bagian dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota. Sembilan indikator digunakan dalam penyusunan FSVA. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan beras, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Indikator pada akses pangan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*), dan angka harapan hidup pada saat lahir.
3. Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan FSVA adalah metode pembobotan dengan menggunakan *expert judgement*. Wilayah yang dianalisis dalam FSVA 2019 sebanyak 514 kabupaten/kota, terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Analisis komposit dibedakan antara wilayah kabupaten dan perkotaan.
4. Kabupaten/kota diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat ketahanan pangan yang dihitung secara komposit dari 9 indikator. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rentan rawan pangan terbagi atas 3, yaitu Prioritas 1 merupakan wilayah sangat rentan, Prioritas 2 merupakan wilayah rentan, dan Prioritas 3 merupakan wilayah agak rentan. Kabupaten/kota di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi Prioritas 4 merupakan wilayah agak tahan, Prioritas 5 merupakan wilayah tahan, sedangkan Prioritas 6 merupakan wilayah sangat tahan.
5. Hasil analisis FSVA tahun 2019 menunjukkan bahwa kabupaten rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 71 kabupaten dari 416 kabupaten (17%) yang terdiri dari 25 kabupaten (6%) Prioritas 1; 19 kabupaten (5%) Prioritas 2; dan 27 kabupaten (6%) Prioritas 3. Kabupaten Prioritas 1 (sangat rentan) tersebar di Provinsi Papua (delapan belas kabupaten), Papua Barat (lima kabupaten), Maluku dan Sumatera Barat masing-masing satu kabupaten. Karakteristik kabupaten rentan pangan ditandai dengan tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, tingginya

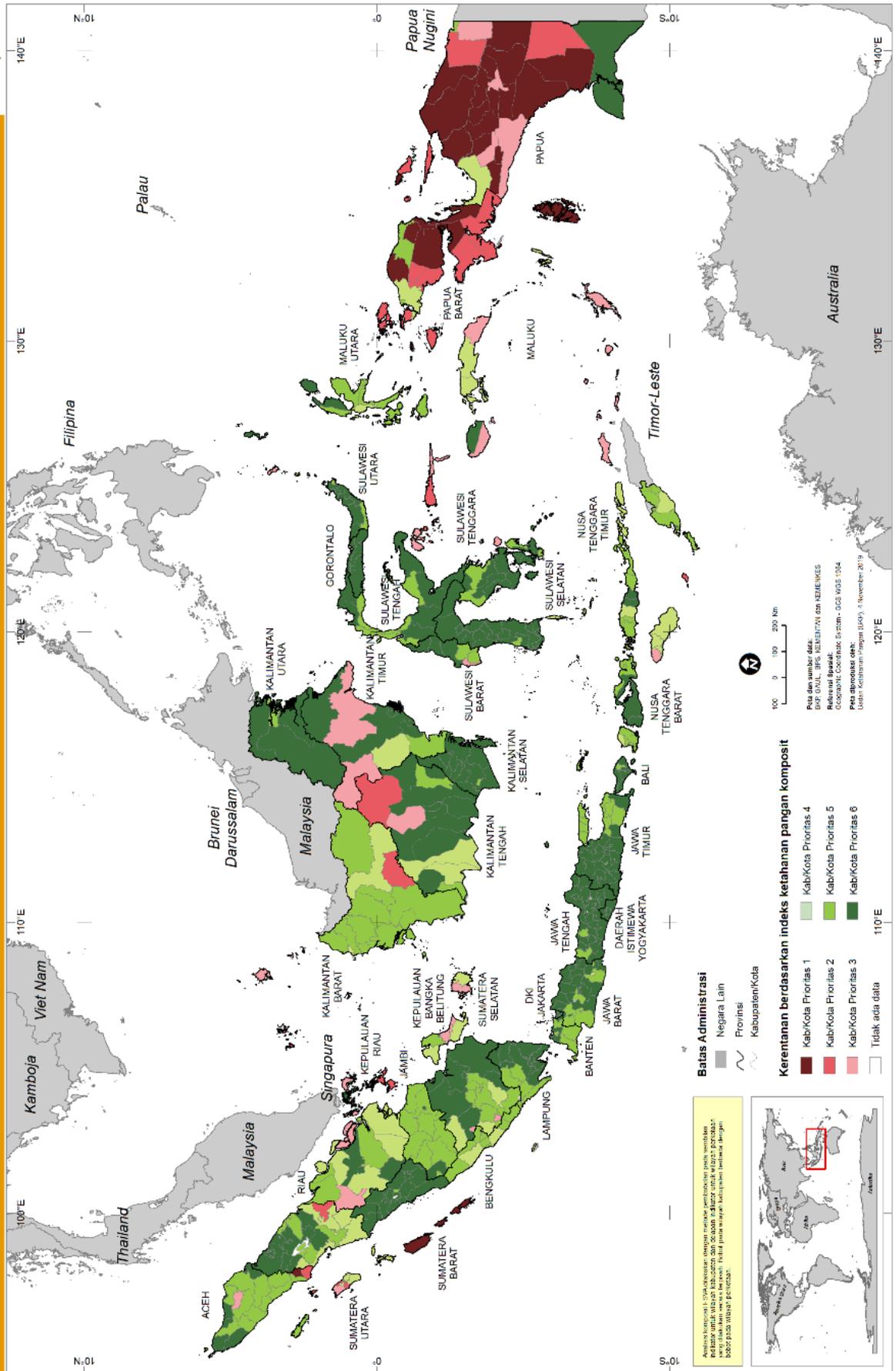
- prevalensi balita *stunting*, tingginya penduduk miskin, tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih, dan tingginya rasio penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.
6. Sementara itu, Kota Rentan Rawan Pangan Prioritas 1-3 sebanyak 5 Kota dari 98 kota di Indonesia (5%). Pada wilayah perkotaan, terdapat 1 kota (1%) Prioritas 1, yaitu Kota Subulussalam di Aceh; 1 kota (1%) Prioritas 2, yaitu Kota Gunung Sitoli di Sumatera Utara; serta 3 kota (3%) Prioritas 3, yaitu Kota Pagar Alam dan Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, dan Kota Tual (Maluku). Karakteristik kota rentan pangan ditandai dengan tingginya prevalensi balita *stunting*, tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih, tingginya penduduk miskin, tingginya rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan >65% terhadap total pengeluaran, dan rendahnya angka harapan hidup.
  7. Program pembangunan ketahanan pangan selama satu tahun telah berhasil menurunkan jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) dari 88 kab/kota pada tahun 2018 turun menjadi 76 kab/kota (terjadi penurunan sebanyak 12 kabupaten/kota) pada tahun 2019. Secara lebih umum, pembangunan ketahanan yang dilakukan mampu meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 138 kabupaten/kota, yaitu:
    - a. 11 kabupaten (3%) dan 1 kota (1%) telah berhasil mengalami peningkatan status ketahanan pangan sebanyak dua tingkat atau lebih.
    - b. 99 kabupaten (24%) dan 27 kota (28%) yang menunjukkan perbaikan satu tingkat.
  8. Fokus lokasi pengentasan kerentanan pangan di wilayah kabupaten diprioritaskan pada:
    - a. Kabupaten-kabupaten yang terletak di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki daerah Prioritas 1-3 terbesar
    - b. Kabupaten-kabupaten yang lokasinya jauh dari ibu kota provinsi/daerah perbatasan yang rata-rata memiliki tingkat ketahanan pangan lebih rendah dibandingkan kabupaten lain
    - c. Kabupaten-kabupaten di kepulauan dengan tingkat kerentanan pangan tinggi
  9. Fokus pengentasan kerentanan pangan di wilayah perkotaan diprioritaskan pada:
    - a. Kota-kota yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan terutama dalam hal stabilisasi pasokan dan daya beli masyarakat
    - b. Kota-kota yang memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan pangan dikarenakan oleh pemahaman/pengetahuan yang terbatas ataupun karena buruknya sanitasi.
  10. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan mengentaskan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:
    - a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal
    - b. Penanganan balita *stunting* melalui intervensi program gizi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif
    - c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah

- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan
  - e. Pemerataan penyediaan tenaga kesehatan
  - f. Peningkatan pendidikan perempuan.
11. Program-program pengentasan kerentanan pangan di daerah perkotaan diarahkan pada kegiatan:
- a. Penanganan balita *stunting* melalui intervensi program gizi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif
  - b. Sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
  - c. Peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih
  - d. Peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat
  - e. Peningkatan sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui sosialisasi dan penyuluhan.
12. Sinergi program pembangunan ketahanan pangan dan gizi dari pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, swasta dan seluruh komponen masyarakat perlu dilakukan konvergen terutama di wilayah rentan rawan pangan agar target pengentasan daerah rentan dapat tercapai sehingga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan dapat terwujud.





# Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2019



# BAB 1

## PENDAHULUAN

Dimensi pembangunan diarahkan pada kebijakan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia tangguh dan unggul ditentukan oleh asupan gizi yang dipenuhi dari kecukupan pangan, sebagai komponen dasar tumbuh kembang sejak usia anak-anak hingga dewasa. Kecukupan gizi akan meningkatkan kecerdasan manusia, menyehatkan fisik serta menguatkan mental dan perilakunya, sehingga tidak dapat ditunda pemenuhannya.

Kecukupan gizi dipenuhi dari pangan. Pangan berkualitas tidak hanya dinilai dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi keragaman baik jenis maupun kandungan gizi, serta jaminan keamanannya. Dengan demikian, pangan berkontribusi nyata terhadap pembentukan generasi yang berkualitas asalkan tersedia, terjangkau dan dimanfaatkan dengan baik melalui pengolahan yang aman dan tepat serta dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pembangunan pertanian seyogyanya diarahkan pada peningkatan produksi pangan yang beragam dan pemanfaatan pangan yang berkualitas.

Meskipun dari sisi ketersediaan pangan telah mencukupi, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan pemanfaatan pangan dan gizi. Situasi konsumsi pangan di Indonesia yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan juga masih menunjukkan kondisi yang belum ideal. Pada tahun 2018, skor PPH sebesar 91,3 dimana situasi konsumsi masyarakat Indonesia masih didominasi oleh kelompok padi-padian, yaitu sebesar 65,7 persen. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan angka yang direkomendasikan, yaitu sebesar 50 persen. Sementara itu, konsumsi pada kelompok umbi-umbian mencapai 2,7 persen, pangan hewani 11,6 persen, kacang-kacangan 3,0 persen, serta sayur dan buah 5,6 persen. Angka tersebut masih belum mencapai konsumsi yang direkomendasikan, yaitu sebesar 6 persen untuk umbi-umbian, 12 persen untuk pangan hewani, 5 persen untuk kacang-kacangan, dan 6 persen untuk sayur dan buah (BKP 2019).

Selain tantangan pemanfaatan pangan dan gizi, Indonesia juga menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pangan masa depan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup. Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 237 juta jiwa. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus meningkat, yaitu pada tahun 2035 penduduk Indonesia akan mencapai 305,65 juta jiwa. Selain itu, pergeseran penduduk desa-kota dan gaya hidup juga ikut mempengaruhi upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pada tahun 2010, persentase penduduk kota sebesar 49,8 persen. Angka tersebut meningkat pada tahun 2015 menjadi 53,3 persen dan diproyeksikan akan mencapai lebih dari 60 persen pada tahun 2035 (BPS 2013).

Tantangan yang mungkin timbul dari sisi penyediaan pangan antara lain persaingan penggunaan sumberdaya lahan, skala usaha tani kecil dan alih fungsi lahan yang tinggi, regenerasi petani lambat, *food loss and waste* yang tinggi, ancaman perubahan iklim (iklim ekstrim), dan lain-lain yang menyebabkan terjadinya degradasi kualitas sumber daya pertanian dan infrastruktur pendukungnya.

Dalam kondisi permintaan terhadap pangan yang terus bertambah, maka ketahanan pangan dan gizi akan tetap menjadi perhatian utama. Perubahan situasi yang terjadi perlu diantisipasi agar tidak berpengaruh terhadap status ketahanan pangan dan gizi.

Pembangunan sektor pertanian yang dilaksanakan selama periode 2014-2018 telah mencatatkan hasil yang positif bagi pencapaian ketahanan pangan dan gizi nasional. Hal ini tercermin dari membaiknya peringkat ketahanan pangan Indonesia berdasarkan *Global Food Security Index* (GFSI 2018) dari posisi 74 (dari 113 negara) pada tahun 2015 menjadi 65 pada tahun 2018. Membaiknya peringkat ketahanan pangan Indonesia ini diukur dari meningkatnya aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, keamanan dan kualitas pangan serta ketahanan dan sumber daya alam. Perbaikan skor GFSI dari tahun 2017 ke 2018 utamanya didukung oleh perbaikan pada aspek ketersediaan sebesar 3,8 poin dan keterjangkauan sebesar 4,4 poin.

Peningkatan capaian ketahanan pangan juga dapat dinilai dari meningkatnya kesejahteraan petani yang dapat dilihat dari meningkatnya NTP sebesar 0,22% dari 102,03 pada tahun 2014 menjadi 102,25 pada tahun 2018 dan dari meningkatnya Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) sebesar 5,39% dari 106,05 tahun 2014 menjadi 111,77 tahun 2018 (BPS 2019).

Sementara itu, *angka Prevalence of Undernourishment (PoU)* yaitu penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan selama tahun 2011-2018. PoU nasional tahun 2011 tercatat 16,97%, menurun menjadi 7,95% pada tahun 2018. Secara nasional, status gizi balita pada tahun 2018 masih cukup rendah. Persentase balita *underweight* (BB/U) sebesar 17,7%, balita *stunting* (TB/U) sebesar 30,8%, dan balita *wasting* (BB/TB) sebesar 10,2% (Risksdas 2018).

Pada sisi yang lain, sebagai negara yang terletak di wilayah *ring of fire* yang rawan bencana, Indonesia harus terus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta potensi kerawanan pangan yang bersifat transien sebagai dampak bencana. Demikian halnya dengan antisipasi terhadap peningkatan anomali perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi yang dapat menyebabkan kegagalan panen dan kerentanan pangan dan gizi masyarakat.

## 1.1. Dasar Pemikiran untuk Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Dalam rangka mengantisipasi, mencegah dan menangani persoalan rawan pangan dan gizi buruk diperlukan data dan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik. Informasi ketahanan pangan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/pencegahan dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi,

yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Data dan informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan yang terupdate menjadi salah satu dasar para pembuat keputusan dalam penetapan kebijakan dan program intervensi serta lokus program, baik di tingkat pusat maupun tingkat wilayah. Penetapan lokus dan intervensi program akan lebih tepat dan sesuai dengan yang diperlukan di daerah rentan rawan pangan.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*—FSVA) disusun sebagai instrumen analisis monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme* (WFP). Kerja sama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2009 diluncurkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*), selanjutnya dilakukan update.

Pada tahun 2019 FSVA disusun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. FSVA Nasional disusun dengan unit analisis kabupaten, FSVA Provinsi dengan unit analisis kecamatan, sedangkan FSVA Kabupaten menggunakan unit analisis desa. Dengan demikian, dapat diketahui tingkat ketahanan pangan sampai ke level desa sehingga jika dilaksanakan intervensi program akan tepat sasaran.

FSVA memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan. FSVA telah dimanfaatkan oleh banyak instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai dasar dalam menentukan target intervensi program, khususnya terkait penurunan angka kemiskinan, balita *stunting* dan angka rawan pangan. Badan Ketahanan Pangan memanfaatkan FSVA sebagai salah satu rujukan dalam menetapkan lokasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), pengembangan Kawasan Mandiri Pangan, Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU), serta pengembangan Pertanian Keluarga (PK). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memanfaatkan FSVA sebagai dasar dalam Penanganan Daerah Rawan Pangan - Penanganan Daerah Tertinggal (PDRT-PDT). Kementerian Pendidikan Nasional memanfaatkan FSVA dalam rangka penentuan lokasi Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS). Bappenas memanfaatkan hasil FSVA untuk Program *Scale Up Nutrition (Sun)*. Lembaga internasional seperti *World Food Programme* (WFP) memanfaatkan FSVA dalam menentukan lokasi intervensi kerentanan pangan di NTT, NTB, dan Papua, serta penentuan lokasi survey biaya pangan. Sementara di tingkat daerah, sebagian pemerintah daerah telah menjadikan hasil rekomendasi FSVA sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan program ketahanan pangan dan gizi.

Dalam rangka memperluas pemanfaatan FSVA, pada tanggal 30 Oktober 2019 telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS): Sinergi Dukungan Program Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan oleh 8 pihak, yaitu Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian; Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan; Direktur Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial; Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan Kepala Pusat Laboratorium Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional.

Pemutakhiran FSVA 2019 dilakukan agar potret ketahanan dan kerentanan pangan di tingkat wilayah dapat digambarkan secara lebih akurat yang dapat mencerminkan kondisi dan fakta terbaru sebagai hasil dari pembangunan. FSVA merupakan produk dari partisipasi aktif seluruh *stakeholder* terkait ketahanan di tingkat pusat dan Dinas/Kantor Ketahanan Pangan Provinsi di bawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan Pusat.

## 1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Undang-Undang No. 18 tahun 2012 mendefinisikan Ketahanan Pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan dan gizi juga mensyaratkan efektivitas pangan dan sanitasi.

Kerangka konseptual ketahanan pangan dalam penyusunan FSVA 2019 dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan: ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut. **Ketersediaan pangan** adalah **kondisi tersedianya pangan** dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk di dalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kabupaten dan tingkat masyarakat.

**Akses pangan** adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan** yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

**Pemanfaatan pangan** merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga** dan **kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga.

Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.



**Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi**

Kinerja masing-masing pilar tersebut tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan (*food utilization*) termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga. Apabila salah satu atau lebih, dari ke tiga pilar tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan berdampak pada status gizi dan kesehatan. **Dampak gizi dan kesehatan** merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

### 1.3. Metodologi

Kerawanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter yang berbeda yang berada di luar cakupan masalah produksi pangan semata, dengan tidak ada satu ukuran yang langsung dapat mengukur masalah ini. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator-indikator yang dipilih telah melalui proses penelaahan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Teknis berdasarkan ketersediaan data di tingkat kabupaten serta kapasitas indikator-indikator tersebut dalam mencerminkan unsur-unsur inti dari tiga pilar ketahanan pangan dan gizi (Tabel 1.1). FSVA 2019 membagi indikator tersebut menjadi dua kelompok indikator, yaitu kerentanan terhadap kerentanan pangan kronis dan kerentanan pangan transien. Kerentanan terhadap **kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan

minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi kronis, yaitu rasio konsumsi pangan terhadap produksi bersih sereal, persentase penduduk miskin, pangsa pengeluaran pangan rumah tangga terhadap pengeluaran total, infrastruktur listrik, akses terhadap air minum dan fasilitas kesehatan, angka harapan hidup, tingkat pendidikan perempuan dan *stunting* pada balita.

Peta ini memberikan gambaran masing-masing indikator serta analisis komposit dari 9 indikator ketahanan pangan dan gizi pada tingkat kabupaten. Masing-masing kabupaten dikelompokkan dalam 6 prioritas, kelompok yang sangat rentan pangan (Prioritas 1) sampai dengan kelompok yang sangat tahan pangan (Prioritas 6) berdasarkan analisis komposit. Kelompok Prioritas 1-3 merupakan kabupaten-kabupaten yang paling masuk kategori rentan pangan sedangkan Prioritas 4-6 merupakan kabupaten yang masuk kategori tahan pangan.

**Kerawanan pangan transien** adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat. Indikator yang digunakan meliputi data kejadian bencana alam yang memiliki dampak terhadap ketahanan pangan, estimasi hilangnya produksi padi yang disebabkan oleh banjir dan kekeringan, dan variabilitas curah hujan. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan, dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

### Indikator

Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA 2019 merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara berkala.

**Tabel 1.1 Ringkasan Indikator FSVA 2019**

Indikator	Definisi	Sumber Data
<b>Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan dan Gizi Kronis</b>		
<b>Ketersediaan Pangan</b>		
Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih sereal dan umbi-umbian utama (beras, jagung, ubi kayu dan ubi jalar). Konsumsi normatif sereal dan umbi-umbian utama adalah 300 gram/kapita/hari.	KSA 2018, Badan Pusat Statistik

Indikator	Definisi	Sumber Data
<b>Akses Pangan</b>		
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Dikategorikan miskin jika pengeluaran perkapita sebulan kurang dari garis kemiskinan provinsi (menurut kota dan desa)	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2018, BPS
Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk makanan lebih dari 65% dibandingkan dengan total pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan).	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2018, BPS
Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik dari PLN dan/atau non PLN, misalnya generator.	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2018, BPS
<b>Pemanfaatan Pangan</b>		
Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	Rata-rata lama bersekolah (total tahun bersekolah dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki) oleh perempuan berumur 15 tahun keatas	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2018, BPS
Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	Persentase rumah tangga dengan sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari sumber tak terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan, dan lainnya	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2018, BPS
Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	Total jumlah penduduk per jumlah tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis) dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk.	Profil Tenaga Kesehatan 2018, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes
Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar ( <i>stunting</i> )	Anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005).	Data RISKESDAS 2018, Kementerian Kesehatan
Angka harapan hidup pada saat lahir	Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya.	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2018, BPS
<b>Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Transien</b>		
Bencana alam yang terkait iklim	Bencana alam yang terkait iklim dan perkiraan dampaknya terhadap ketahanan pangan.	Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), 2018

Indikator	Definisi	Sumber Data
Variabilitas curah hujan	Perubahan curah hujan bulanan yang disebabkan oleh perubahan suhu permukaan laut sebesar satu derajat celsius.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), 2018
Kehilangan produksi	Rata-rata hilangnya produksi tanaman pangan akibat banjir, kekeringan dan organisme pengganggu tanaman (OPT).	Kementerian Pertanian, 2018

## Metode Analisis

### 1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu ke dalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris atau mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan aturan nasional atau internasional yang berlaku. Penetapan range delapan indikator mengikuti pola sebaran empiris. Satu indikator yaitu presentase balita *stunting* mengikuti aturan *World Health Organization* (WHO). Klasifikasi penentuan *cut off point* indikator tercantum pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2 Cut off Point Indikator Individu**

Indikator	Range
<b>Ketersediaan Pangan</b>	
	≥ 1,50
	1,25 - <1,50
1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu	1,00 - <1,25
	0,75 - <1,00
	0,50 - <0,75
	< 0,50
<b>Akses terhadap Pangan</b>	
	≥ 35
	25 - < 35
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	20 - < 25
	15 - < 20
	10 - < 15
	<10
	≥ 50
	40 - <50
	30 - <40
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	20 - <30
	10 - <20
	<10
	≥ 50
	40 - < 50
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	30 - < 40
	20 - < 30
	10 - < 20
	< 10

Indikator	Range
<b>Pemanfaatan Pangan</b>	
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	< 6
	6 - < 6,5
	6,5 - < 7,5
	7,5 - < 8,5
	8,5 - < 9
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	≥ 9
	≥ 70
	60 - <70
	50 - <60
	40 - <50
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	30 - <40
	< 30
	≥30
	20 - <30
	15 - <20
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar ( <i>stunting</i> )	10 - <15
	5 - <10
	<5
	≥ 40
	30 - < 39
9. Angka Harapan Hidup pada saat lahir	20 - < 29
	< 20
	≤58
	>58 - 61
	>61 - 64
	>64 - 67
	>67 - 70
	> 70

## 2. Analisis Komposit

Berdasarkan kesepakatan dalam Kelompok Kerja Teknis FSVA, pendekatan metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan bahwa jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit sebagai berikut:

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
2. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- $Y_j$  : Skor komposit kabupaten/kota ke-j
- $a_i$  : Bobot masing-masing indikator ke-i
- $X_{ij}$  : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j
- $i$  : Indikator ke 1, 2, ..., 9
- $j$  : Kabupaten ke 1, 2, ..., 416; Kota ke 1, 2, ..., 98

Besaran bobot masing-masing indikator berdasarkan rekomendasi para ahli (*expert judgement*) yang berasal dari akademisi dan pemerintah (Tabel 1.3). Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya menggunakan delapan (8) indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu, pada perhitungan komposit wilayah perkotaan indikator rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih tidak digunakan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudian dialihkan kepada 8 indikator lainnya secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek. Bobot setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

**Tabel 1.3 Bobot Indikator Individu**

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
<b>Aspek Ketersediaan Pangan</b>			
1.	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu	0,30	-
<b>Sub Total</b>		<b>0,30</b>	<b>-</b>
<b>Aspek Keterjangkauan Pangan</b>			
2.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	0,15	0,20
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	0,075	0,125
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075	0,125
<b>Sub Total</b>		<b>0,30</b>	<b>0,45</b>
<b>Aspek Pemanfaatan Pangan</b>			
5	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15	0,18
6	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10	0,13
7	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,05	0,08
8	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05	0,08
9	Prevalensi balita <i>stunting</i>	0,05	0,08
<b>Sub Total</b>		<b>0,40</b>	<b>0,55</b>

3. Mengelompokkan kabupaten/kota ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{i=1}^9 a_i C_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

$K_j$ : *Cut off point* komposit ke-j

$a_i$ : Bobot indikator ke-i

$C_{ij}$ : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-i komposit ke-j

i: indikator ke 1,2,3,.....9

j: komposit ke 1,2,3,.....6

**Tabel 1.4 Cut off Point Komposit**

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota
1	<= 41,52	<= 28,84
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13
5	> 67,75 – 75,68	> 61,13 – 70,64
6	> 75,68	> 70,64

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah kabupaten/kota yang diidentifikasi relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua kecamatan, desa serta penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua kecamatan, desa serta penduduk di kabupaten Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan. Untuk dapat mengidentifikasi daerah mana yang benar-benar rentan pangan pada level kecamatan dan desa, disarankan adanya tindak lanjut berupa pembuatan peta provinsi dan kabupaten.

### 3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menunjukkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.



## BAB 2

# KETERSEDIAAN PANGAN

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan utamanya dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional atau impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Aspek ketersediaan pangan pada FSVA diproksi dari indikator rasio konsumsi normatif karbohidrat terhadap ketersediaan pangan yang didekati dari aspek produksi. Data perdagangan antar wilayah tidak dihitung karena data tersebut tidak tersedia di tingkat kabupaten (BKP, 2012).

Analisis terhadap produksi tanaman pangan dan umbi-umbian (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar) dilakukan terhadap 416 kabupaten dan 98 kota. Keempat komoditas tersebut dipilih karena keterbatasan data komoditas lainnya, terutama untuk pangan spesifik lokal, serta keempat komoditas tersebut menyumbang hampir 50 persen dari asupan kebutuhan energi per hari pada rata-rata konsumsi pangan masyarakat Indonesia. Rasio konsumsi normatif didapat dengan cara menghitung rasio antara konsumsi sereal per kapita terhadap produksi.

Selama sepuluh tahun terakhir, tren produksi padi, jagung dan ubi jalar meningkat, sedangkan ubi kayu menunjukkan tren produksi yang menurun (Tabel 2.1). Jagung merupakan komoditas dengan rata-rata pertumbuhan produksi per tahun tertinggi, yaitu 6,47%, sedangkan produksi ubi kayu turun sekitar 1,33% per tahun. Sementara pertumbuhan produksi padi sebesar 2,89% per tahun. Pada tahun 2018 produksi padi dan jagung menunjukkan angka lebih tinggi dari produksi rata-rata selama 10 tahun terakhir.

**Tabel 2.1. Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar Tahun 2009-2018**

Komoditas	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata 10 tahun	Rata-rata pertumbuhan
Padi	44.186	45.607	45.118	47.382	48.907	48.610	51.733	54.448	55.679	56.975	49.865	2,893
Jagung	17.630	18.328	17.643	19.387	18.512	19.008	19.612	23.578	28.924	30.056	21.268	6,473
Ubi Kayu	22.039	23.918	24.044	24.177	23.937	23.436	21.801	20.260	19.054	19.341	22.201	-1,330
Ubi Jalar	2.058	2.051	2.196	2.483	2.387	2.383	2.298	2.169	1.914	2.029	2.197	0,095

Sumber:

1. Padi (BPS, 2018)
2. Jagung, ubi kayu, ubi jalar (Kementan, 2018)

Secara umum, produksi padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar di Indonesia masih didominasi oleh provinsi-provinsi yang ada di Jawa yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di luar ketiga provinsi tersebut, Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan memiliki produksi padi lebih dari satu juta ton. Sedangkan untuk komoditas jagung, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Gorontalo juga memiliki produksi lebih dari satu juta ton. Produksi tertinggi komoditas ubi kayu terdapat di Provinsi Lampung, sedangkan komoditas ubi jalar produksi tertinggi terdapat di Jawa Barat dan Papua. Sebaran produksi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar tahun 2018 untuk setiap provinsi disajikan dalam Tabel 2.2.

**Tabel 2.2. Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar Tahun 2018**

Provinsi	Produksi tahun 2018 (Ton)			
	Padi (GKG)	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
Aceh	1.707.342	347.735	15.672	6.860
Sumatera Utara	1.925.445	1.757.126	803.403	94.491
Sumatera Barat	1.511.746	1.052.408	201.833	140.908
Riau	365.494	25.723	133.738	3.576
Jambi	497.471	152.158	56.605	44.977
Sumatera Selatan	2.687.331	935.240	382.043	12.801
Bengkulu	253.048	111.816	73.491	41.132
Lampung	1.923.277	2.581.224	6.683.758	21.306
Kepulauan Bangka Belitung	14.902	3.630	59.426	3.938
Kepulauan Riau	825	87	19.722	1.577
DKI Jakarta	4.344	-	-	-
Jawa Barat	9.645.192	1.550.966	1.635.031	477.828
Jawa Tengah	9.609.086	3.688.477	3.267.417	158.942
DI Yogyakarta	506.148	314.179	859.393	5.061
Jawa Timur	10.596.382	6.543.359	2.551.840	321.399
Banten	1.618.615	174.334	72.616	22.452
Bali	648.139	51.459	92.144	35.531
Nusa Tenggara Barat	1.405.432	2.059.222	58.021	7.329
Nusa Tenggara Timur	810.204	859.230	853.468	79.643
Kalimantan Barat	614.789	166.826	147.475	11.544
Kalimantan Tengah	741.046	158.964	142.852	6.126
Kalimantan Selatan	1.165.536	364.489	88.974	16.885
Kalimantan Timur	243.402	88.105	86.079	12.002
Kalimantan Utara	47.662	5.977	44.050	2.936
Sulawesi Utara	363.716	1.531.241	41.651	17.788
Sulawesi Tengah	952.207	380.650	48.405	18.527
Sulawesi Selatan	5.790.001	2.341.659	422.601	70.082
Sulawesi Tenggara	495.079	192.329	209.159	25.760
Gorontalo	238.540	1.619.649	2.781	454
Sulawesi Barat	322.176	702.339	22.174	5.483
Maluku	89.828	40.550	85.734	5.174
Maluku Utara	36.645	237.778	122.706	31.625
Papua Barat	14.035	4.218	22.798	17.883
Papua	129.557	12.476	34.173	307.333
<b>Indonesia</b>	<b>56.974.642</b>	<b>30.055.623</b>	<b>19.341.233</b>	<b>2.029.353</b>

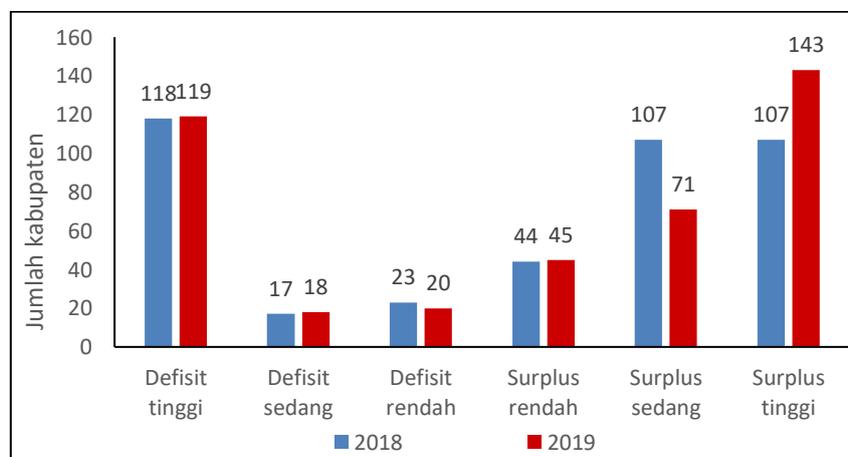
Sumber:

1. Padi (BPS, 2018)
2. Jagung, ubi kayu, ubi jalar (Kementan, 2018)

## 2.1. Rasio Konsumsi Normatif per Kapita Terhadap Produksi

Produksi sereal dan umbi-umbian utama dihitung dengan mengambil rata-rata produksi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar tahun 2018. Data rata-rata produksi bersih sereal dihitung dengan menggunakan faktor konversi standar (benih, pakan dan tercecer). Khusus rata-rata produksi bersih ubi kayu dan ubi jalar dibagi dengan 3 (nilai kalori 3 kg ubi kayu atau ubi jalar setara dengan 1 kg beras atau jagung) untuk mendapatkan nilai yang ekuivalen dengan sereal. Selanjutnya dihitung total produksi sereal dan umbi-umbian utama yang tersedia untuk dikonsumsi. Ketersediaan bersih sereal per kapita dihitung dengan membagi total produksi sereal di kabupaten/kota tertentu dengan perkiraan jumlah penduduk tahun 2018, kemudian dihitung rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih sereal dan umbi-umbian utama. Berdasarkan profil konsumsi Indonesia, konsumsi normatif sereal dan umbi-umbian total per kapita per hari sekitar 300 gram.

Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih sereal tahun 2019 untuk wilayah kabupaten menunjukkan bahwa sebanyak 62,3% kabupaten mengalami surplus dan 37,7% kabupaten mengalami defisit. Kabupaten dengan defisit pangan banyak terdapat di Provinsi Papua (6,25%), Sumatera Utara (3,6%), Papua Barat (2,8%), Riau (2,4%) dan Maluku (1,9%). Defisit ketersediaan disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan meningkatnya produksi sereal dan umbi-umbian, ketidaksesuaian dan kurangnya ketersediaan lahan untuk produksi sereal dan umbi-umbian, perluasan areal perkebunan, pertambangan, industri dan perumahan. Selain itu, beberapa provinsi seperti Papua, Maluku, Riau, dan NTT masyarakatnya juga mengkonsumsi dan menanam sagu dan sumber karbohidrat lainnya seperti sorghum dan pisang. Akan tetapi, dalam analisis FSVA, komoditas sagu, sorghum, dan pisang tidak diikutsertakan dalam perhitungan karena tidak tersedia data hingga level kabupaten. Oleh karena itu, walaupun secara perhitungan terjadi defisit rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih sereal dan umbi-umbian di daerah tersebut, tidak berarti kebutuhan pangannya tidak tercukupi sehingga terjadi kerentanan pangan. Oleh karena itu kedepan, penyediaan data sumber karbohidrat lain selain beras, jagung, ubi kayu dan ubi jalar perlu dioptimalkan. Potret rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan bagi wilayah-wilayah tertentu yang sumber karbohidratnya tidak hanya dari beras, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar akan lebih optimal.



**Gambar 2.1. Sebaran Kelompok Rasio Konsumsi Normatif per Kapita Terhadap Produksi Bersih Sereal Kabupaten**

Jumlah kabupaten dengan rasio konsumsi normatif pada kelompok defisit tinggi, defisit sedang, defisit rendah dan surplus rendah cenderung tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2018. Akan tetapi, pada kelompok surplus sedang dan surplus tinggi cenderung mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu kelompok surplus sedang mengalami penurunan dari 107 kabupaten menjadi 71. Kabupaten kelompok surplus tinggi mengalami peningkatan, sebanyak 36 kabupaten mampu meningkatkan produksi sereal dan umbi-umbiannya sehingga rasionya (NCPR) semakin kecil.

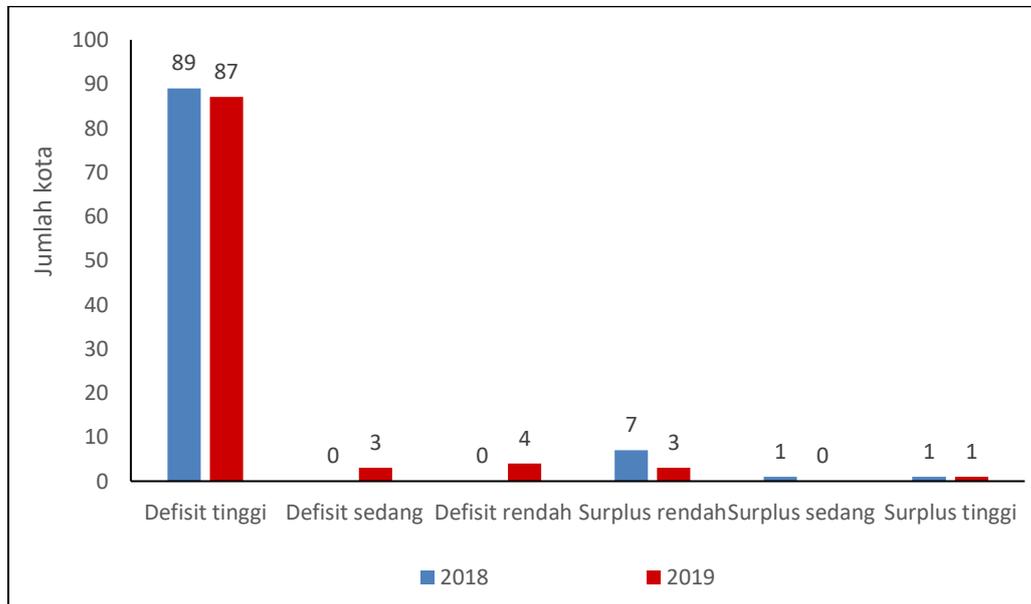
Secara umum, sebanyak 95 kabupaten mengalami kenaikan peringkat dibandingkan tahun 2018. Sekitar 40 persen merupakan kabupaten dalam kelompok surplus sedang yang naik peringkat menjadi kelompok surplus tinggi. Kabupaten-kabupaten tersebut banyak terdapat di Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Kabupaten yang mengalami kenaikan peringkat cukup signifikan antara lain Kabupaten Malaka (NTT), Buol (Sulawesi Tengah), Wakatobi dan Muna Barat (Sulawesi Tenggara), serta Landak (Kalimantan Barat). Kenaikan peringkat ini disebabkan oleh meningkatnya produksi, khususnya padi dan jagung. Hal tersebut menunjukkan bahwa intervensi pemerintah, baik pusat maupun daerah terkait peningkatan produksi pangan di daerah tersebut telah berhasil dilakukan.

Di sisi lain, sebanyak 65 kabupaten mengalami penurunan peringkat, lebih dari 80 persen dari jumlah tersebut hanya mengalami penurunan satu dan dua tingkat. Kabupaten tersebut banyak terdapat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat. Sedangkan kabupaten yang mengalami penurunan cukup tinggi, yaitu 5 peringkat adalah Padang Lawas Utara dan Tebo. Penurunan peringkat di Kabupaten Padang Lawas Utara disebabkan adanya penurunan produksi, khususnya komoditas padi, yang antara lain dipengaruhi oleh terjadinya banjir di wilayah tersebut. Tebo juga mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan, khususnya padi dan ubi kayu, yang dipengaruhi adanya puso yang mencapai 1.187 ha (Pusdatin Kementan, 2018).

Sebanyak 256 kabupaten tidak mengalami perubahan peringkat dibandingkan tahun 2018. Kabupaten-kabupaten tersebut banyak terdapat pada kelompok defisit tinggi (99 kabupaten) dan kelompok surplus tinggi (94 kabupaten). Kabupaten pada kelompok defisit tinggi tersebar di Provinsi Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah kabupaten-kabupaten tersebut memiliki tingkat kesesuaian lahan terhadap sereal dan umbi-umbian yang rendah. Sedangkan kabupaten yang termasuk kelompok surplus tinggi tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Di Pulau Kalimantan, sebanyak 9 kabupaten mengalami penurunan peringkat, enam diantaranya berada di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau merupakan kabupaten dengan penurunan tertinggi, disusul dengan Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan luas tanam di daerah tersebut, khususnya Kabupaten Sanggau dan Sintang. Sedangkan untuk Kabupaten Kapuas Hulu selain disebabkan penurunan luas tanam juga disebabkan oleh terjadinya puso yang cukup besar di areal penanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar.

Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih sereal tahun 2019 untuk wilayah perkotaan menunjukkan bahwa hampir seluruh kota mengalami defisit, kecuali Kota Payakumbuh (Sumatera Barat), Sungai Penuh (Jambi), Metro (Lampung) dan Kotamobago (Sulawesi Utara). Hal ini disebabkan karena umumnya wilayah perkotaan tidak memiliki lahan pertanian.



**Gambar 2.2. Sebaran Kelompok Rasio Konsumsi Normatif per Kapita Terhadap Produksi Bersih Sereal Kota**

Karakteristik kota adalah memenuhi ketersediaan pangan melalui perdagangan antar wilayah. Wilayah kota yang rata-rata lebih sempit dibandingkan kabupaten menyebabkan tidak tersedia lahan yang cukup untuk produksi. Beberapa kota masih berupaya mempertahankan lahan untuk produksi pangan. Sebanyak 5 kota berhasil meningkatkan peringkat, 7 kota mengalami penurunan peringkat dan sebanyak 86 kota tidak mengalami perubahan peringkat dibandingkan tahun 2018. Kota yang mengalami kenaikan peringkat adalah Kota Metro (Lampung), Kota Kotamobago (Sulawesi Utara), Kota Solok (Sumatera Barat), Kota Banjar (Jawa Barat) dan Kota Palopo (Sulawesi Selatan). Sedangkan kota yang mengalami penurunan peringkat adalah Kota Tomohon (Sulawesi Utara), Bima (NTB), Probolinggo (Jawa Timur), Pagar Alam (Sumatera Selatan), Padang Sidempuan (Sumatera Utara), Sawah Lunto (Sumatera Barat) dan Pariaman (Sumatera Barat).

## 2.2. Pencapaian dalam Ketersediaan Pangan

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian selama tahun 2018 telah berhasil meningkatkan rata-rata produksi 7 komoditas pangan strategis nasional sebesar 12,18% dibandingkan tahun 2017. Peningkatan produksi tertinggi ditunjukkan oleh komoditas kedelai (82,39%), sedangkan yang terendah ditunjukkan oleh komoditas bawang merah (0,98%). Peningkatan produksi komoditas padi sebesar 2,33%, jagung sebesar 3,91%, cabai sebesar 4,46%, tebu sebesar 2,49% serta daging sapi dan kerbau sebesar 2,37%. Produk Domestik Bruto sektor pertanian sempit juga mengalami

peningkatan secara konsisten dari Rp 969.774 miliar tahun 2017 menjadi Rp 1.005,44 miliar tahun 2018. Peningkatan produksi pertanian ini didukung oleh ketersediaan air irigasi, alat dan mesin pertanian, serta luas baku lahan pertanian yang lebih baik. Upaya meningkatkan ketersediaan air irigasi dilakukan dengan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, dengan nilai mencapai 41,80% dari total rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan/rusak. Angka ini telah melebihi target yang telah ditentukan, yaitu sebesar 33,30%. Total rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebesar 170.636 ha, dan diperkirakan telah mampu memberi tambahan produksi sebanyak 443.653 ton. Ketersediaan alat dan mesin pertanian yang telah difasilitasi oleh Kementerian Pertanian juga telah memenuhi 57,06% dari total kebutuhan. Angka ini telah mencapai 86,07% dari target yang telah ditentukan, yaitu sebesar 66,30%. Total luas baku lahan pertanian yang diperoleh berdasarkan data Luas Baku Sawah (LBS) 2018 dan kegiatan cetak sawah selama 2015-2018 sebesar 7.324.292 ha. Angka ini telah melebihi luas baku lahan sesuai kebutuhan diperoleh berdasarkan asumsi yang dikeluarkan oleh Pusdatin sebesar 6.980.000 ha.

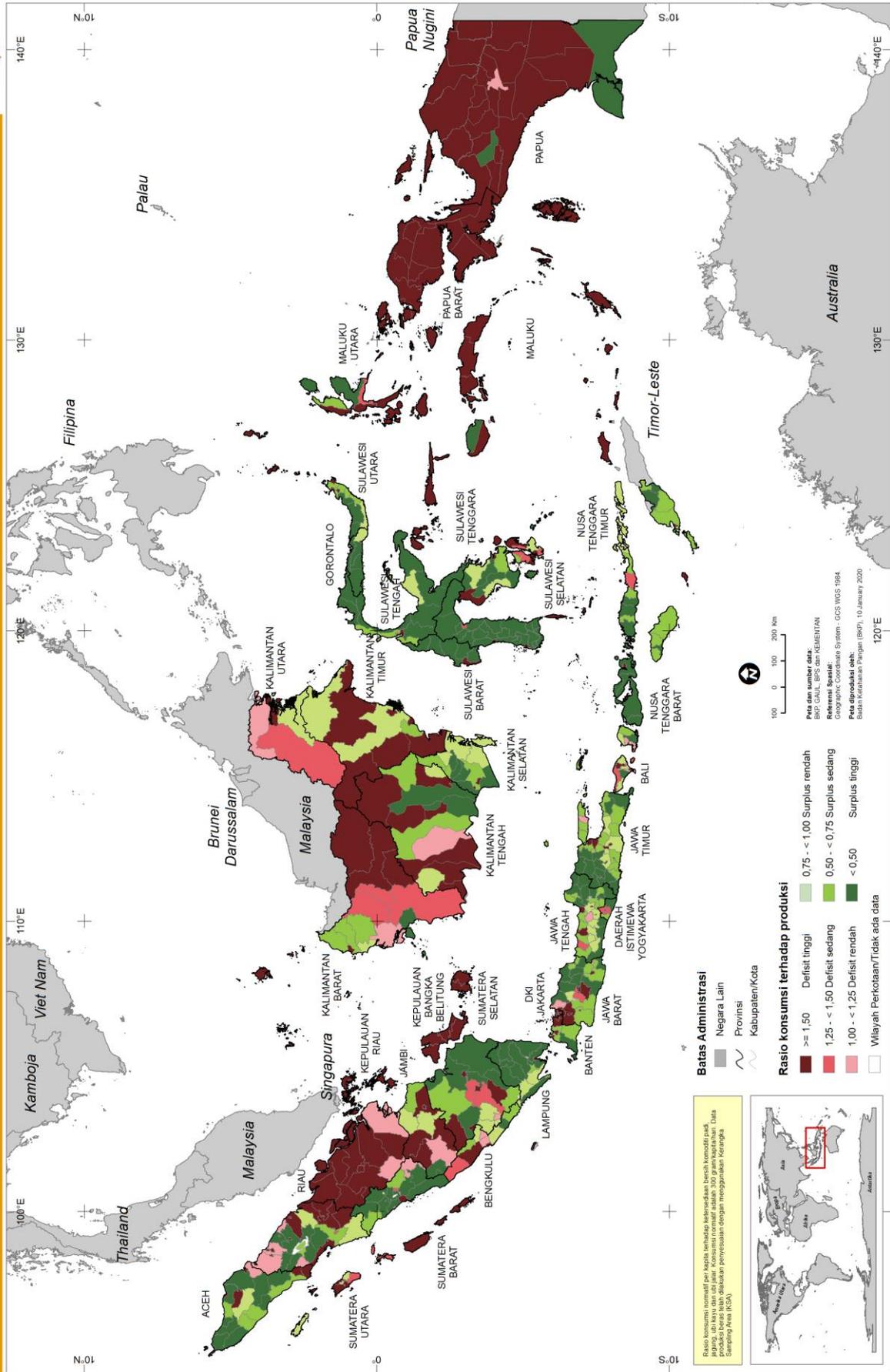
Selain dari sisi produksi, Kementerian Pertanian juga telah mampu menjaga stabilnya harga komoditas pertanian strategis yang ditunjukkan dengan penurunan koefisien variasi (CV) harga pangan. Koefisien variasi (CV) harga pangan menggambarkan seberapa jauh fluktuasi harga yang terjadi untuk setiap komoditas yang dipantau. Kondisi yang diharapkan adalah angka CV yang kecil karena semakin rendah angka koefisien variasi berarti kondisi harga pangan semakin stabil. Pada tahun 2018 rata-rata koefisien variasi harga pangan sebesar 4,5%. Semua komoditas strategis (beras medium, jagung pipilan kering, kedelai biji kering, bawang merah, cabai merah keriting, daging sapi dan gula pasir) menunjukkan penurunan koefisien variasi, dengan penurunan tertinggi terjadi pada komoditas bawang merah (15,32%) diikuti cabai merah keriting (9,37%). Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk stabilisasi harga pangan pertanian strategis antara lain operasi pasar, serap gabah petani, pendirian Toko Tani Indonesia (TTI), dan pembatasan impor. Penurunan volume impor pertanian selama tahun 2018 sebesar 6,13%, dengan penurunan tertinggi pada komoditas itik diikuti yoghurt, sosis, dan produk sejenisnya serta jeruk. Komoditas ubi kayu menunjukkan penurunan volume impor sebesar 3,32%.

Peningkatan produksi dan stabilnya harga komoditas pertanian berimbas terhadap meningkatnya kesejahteraan petani yang diukur melalui pendapatan per kapita petani. Semakin tinggi produksi yang dihasilkan dan didukung dengan harga tinggi yang diterima oleh petani, maka pendapatan petani semakin tinggi. Pada tahun 2018, tingkat pendapatan petani (selain sektor perikanan) sebesar 30,37 juta/kapita atau meningkat sebesar 4,47% dibanding tahun 2017. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) sempit (tidak termasuk perikanan) juga menunjukkan peningkatan, yaitu dari 112,40 pada tahun 2017 menjadi 112,69 pada tahun 2018. Sedangkan Nilai Tukar Pertanian (NTP) pada tahun 2017 sebesar 101,27 dan menjadi 102,46 pada tahun 2018. Peningkatan kesejahteraan petani juga ditunjukkan oleh menurunnya jumlah penduduk miskin pedesaan. Persentase penduduk miskin pedesaan turun sebesar 4,7% dibanding tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di desa sebanyak 16,31 jiwa, sedangkan tahun 2018 turun menjadi 15,54 jiwa (Kementan, 2019).

Hasil upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian juga terlihat dari meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan (*Global Food Security Index*) Indonesia yang dirilis oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU). Pada tahun 2017, posisi Indonesia berada pada peringkat 69 dan naik menjadi peringkat 65 pada tahun 2018. Khusus aspek ketersediaan pangan, terlihat peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 3,8 poin sehingga naik peringkat dari posisi 64 menjadi 58. Posisi ini berada di atas negara tetangga seperti Philipina (peringkat 63), Thailand (peringkat 65), Vietnam (peringkat 72) dan Myanmar (peringkat 78). Berdasarkan capaian di atas, kinerja Kementerian Pertanian dalam menjaga ketersediaan pangan Indonesia telah berhasil dan harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.



## Peta 2.1 Rasio Konsumsi Normatif Per kapita Terhadap Produksi Bersih Serealia



### 2.3. Tantangan untuk Ketersediaan Pangan

Pencapaian keberhasilan penyediaan pangan di masa mendatang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, pola konsumsi dan efektivitas produksi dan efisiensi penanganan pascapanen. Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 237,6 juta jiwa. Angka ini meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan tiga dekade yang lalu. Pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akan meningkat menjadi sekitar 311,6–318,9 juta jiwa (Bappenas 2018). Pertumbuhan penduduk ini tentunya akan meningkatkan jumlah permintaan pangan.

Indonesia telah menjadi negara pengekspor hasil pertanian selama puluhan tahun terakhir yang didominasi oleh tanaman tahunan, terutama kelapa sawit, karet, kakao, kopi dan kelapa, serta komoditas ikan. Akan tetapi, Indonesia masih merupakan pengimpor beberapa komoditas pertanian, seperti gandum, daging sapi, buah-buahan, sayuran dan susu. Pergeseran preferensi makanan merupakan faktor penyebab utama permintaan impor terhadap produk-produk tersebut. Hal ini terjadi karena berubahnya pola konsumsi dan pola permintaan pangan pada kelas berpendapatan menengah di perkotaan yang melebihi kapasitas nasional untuk memproduksi sendiri. Pada tahun 2010, persentase penduduk kota sebesar 49,8%. Angka tersebut meningkat pada tahun 2015 menjadi 53,3% dan diproyeksikan akan mencapai lebih dari 60% pada tahun 2035 (BPS, 2013).

Tingginya kehilangan pangan (*food loss*) dan pangan yang terbuang (*food waste*) dalam sistem pangan juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan pangan di Indonesia. Bukti hingga saat ini menunjukkan bahwa rata-rata proporsi *food loss* dan *food waste* untuk negara-negara di Asia Tenggara lebih banyak terjadi di sisi hulu, yaitu 8,7% untuk proses panen dan 9,6% untuk proses pascapanen (HLPE, 2011). Di sisi hilir, *food loss* dan *food waste* relatif lebih kecil, antara lain 2,7% untuk proses pengolahan dan pengemasan, 4,6% untuk proses transportasi dan 2,6% untuk proses konsumsi.

Pertanian Indonesia juga dihadapkan pada kenyataan bahwa telah terjadi penurunan jumlah petani, walaupun dari sisi kesejahteraan petani menunjukkan tren yang meningkat. Jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian mengalami penurunan dari 35,26 juta orang pada tahun 2015 menjadi 33,10 juta pada tahun 2018. Apabila diklasifikasikan menurut golongan luas lahan, terlihat peningkatan jumlah rumah tangga petani gurem (RTP yang menguasai lahan kurang dari 0,50 ha) yaitu sebesar 14,25 juta rumah tangga (2013) menjadi 15,81 juta rumah tangga (2018) atau sebesar 58,07% dari total rumah tangga petani (SUTAS).

Selain itu, tantangan lainnya untuk penyediaan pangan di Indonesia antara lain: (i) konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian akibat persaingan penggunaan lahan terutama dengan sektor perumahan dan industri, perkebunan dan pertambangan; (ii) meningkatnya kejadian kekeringan dan banjir sebagai dampak dari perubahan iklim global; (iii) penurunan kualitas tanah dan kesuburan karena kerusakan lingkungan; (iv) hama dan penyakit pada tanaman dan ternak yang dapat berpotensi mengurangi tingkat produksi; serta (v) produktivitas petani yang masih rendah terutama petani gurem yang disebabkan oleh kurangnya akses ke pasar untuk menjual hasil produksi dan kurangnya akses ke fasilitas modal.



## BAB 3

# AKSES TERHADAP PANGAN

Akses pangan berhubungan dengan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia secara fisik di suatu daerah, akan tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya akses fisik, akses ekonomi, dan/atau akses sosial. Aspek akses pangan pada FSVA diproksi dari tiga indikator, yaitu: (i) persentase rumah tangga tanpa akses listrik; (ii) persentase rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran; dan (iii) persentase penduduk di bawah garis kemiskinan.

### 3.1. Akses Terhadap Listrik

Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan. Semakin tinggi akses listrik suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar dalam peningkatan perekonomian daerah. Hal ini merupakan indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; Wiranthi *et al.* 2014; Sabarella 2005; dan Sofiati 2009). Sesuai dengan SUSENAS 2018 (BPS 2018), rumah tangga yang memiliki akses listrik sebesar 98,51% atau meningkat 0,97% dari tahun 2015 (97,54%). Namun demikian, kesenjangan antar daerah sangat tinggi, yaitu proporsi rumah tangga tanpa akses listrik yang terendah berada di DKI Jakarta (0%) dan tertinggi di Papua (34,10%) (Tabel 3.1).

**Tabel 3.1 Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik per Provinsi 2015-2018**

Provinsi	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik			
	2015	2016	2017	2018
Aceh	1,56	1,26	0,98	0,58
Sumatera Utara	3,19	3,16	2,59	2,45
Sumatera Barat	3,83	2,98	2,19	1,64
Riau	4,48	3,43	3,31	2,51
Jambi	5,14	3,48	2,04	2,65
Sumatera Selatan	2,55	2,36	1,70	1,26
Bengkulu	3,09	3,11	1,89	1,95
Lampung	1,56	1,50	0,94	0,46
Kepulauan Bangka Belitung	1,43	1,20	0,83	0,46
Kepulauan Riau	1,04	0,90	0,90	0,74
DKI Jakarta	0,06	0,10	0,00	0,00
Jawa Barat	0,17	0,15	0,09	0,06
Jawa Tengah	0,08	0,12	0,09	0,08
DI Yogyakarta	0,18	0,07	0,10	0,08
Jawa Timur	0,13	0,15	0,08	0,15
Banten	0,26	0,28	0,05	0,23

Provinsi	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik			
	2015	2016	2017	2018
Bali	0,33	0,27	0,15	0,18
Nusa Tenggara Barat	0,95	0,61	0,57	0,32
Nusa Tenggara Timur	26,09	27,86	22,64	17,66
Kalimantan Barat	11,71	10,83	8,49	6,80
Kalimantan Tengah	7,55	6,01	4,00	2,96
Kalimantan Selatan	1,50	1,26	0,84	0,54
Kalimantan Timur	1,27	1,33	0,86	0,47
Kalimantan Utara	4,02	2,00	2,38	1,29
Sulawesi Utara	0,87	0,64	0,70	0,53
Sulawesi Tengah	7,65	7,21	5,15	4,59
Sulawesi Selatan	2,67	2,42	1,47	1,10
Sulawesi Tenggara	6,55	5,89	3,45	1,57
Gorontalo	7,24	4,95	3,14	2,92
Sulawesi Barat	8,62	5,75	4,61	3,60
Maluku	11,93	11,86	8,65	7,37
Maluku Utara	11,64	10,01	5,77	4,76
Papua Barat	11,12	13,61	9,90	7,69
Papua	46,83	49,10	44,19	34,10
<b>Indonesia</b>	<b>2,46</b>	<b>2,38</b>	<b>1,86</b>	<b>1,49</b>

Sumber: SUSENAS 2015-2018, BPS

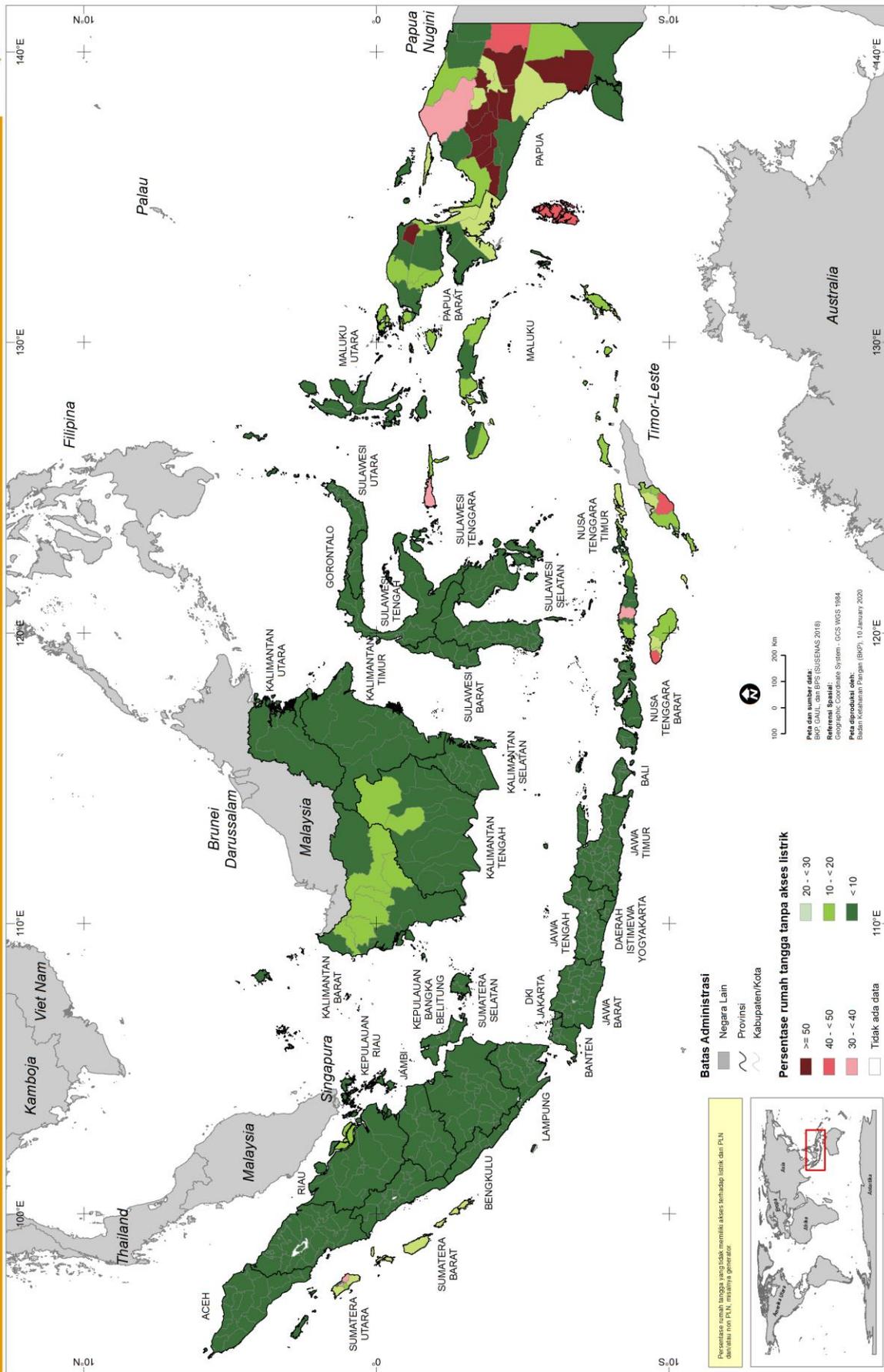
Meskipun rumah tangga yang memiliki akses listrik sudah mencapai 98,51%, namun persentase rumah tangga yang memakai listrik dengan daya 450 watt masih cukup tinggi, yaitu rata-rata 39,74%. Provinsi Jawa Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara merupakan tiga provinsi yang lebih dari 50% rumah tangganya memakai listrik dengan daya 450 watt. Sementara provinsi yang lebih dari 80% rumah tangganya memakai listrik dengan daya lebih dari 900 watt ke atas, yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan DKI Jakarta.

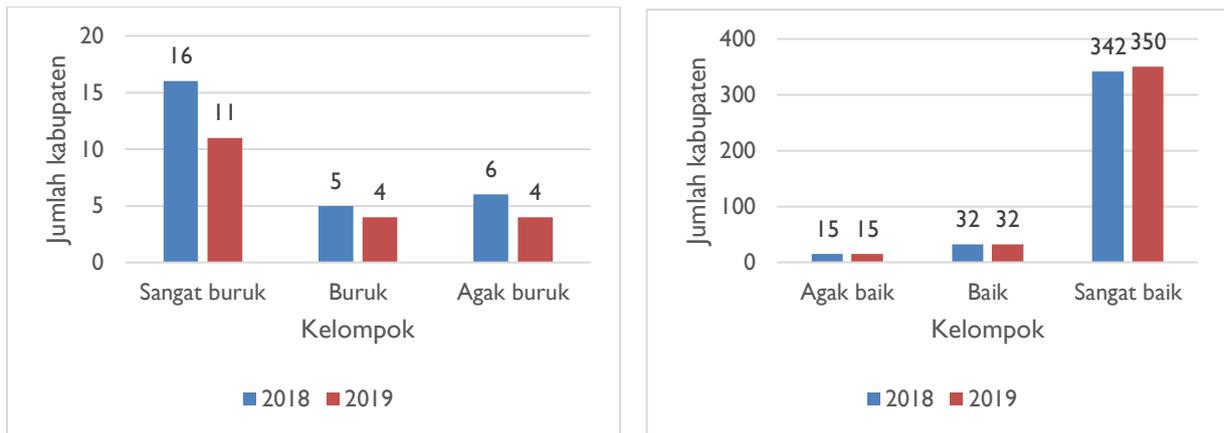
Pada tingkat kabupaten, 10 kabupaten di Papua dan satu kabupaten di Papua Barat memiliki akses listrik yang masih terbatas, yaitu lebih dari 50% rumah tangga tidak memiliki akses terhadap listrik. Adapun 11 kabupaten dengan persentase rumah tangga dengan akses terhadap listrik terendah, yaitu Kabupaten Puncak (100%), Memberamo Tengah (95,92%), Yahukimo (94,51%), Nduga (88,92%), Puncak Jaya (82,42%), Dogiyai (72,60%), Intan Jaya (69,64%), Pegunungan Arfak (68,70%), Paniai (55,96%), Lanny Jaya (55,89%), dan Mappi (51,05%).

Akses listrik rumah tangga mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2017. Jumlah kabupaten yang sangat buruk dalam akses listrik mengalami penurunan dari 16 kabupaten menjadi 11 kabupaten, begitu pula kabupaten buruk dan agak buruk dalam akses listrik masing-masing menurun sebanyak satu dan dua kabupaten. Kabupaten yang memiliki akses listrik sangat baik mengalami peningkatan dari 342 kabupaten menjadi 350 kabupaten atau meningkat sebesar 1,92%.



### Peta 3.1 Peta Rumah Tangga Tanpa Akses Terhadap Listrik





**Gambar 3.1. Sebaran Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik Kabupaten**

Sementara wilayah perkotaan, seluruhnya memiliki akses listrik yang sangat baik. Akses listrik rumah tangga di perkotaan mengalami peningkatan kualitas jika dibandingkan dengan kondisi 2017, dimana rata-rata rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik menurun dari 0,26% menjadi 0,17%.

### 3.2. Kemiskinan

Akses ekonomi terhadap makanan bergizi adalah penentu utama kerawanan pangan dan gizi di Indonesia. Walaupun pangan tersedia di pasar, tetapi akses pangan rumah tangga tergantung pada daya beli rumah tangga dan stabilitas harga pangan. Daya beli yang terbatas menyebabkan pilihan rumah tangga untuk mendapatkan pangan yang beragam semakin terbatas.

Secara global, seseorang yang hidup di bawah ambang batas US\$ 1,25 – *Purchasing Power Parity* (PPP) Bank Dunia per hari dikategorikan sebagai penduduk miskin. Di Indonesia, pemerintah menggunakan garis kemiskinan nasional (Rp 415.614 per orang/bulan untuk daerah perkotaan dan Rp 383.908 per orang/bulan untuk pedesaan pada Maret 2018) untuk tujuan perencanaan dan penentuan tujuan pembangunan.

Persentase penduduk miskin Indonesia mengalami tren yang menurun selama lima tahun terakhir. Pada bulan Maret 2015 persentase penduduk miskin sebesar 11,22%, berkurang menjadi 9,82% dari jumlah penduduk secara nasional pada Maret 2018. Namun demikian, jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 masih tinggi, yaitu sebesar 25,94 juta orang. Dari seluruh penduduk miskin di Indonesia, sekitar 15,8 juta jiwa (60,90%) tinggal di daerah pedesaan dan 10,14 juta jiwa (39,09%) tinggal di daerah perkotaan. Upaya-upaya yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengatasi penyebab masalah kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan.

Secara umum, persentase penduduk miskin di tingkat provinsi telah mengalami penurunan sejak tahun 2015. Provinsi dengan tingkat persentase penduduk miskin tertinggi adalah Papua, yaitu sebesar 27,74%, diikuti oleh Papua Barat 23,01% dan Nusa Tenggara Timur 21,35%. Penurunan kemiskinan di Indonesia juga diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan yang diukur menggunakan koefisien gini. Koefisien gini mengalami penurunan, yaitu dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018 yang menunjukkan menurunnya kesenjangan antara yang kaya dengan miskin.

**Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan per Provinsi 2015-2018**

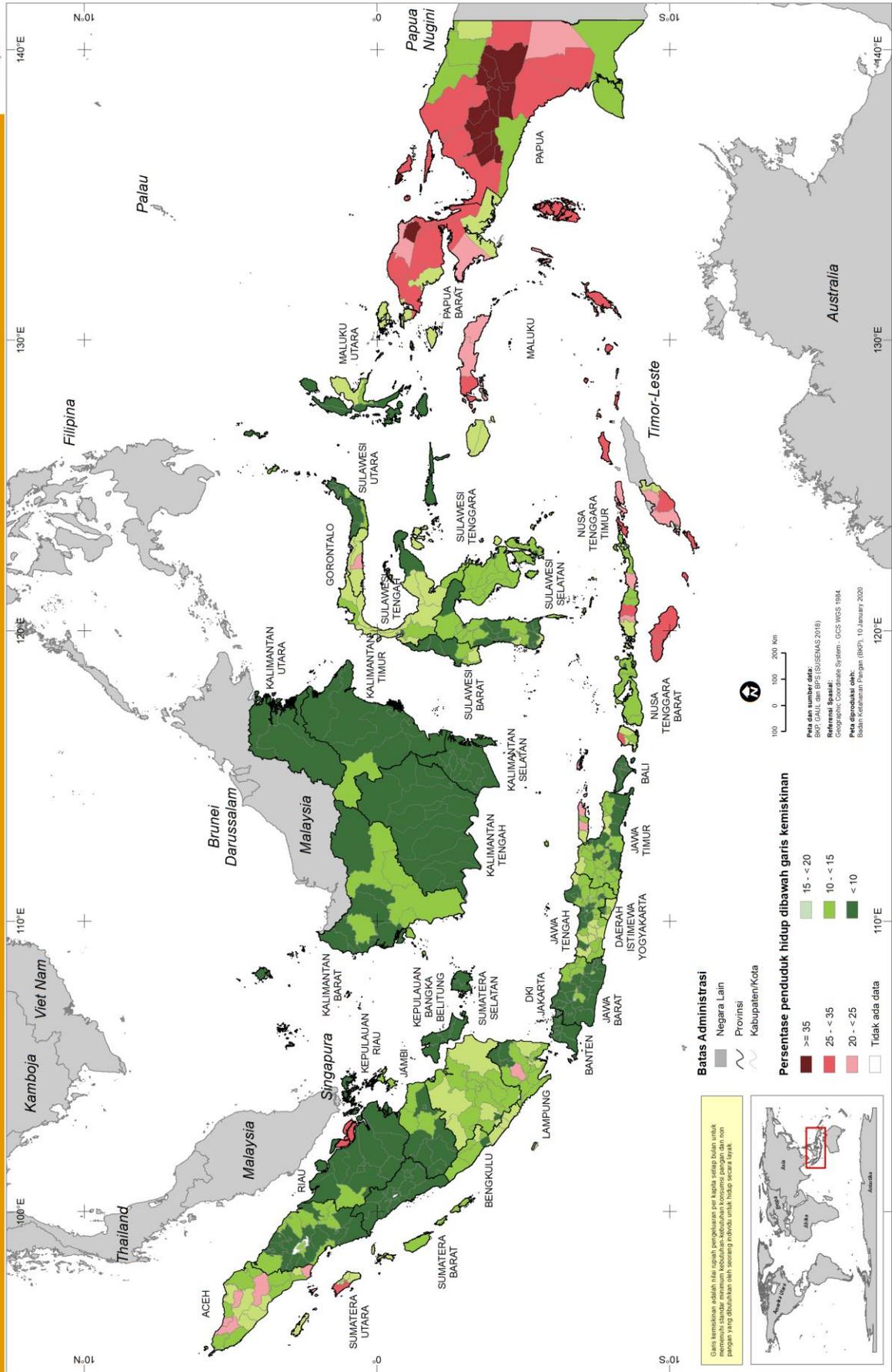
Provinsi	2015		2016		2017		2018	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
Aceh	851,59	17,08	848,44	16,73	872,61	16,89	839,49	15,97
Sumatera Utara	1.463,67	10,53	1.455,95	10,35	1.453,87	10,22	1.324,98	9,22
Sumatera Barat	379,61	7,31	371,56	7,09	364,51	6,87	357,13	6,65
Riau	531,39	8,42	515,4	7,98	514,62	7,78	500,44	7,39
Jambi	300,71	8,86	289,8	8,41	286,55	8,19	281,69	7,92
Sumatera Selatan	1.145,63	14,25	1.101,19	13,54	1.086,92	13,19	1.068,27	12,8
Bengkulu	334,07	17,88	328,61	17,32	316,98	16,45	301,81	15,43
Lampung	1.163,49	14,35	1.169,60	14,29	1.131,73	13,69	1.097,05	13,14
Bangka Belitung	74,09	5,4	72,76	5,22	74,09	5,20	76,26	5,25
Kep. Riau	122,4	6,24	120,41	5,98	125,37	6,06	131,68	6,2
DKI Jakarta	398,92	3,93	384,3	3,75	389,69	3,77	373,12	3,57
Jawa Barat	4.435,70	9,53	4.224,33	8,95	4.168,44	8,71	3.615,79	7,45
Jawa Tengah	4.577,04	13,58	4.506,89	13,27	4.450,72	13,01	3.897,20	11,32
DI Yogyakarta	550,23	14,91	494,94	13,34	488,53	13,02	460,1	12,13
Jawa Timur	4.789,12	12,34	4.703,30	12,05	4.617,01	11,77	4.332,59	10,98
Banten	702,4	5,9	658,11	5,42	675,04	5,45	661,36	5,24
Bali	196,71	4,74	178,18	4,25	180,13	4,25	171,76	4,01
NTB	823,89	17,1	804,44	16,48	793,78	16,07	737,46	14,75
NTT	1.159,84	22,61	1.149,92	22,19	1.150,79	21,85	1.142,17	21,35
Kalimantan Barat	383,7	8,03	381,35	7,87	387,43	7,88	387,08	7,77
Kalimantan Tengah	147,7	5,94	143,49	5,66	139,16	5,37	136,93	5,17
Kalimantan Selatan	198,44	4,99	195,7	4,85	193,92	4,73	189,03	4,54
Kalimantan Timur	212,89	6,23	212,92	6,11	220,17	6,19	218,9	6,03
Kalimantan Utara	39,69	6,24	41,12	6,23	49,47	7,22	50,35	7,09
Sulawesi Utara	208,54	8,65	202,82	8,34	198,88	8,10	193,31	7,8
Sulawesi Tengah	421,62	14,66	420,52	14,45	417,87	14,14	420,21	14,01
Sulawesi Selatan	797,72	9,39	807,03	9,4	813,07	9,38	792,63	9,06
Sulawesi Tenggara	321,88	12,9	326,86	12,88	331,71	12,81	307,1	11,63
Gorontalo	206,84	18,32	203,19	17,72	205,37	17,65	198,51	16,81
Sulawesi Barat	160,48	12,4	152,73	11,74	149,76	11,3	151,78	11,25
Maluku	328,41	19,51	327,72	19,18	320,51	18,45	320,08	18,12
Maluku Utara	79,9	6,84	74,68	6,33	76,47	6,35	81,46	6,64
Papua Barat	225,36	25,82	225,8	25,43	228,38	25,1	214,47	23,01
Papua	859,15	28,17	911,33	28,54	897,69	27,62	917,63	27,74
<b>Indonesia</b>	<b>28.592,80</b>	<b>11,22</b>	<b>28.005,40</b>	<b>10,86</b>	<b>27.771,20</b>	<b>10,64</b>	<b>25.949,80</b>	<b>9,82</b>

Sumber: SUSENAS 2015-2018, BPS

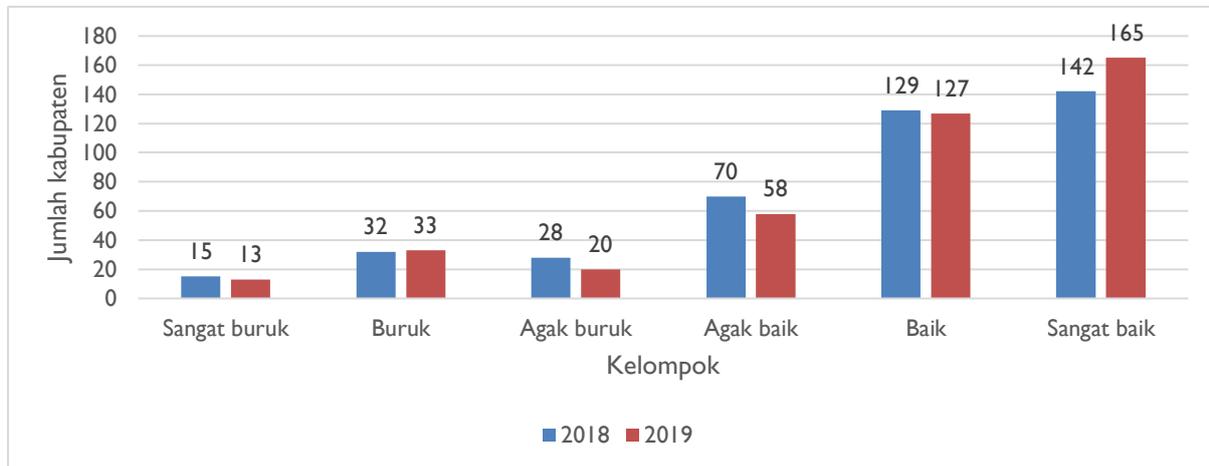
Pada tingkat kabupaten, 12 kabupaten di Papua dan satu kabupaten di Papua Barat memiliki tingkat kemiskinan di atas 35% atau masuk kelompok sangat buruk. Adapun 13 kabupaten dengan persentase rumah tangga dengan persentase penduduk miskin tertinggi, yaitu Deiyai (43,49%), Intan Jaya (42,71%), Lanny Jaya (40,06%), Yahukimo (39,25%), Supiori (39,22%), Jayawijaya (38,66%), Puncak (38,15%), Nduga (38,13%), Paniai (37,35%), Membramo Tengah (37,02%), Puncak Jaya (36,27%), Pegunungan Arfak (35,72%), dan Yalimo (35,45%). Jika dibandingkan dengan tahun 2017, terjadi penurunan jumlah kabupaten yang masuk ke dalam kelompok buruk sebanyak dua kabupaten. Kelompok yang masuk kategori agak buruk menurun dari 28 kabupaten menjadi 20 kabupaten atau menurun sebesar 1,92%.



## Peta 3.2 Penduduk Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan

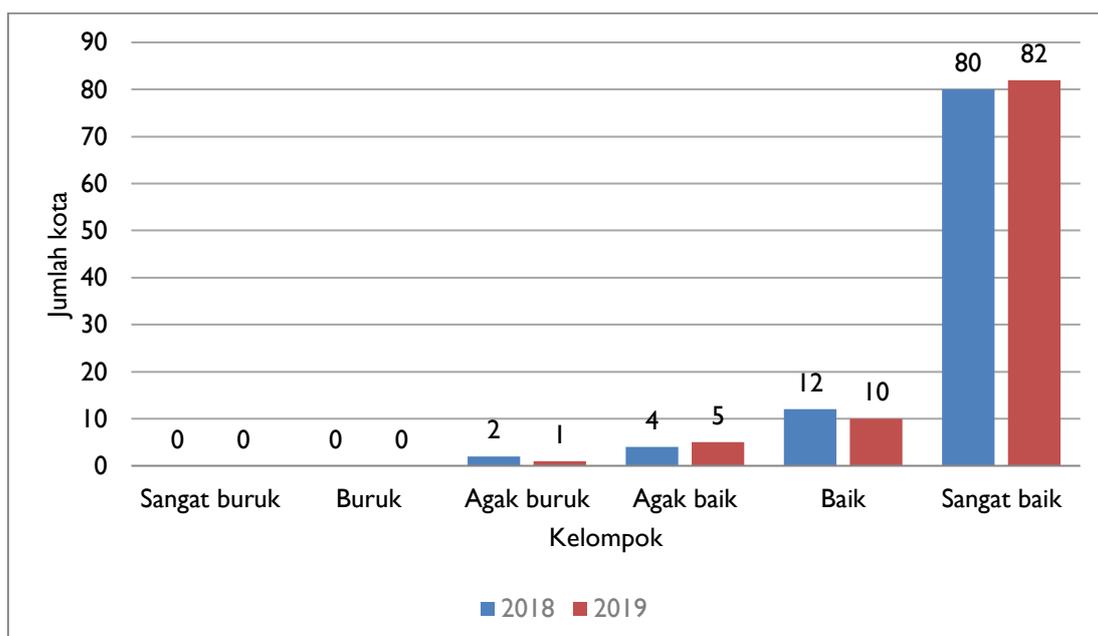


Sebaran penduduk miskin di kabupaten dikelompokkan dalam enam kelompok, yaitu sangat buruk, buruk, agak buruk, agak baik, baik, dan sangat baik. Jumlah kabupaten dengan tingkat kemiskinan kurang dari 15% secara umum mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi pada kabupaten yang masuk kategori sangat baik atau dengan tingkat kemiskinan kurang dari 10%, meningkat sebanyak 23 kabupaten atau 5,5%.



**Gambar 3.2. Sebaran Kelompok Penduduk Miskin Kabupaten**

Wilayah perkotaan terjadi peningkatan kesejahteraan penduduknya. Tidak ada kota yang masuk dalam kategori sangat buruk dan buruk. Jumlah kota yang masuk kategori agak buruk menurun sebanyak satu kabupaten. Kota yang masuk kategori agak baik meningkat satu kota, dan kota yang masuk kategori sangat baik meningkat dua kota. Di samping jumlah, terjadi penurunan rata-rata persentase penduduk miskin pada wilayah perkotaan yang masuk kategori agak baik, baik, dan sangat baik.



**Gambar 3.3. Sebaran Kelompok Penduduk Miskin Kota**

### 3.3. Pangsa Pengeluaran Pangan

Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori Engel menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan mengalami penurunan. Shan (1994) menyatakan bahwa pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk pendapatan permanen, selain itu juga merupakan indikator yang penting untuk melihat malnutrisi kronis dalam jangka panjang. Menurut Suhardjo (1996) dan Azwar (2004), pangsa pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan, makin besar pangsa pengeluaran untuk pangan berarti ketahanan pangan semakin berkurang. Semakin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil, demikian pula sebaliknya (Deaton dan Muellbauer 1980). Jika distribusi pengeluaran untuk pangan lebih besar dari 65% dari total pengeluaran maka distribusi pengeluaran rumah tangga tersebut dikategorikan buruk (BKP dan WFP 2010; WFP 2009).

Persentase jumlah rumah tangga di Indonesia yang memiliki distribusi pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran lebih dari 65% berdasarkan data Susenas Maret 2018 adalah sebesar 29,69%. Tiga provinsi memiliki persentase rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan lebih dari 65% yang masuk kategori buruk (40 - <50%), yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Aceh. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki persentase rumah tangga dengan pangsa pengeluaran lebih dari 65% terbesar, yaitu 49,63%, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur 46,93%, dan Aceh 40,89%. Tingginya persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan di atas 65% mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat di tiga provinsi tersebut masih tergolong rendah. Perlu upaya-upaya peningkatan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja dan usaha produktif sehingga terjadi peningkatan pendapatan yang tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan tetapi juga non pangan.

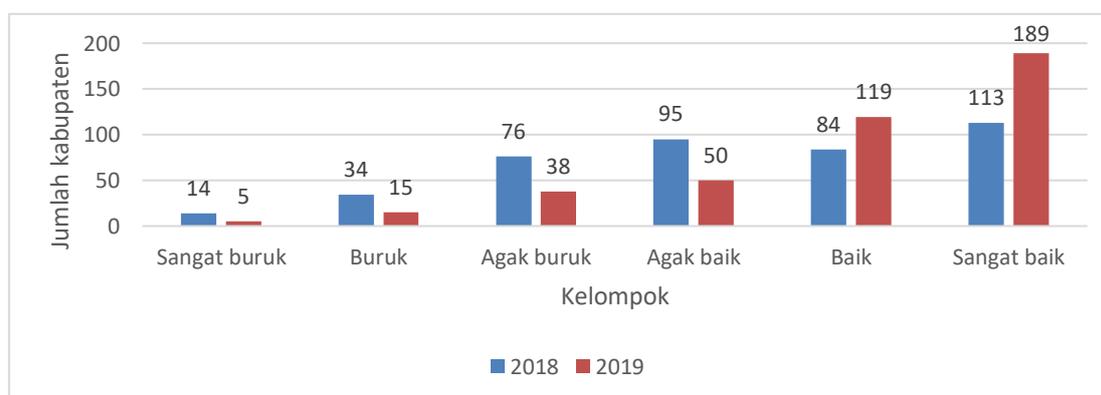
**Tabel 3.3 Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan Lebih dari 65% 2017 dan 2018**

Provinsi	2017	2018
Aceh	48,26	40,89
Sumatera Utara	43,39	35,47
Sumatera Barat	40,45	32,05
Riau	30,96	22,95
Jambi	41,00	30,81
Sumatera Selatan	36,58	25,91
Bengkulu	35,83	28,42
Lampung	35,46	29,11
Kepulauan Bangka Belitung	22,33	15,40
Kepulauan Riau	11,88	10,97
DKI Jakarta	15,06	15,32
Jawa Barat	35,61	34,85
Jawa Tengah	31,31	28,70
DI Yogyakarta	25,96	18,92
Jawa Timur	38,12	33,94

Provinsi	2017	2018
Banten	25,44	26,74
Bali	12,85	15,32
Nusa Tenggara Barat	39,28	49,63
Nusa Tenggara Timur	55,76	46,93
Kalimantan Barat	36,69	27,27
Kalimantan Tengah	35,01	23,70
Kalimantan Selatan	32,22	25,62
Kalimantan Timur	13,01	9,82
Kalimantan Utara	18,90	11,09
Sulawesi Utara	38,14	24,91
Sulawesi Tengah	31,98	24,68
Sulawesi Selatan	26,44	19,99
Sulawesi Tenggara	17,81	15,06
Gorontalo	22,88	14,72
Sulawesi Barat	38,29	32,38
Maluku	29,60	19,36
Maluku Utara	24,07	17,40
Papua Barat	20,57	25,61
Papua	44,08	34,76
<b>Total</b>	<b>33,55</b>	<b>29,69</b>

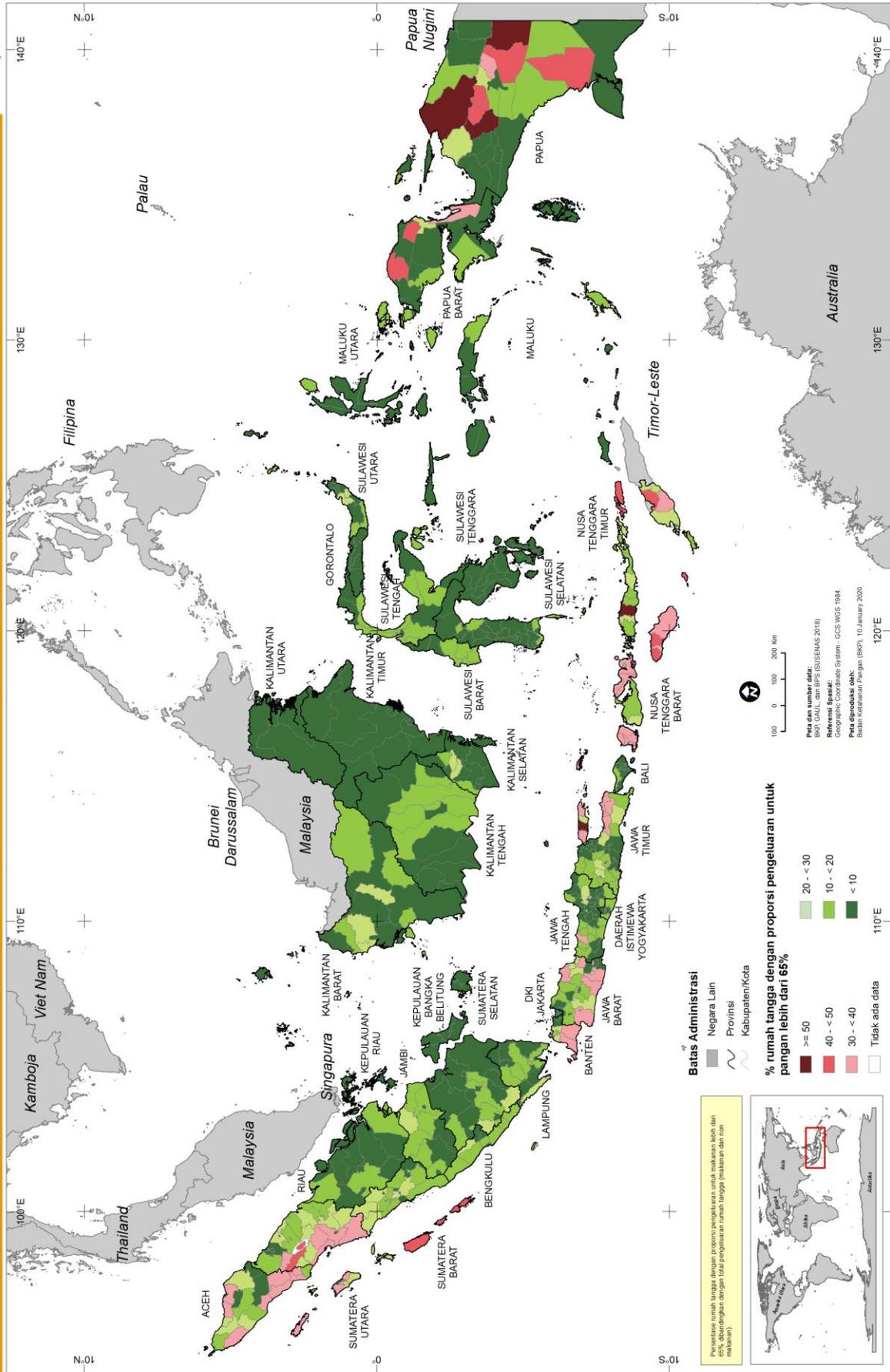
Sumber: BPS, 2018

Pada tingkat kabupaten, sebanyak lima kabupaten yang masuk kategori sangat buruk. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan kabupaten terbanyak dengan sebaran rumah tangga lebih dari 50%, yaitu Kabupaten Puncak, Membaro Raya, dan Pegunungan Bintang, Dua kabupaten lainnya adalah Manggarai Timur dan Sampang. Sementara itu, kabupaten yang dikategorikan sangat baik atau memiliki rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan di atas 65% kurang 10% tersebar di 189 kabupaten, meningkat sebanyak 76 kabupaten atau 18,26% dibandingkan tahun 2017. Kabupaten yang masuk kategori baik meningkat dari 84 kabupaten tahun 2017 menjadi 119 kabupaten tahun 2018.

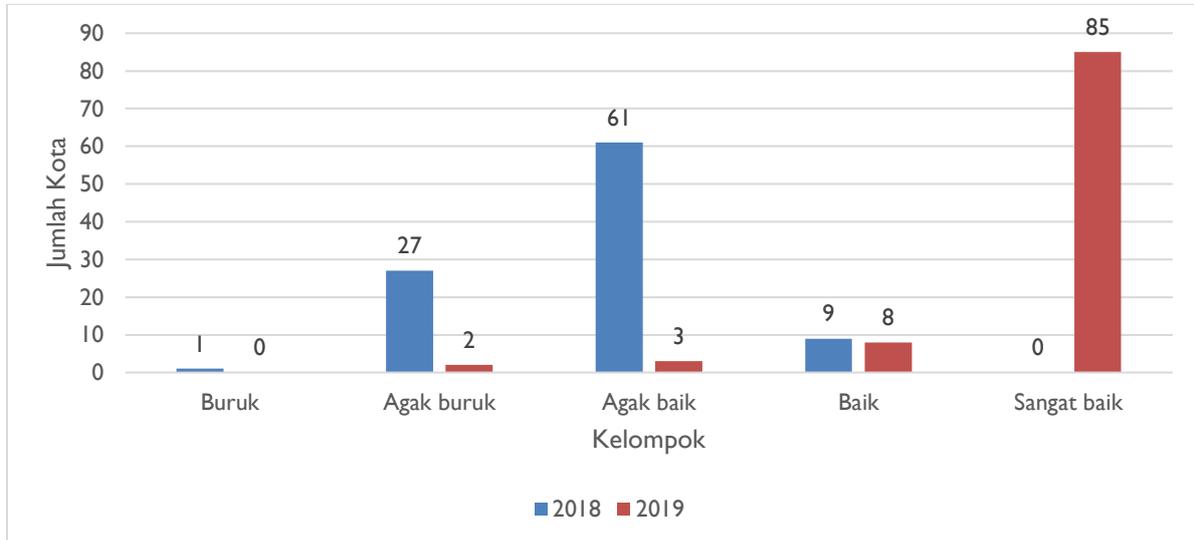


**Gambar 3.4 Sebaran Kelompok Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan Lebih dari 65% Kabupaten**

### Peta 3.3 Rumah Tangga dengan Proporsi Pengeluaran Untuk Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran



Sebaran kota yang masuk kategori sangat baik dari sisi pengeluaran pangan meningkat secara signifikan. Demikian pula kota yang masuk kategori buruk dan agak buruk mengalami tren yang menurun jika dibandingkan antara tahun 2018.



**Gambar 3.5. Sebaran Kelompok Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan Lebih dari 65% Kota**



## BAB 4

# PEMANFAATAN PANGAN

Pemanfaatan pangan didefinisikan sebagai kemampuan tubuh manusia untuk mencerna dan mengatur metabolisme makanan. Perawatan kesehatan dan praktek pemberian makanan yang baik, penyiapan makanan, keragaman diet/pangan, dan pola distribusi makanan di dalam rumah tangga, akan memberikan asupan energi dan gizi yang cukup. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemanfaatan pangan ideal maka prasyarat seperti asupan pangan yang bergizi, air bersih, sanitasi serta layanan kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Aspek pemanfaatan pangan pada FSVA di proksi dari tiga indikator, yaitu: (i) tenaga kesehatan; (ii) akses air bersih; dan (iii) lama sekolah perempuan.

### 4.1 Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis) yang ideal di suatu wilayah akan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Kesehatan masyarakat yang baik akan menunjang fungsi pemanfaatan pangan yang baik. Untuk dapat menjalankan fungsi pemanfaatan pangan yang baik, tubuh harus memiliki status kesehatan yang baik. Apabila kesehatan terganggu, sistem pencernaan dan metabolisme makanan tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan kualitas sektor kesehatan harus terus diupayakan untuk meningkatkan status kesehatan setiap individu.

**Tabel 4.1 Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk 2017-2018**

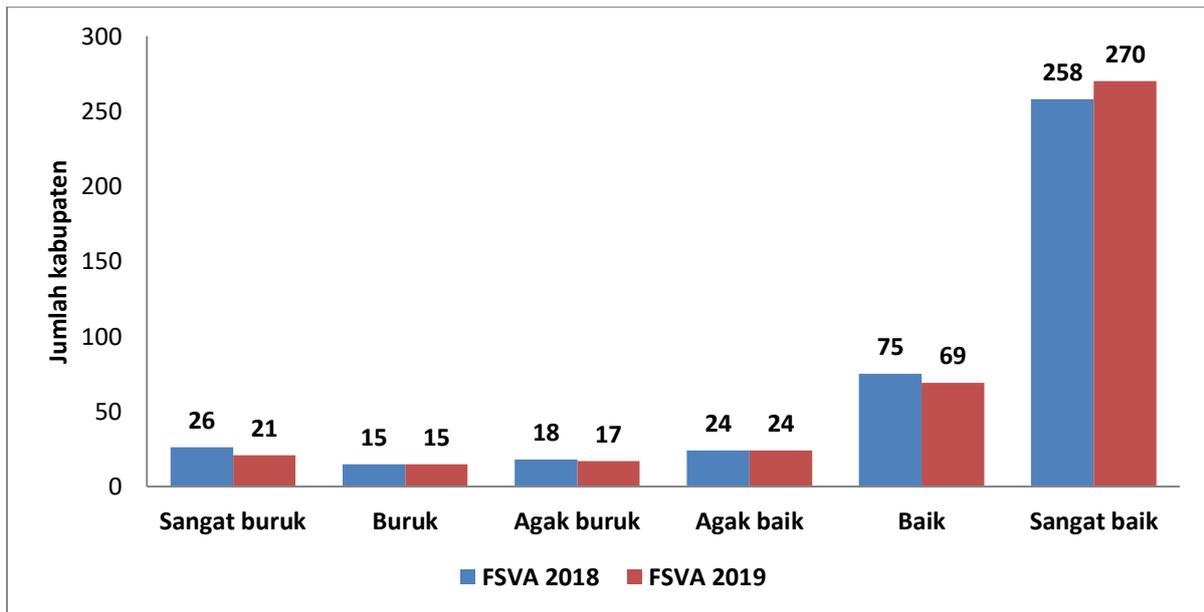
No	Provinsi	2017	2018
1	Aceh	2,06	2,07
2	Sumatera Utara	1,8	1,76
3	Sumatera Barat	2,48	2,48
4	Riau	4,78	4,53
5	Jambi	3,8	3,58
6	Sumatera Selatan	3,38	3,12
7	Bengkulu	2,25	2,1
8	Lampung	1,86	1,25
9	Bangka Belitung	3,21	0,37
10	Kepulauan Riau	1,36	1,23
11	DKI Jakarta	0,01	0,01
12	Jawa Barat	0,46	0,47
13	Jawa Tengah	0,45	0,38

No	Provinsi	2017	2018
14	DI Yogyakarta	0,22	0,18
15	Jawa Timur	0,63	0,49
16	Banten	0,49	0,5
17	Bali	0,35	0,31
18	NTB	1,55	1,05
19	NTT	3,69	3
20	Kalimantan Barat	10,87	9,59
21	Kalimantan Tengah	15,78	9
22	Kalimantan Selatan	2,5	2,6
23	Kalimantan Timur	9,21	8,87
24	Kalimantan Utara	22,01	10
25	Sulawesi Utara	1,43	1,37
26	Sulawesi Tengah	4,89	4,63
27	Sulawesi Selatan	2,56	1,41
28	Sulawesi Tenggara	3,31	3,33
29	Gorontalo	2,76	8,04
30	Sulawesi Barat	3,96	4,25
31	Maluku	7,15	8,12
32	Maluku Utara	6,83	6,94
33	Papua Barat	29,41	10
34	Papua	27,02	10
<b>INDONESIA</b>			<b>2,58</b>

Sumber: Kemenkes, 2018

Pada tahun 2018 rasio antara jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 dari 2,84 menjadi 2,58, artinya rata-rata 1 orang tenaga kesehatan di Indonesia bekerja melayani wilayah seluas 2,84 km<sup>2</sup> menjadi 2,58 km<sup>2</sup>. Rasio terendah pada tahun 2018 berada di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki nilai rasio sebesar 0,012, artinya masing-masing tenaga kesehatannya melayani wilayah seluas 0,012 km<sup>2</sup> dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 15.663 jiwa.

Pada tingkat kabupaten, jumlah kabupaten pada kelompok buruk secara umum mengalami penurunan dari 59 kabupaten menjadi 53 kabupaten. Sedangkan jumlah kabupaten pada kelompok baik secara umum mengalami peningkatan dari 357 kabupaten menjadi 363 kabupaten. Adapun kabupaten dengan rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan tertinggi yaitu: Sarmi (100), Mamberamo Raya (100), Teluk Wondama (86,68), Paniai (83,78), dan Mahakam Ulu (81,03).



**Gambar 4.1 Sebaran Kelompok Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten**

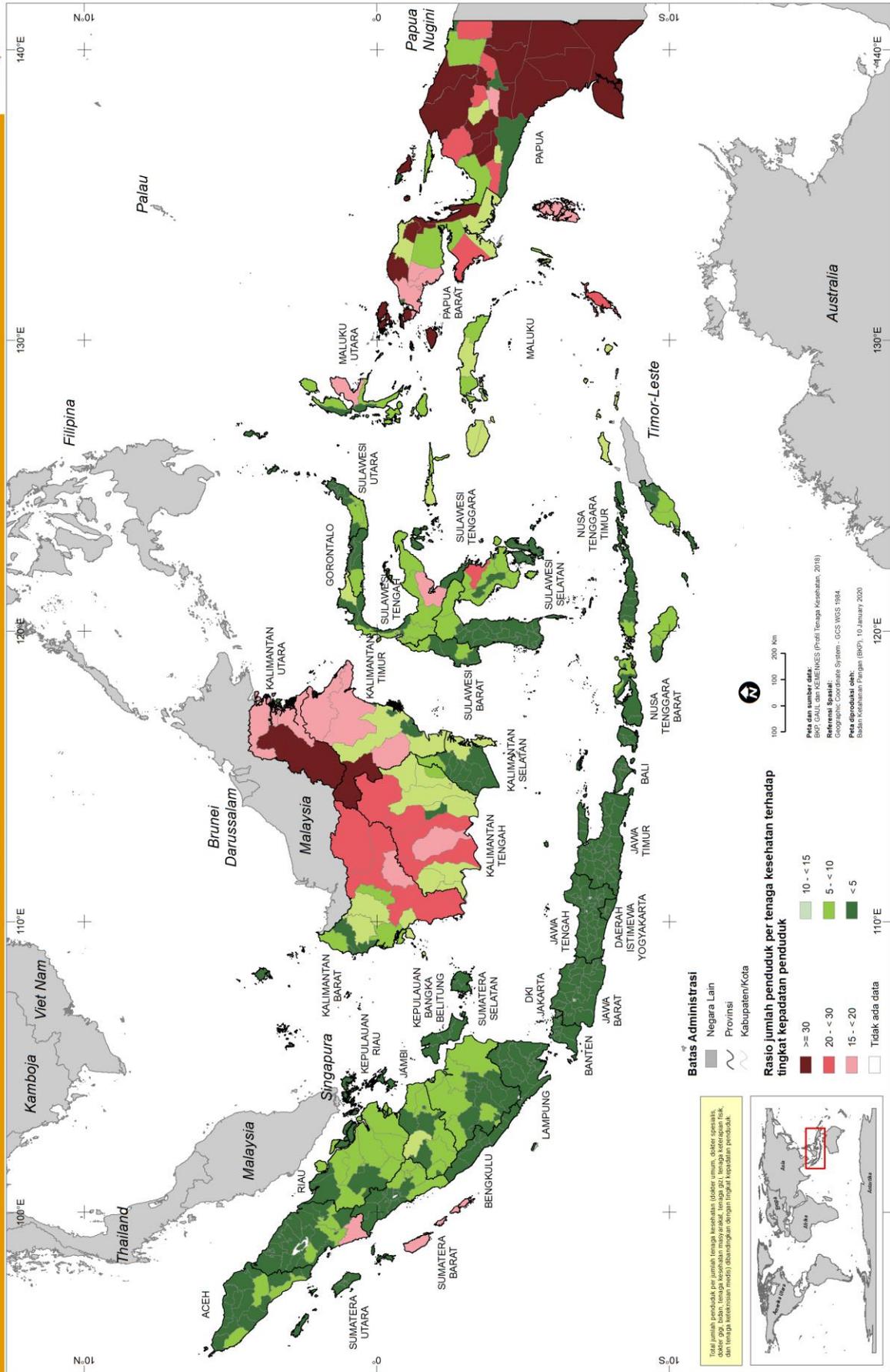
Sementara wilayah perkotaan, semua wilayah berada dalam kelompok sangat baik. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk di perkotaan mengalami peningkatan kualitas jika dibandingkan dengan kondisi 2017, dimana rasionya menurun dari 0,21 menjadi 0,20.

**Tabel 4.2 Sebaran Kelompok Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk Kota**

Kelompok	FSVA 2018		FSVA 2019	
	Jumlah kota	Persentase	Jumlah kota	Persentase
Sangat buruk	0	0	0	0
Buruk	0	0	0	0
Agak buruk	0	0	0	0
Agak baik	0	0	0	0
Baik	0	0	0	0
Sangat baik	98	100	98	100



# Peta 4.1 Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk



## 4.2. Akses ke Air Bersih

Akses terhadap air bersih memegang peranan yang penting dalam pencapaian ketahanan pangan. Air yang tidak bersih dapat menimbulkan penyakit dan menurunkan kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi dan pada akhirnya mempengaruhi status gizi seseorang. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya pada daerah dengan akses terhadap air bersih rendah ditemukan kejadian malnutrisi yang tinggi (DKP dan WFP 2009; Sofiati 2009). Akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting untuk mengurangi masalah kesehatan khususnya diare, sehingga dapat memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Pemprov NTT *et al.* 2015; Kavosi *et al.* 2014; Khan dan Gill 2009; Burger dan Esrey 1995; serta Thomas dan Strauss 1992).

Pada tahun 2018, sebanyak 27,01% rumah tangga tidak memiliki akses yang memadai terhadap air bersih, yaitu air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 meter. Provinsi dengan akses ke air bersih yang buruk adalah Kalimantan Barat, Papua, Bengkulu, dan Lampung dimana lebih dari 40% rumah tangga di wilayah tersebut tidak dapat mengakses air bersih secara memadai. Sedangkan provinsi dengan tingkat akses masyarakat ke air bersih yang paling baik adalah DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau.

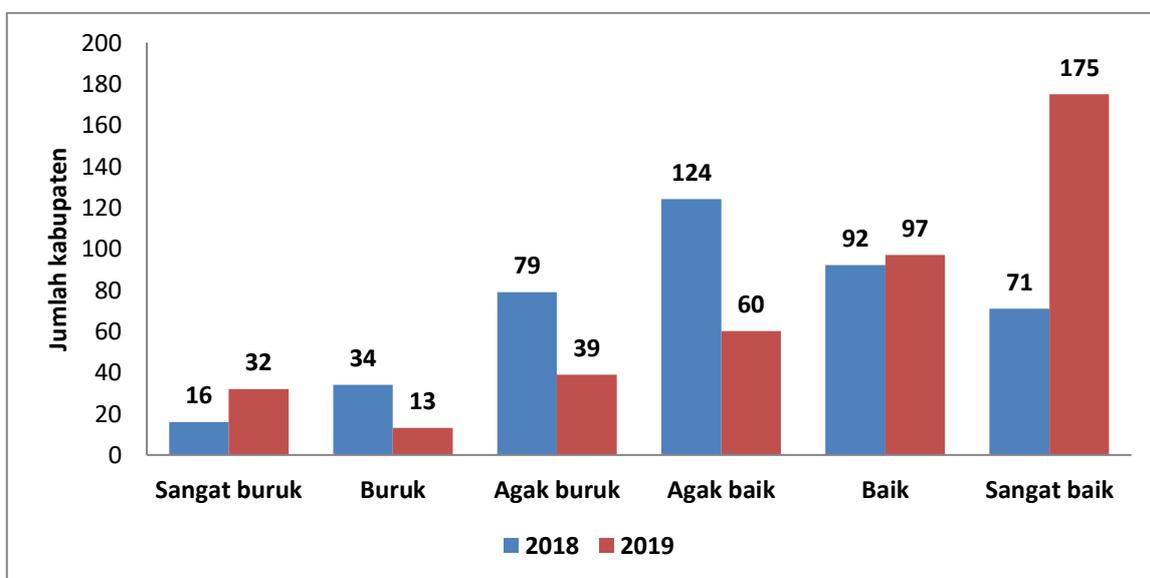
**Tabel 4.3 Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih 2017 – 2018**

No	Provinsi	2017	2018
1	Aceh	34,35	32,47
2	Sumatera Utara	29,66	28,38
3	Sumatera Barat	29,21	27,40
4	Riau	33,87	31,57
5	Jambi	39	39,45
6	Sumatera Selatan	37,29	37,16
7	Bengkulu	53,35	48,28
8	Lampung	44,58	41,94
9	Kepulauan Bangka Belitung	19,28	18,83
10	Kepulauan Riau	10,18	10,32
11	DKI Jakarta	7,12	6,59
12	Jawa Barat	28,8	27,04
13	Jawa Tengah	24,47	22,42
14	DI Yogyakarta	26,68	23,37
15	Jawa Timur	25,4	25,39
16	Banten	30,13	25,10
17	Bali	13,79	12,36
18	Nusa Tenggara Barat	29,1	27,44
19	Nusa Tenggara Timur	39,89	32,67
20	Kalimantan Barat	68,51	65,06
21	Kalimantan Tengah	34,81	33,16
22	Kalimantan Selatan	31,28	29,25

No	Provinsi	2017	2018
23	Kalimantan Timur	8,95	9,12
24	Kalimantan Utara	25,25	21,70
25	Sulawesi Utara	24,68	21,28
26	Sulawesi Tengah	32,75	27,81
27	Sulawesi Selatan	24,17	22,98
28	Sulawesi Tenggara	23,03	20,71
29	Gorontalo	24,34	20,80
30	Sulawesi Barat	43,58	38,92
31	Maluku	35,13	27,81
32	Maluku Utara	37,09	35,27
33	Papua Barat	35,55	32,69
34	Papua	59,72	61,67
<b>Indonesia</b>		<b>28,73</b>	<b>27,01</b>

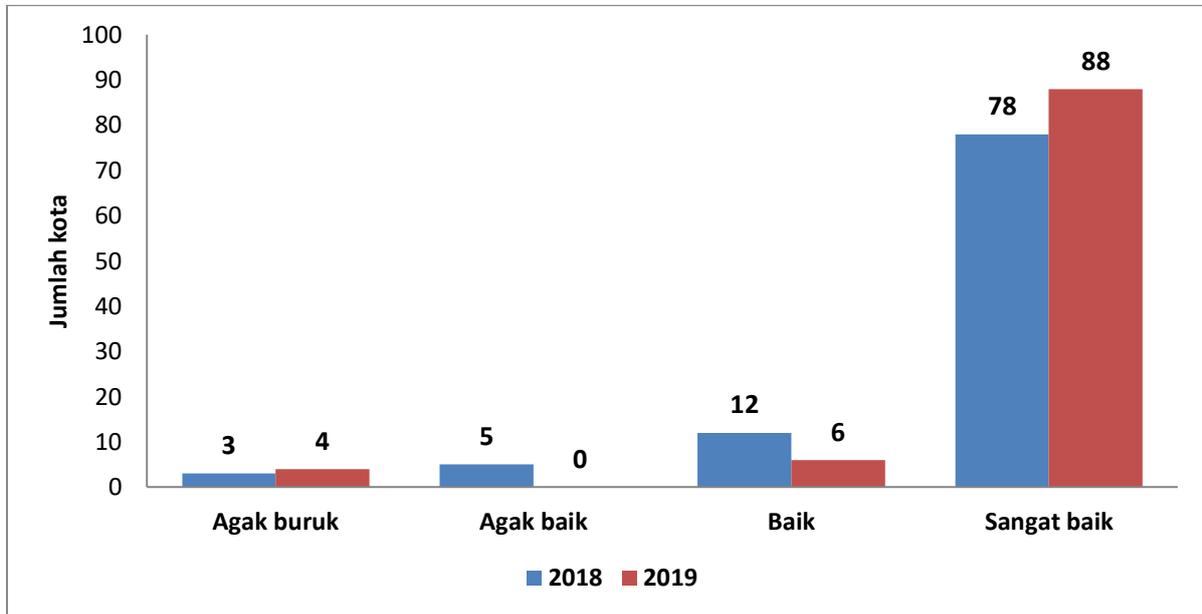
Sumber: Susenas 2017 dan 2018, BPS

Pada tingkat kabupaten, jumlah kabupaten pada kelompok buruk secara umum mengalami penurunan dari 129 kabupaten menjadi 84 kabupaten. Sedangkan jumlah kabupaten pada kelompok baik secara umum mengalami peningkatan dari 287 kabupaten menjadi 332 kabupaten. Peningkatan yang signifikan terjadi pada kelompok sangat baik, dari 71 kabupaten meningkat menjadi 175 kabupaten. Namun demikian, terdapat wilayah di Provinsi Kalimantan Barat dan Papua yang akses terhadap air bersihnya mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena terjadinya musim kemarau yang panjang. Adapun kabupaten dengan persentase rumah tangga tanpa akses terhadap air bersih tertinggi, yaitu Mamberamo Tengah, Puncak, Nduga, Deiyai, dan Lanny Jaya.



**Gambar 4.2** Sebaran Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih Kabupaten

Sementara wilayah perkotaan, terjadi peningkatan jumlah kabupaten yang termasuk dalam kelompok sangat baik, dari 78 kabupaten di tahun 2018 menjadi 88 kabupaten di tahun 2019. Sementara itu terdapat satu kota yang menurun kelompoknya, dari kelompok agak baik menjadi kelompok agak buruk, yaitu Kota Subulussalam. Kota dengan persentase rumah tangga dengan akses terhadap air bersih terendah, yaitu Pontianak, Subulussalam, Singkawang, dan Pagar Alam.



**Gambar 4.3 Sebaran Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih Kota**



### 4.3. Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun

Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak tentang gizi berkorelasi kuat dengan status gizi anaknya (Abuya et al., 2012; Adnan and Muniandy, 2012; Miller and Rodgers, 2009). Glewwe (2009) mengidentifikasi 3 kemungkinan mekanisme hubungan antara tingkat pendidikan ibu dan status gizi serta kesehatan, yaitu: (1) pendidikan formal secara langsung akan mentransfer pengetahuan terkait kesehatan kepada calon ibu; (2) kemampuan membaca dan berhitung yang diperoleh perempuan di sekolah akan meningkatkan kemampuan mereka mengenali penyakit dan mencari pengobatan yang tepat untuk anak-anak mereka. Selain itu kemampuan membaca yang baik akan memudahkan mereka mengikuti instruksi medis untuk penanganan kesehatan dan menerapkannya (Abuya et al., 2012); dan (3) lamanya sekolah perempuan meningkatkan penerimaan mereka terhadap pengobatan modern. Perempuan yang bersekolah juga memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, menikah dengan pria yang memiliki pendidikan dan gaji tinggi maupun tinggal di lingkungan yang lebih baik sehingga mempengaruhi status kesehatan anak-anak mereka (Abuya et al., 2012; Frost et al., 2005; Desai and Alva, 1998; Cleland and Van Ginneken, 1988).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu di Indonesia adalah dengan melihat durasi pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas. Tabel 4.4 menunjukkan rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun di setiap provinsi. Semakin lama durasi sekolah maka tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu diasumsikan semakin baik. Rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 10,75 tahun diikuti oleh Kepulauan Riau (9,88 tahun), Maluku (9,71 tahun) dan Sulawesi Utara (9,58 tahun).

Rata-rata lama sekolah perempuan terpendek terdapat di Provinsi Papua, yaitu 5,97 tahun, diikuti Kalimantan Barat (7,31 tahun) dan Nusa Tenggara Barat (7,17 tahun). Secara umum, terdapat 11 provinsi yang rata-rata lama sekolah perempuan usia di atas 15 tahun dibawah rata-rata nasional sebesar 8,26 tahun. Rata-rata nasional sebesar 8,26 tahun masih belum mencapai target pemerintah yang mencanangkan wajib belajar selama 12 tahun yang terdiri dari pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun dan pendidikan sekolah menengah selama 6 tahun.

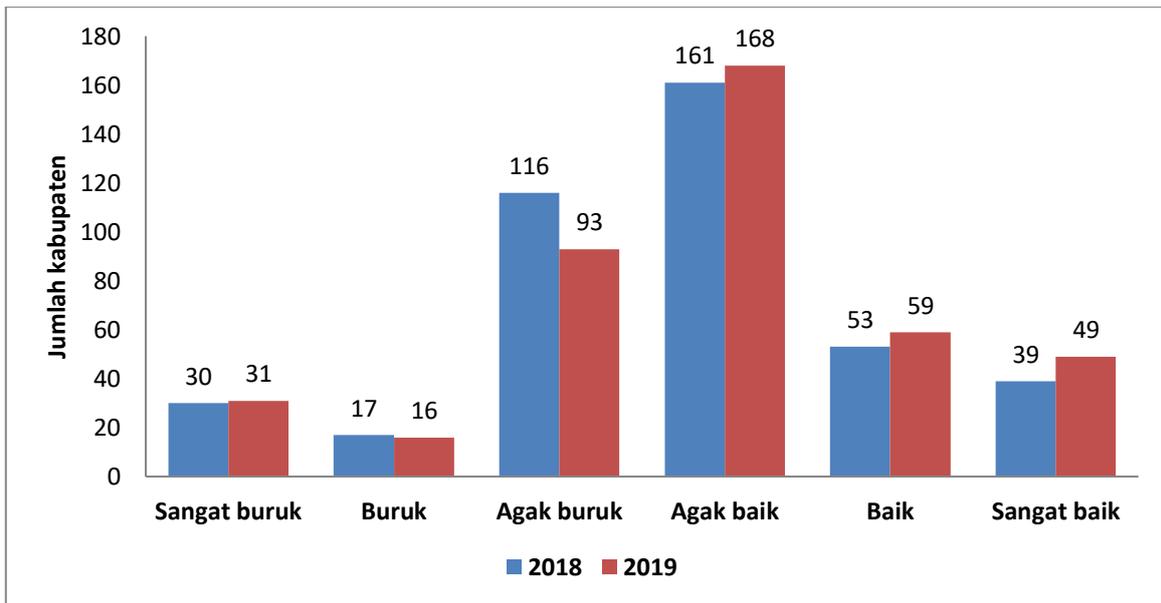
**Tabel 4.4 Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun 2017-2018**

No	Provinsi	2017	2018
1	Aceh	9,2	9,22
2	Sumatera Utara	9,36	9,45
3	Sumatera Barat	9,05	9,14
4	Riau	8,91	8,97
5	Jambi	8,29	8,41
6	Sumatera Selatan	8,22	8,30
7	Bengkulu	8,76	8,76
8	Lampung	8	8,09
9	Kepulauan Bangka Belitung	7,92	8,10
10	Kepulauan Riau	9,88	9,88

No	Provinsi	2017	2018
11	DKI Jakarta	10,64	10,75
12	Jawa Barat	8,15	8,29
13	Jawa Tengah	7,38	7,45
14	DI Yogyakarta	9,27	9,36
15	Jawa Timur	7,41	7,49
16	Banten	8,47	8,53
17	Bali	8,27	8,33
18	Nusa Tenggara Barat	7,13	7,17
19	Nusa Tenggara Timur	7,45	7,52
20	Kalimantan Barat	7,2	7,31
21	Kalimantan Tengah	8,3	8,37
22	Kalimantan Selatan	8,03	8,11
23	Kalimantan Timur	9,28	9,32
24	Kalimantan Utara	8,8	8,90
25	Sulawesi Utara	9,49	9,58
26	Sulawesi Tengah	8,46	8,60
27	Sulawesi Selatan	8,22	8,27
28	Sulawesi Tenggara	8,62	8,74
29	Gorontalo	8,09	8,17
30	Sulawesi Barat	7,71	7,83
31	Maluku	9,61	9,71
32	Maluku Utara	8,68	8,82
33	Papua Barat	9,37	9,37
34	Papua	5,86	5,97
<b>INDONESIA</b>		<b>8,17</b>	<b>8,26</b>

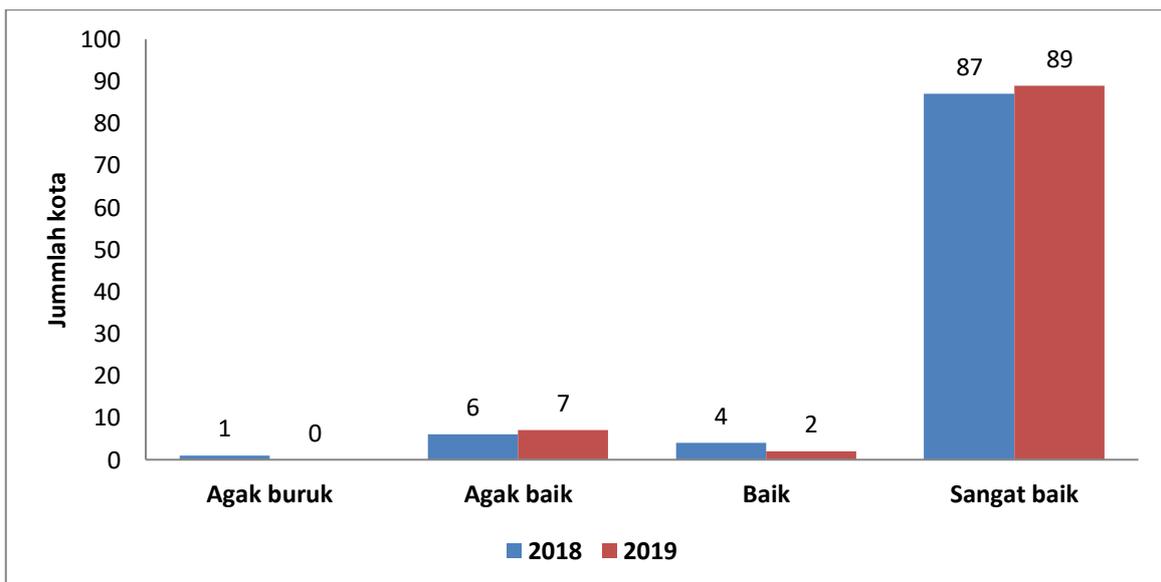
Sumber: Susenas 2018, BPS

Pada tingkat kabupaten, jumlah kabupaten pada kelompok buruk (sangat buruk, buruk, dan agak buruk) secara umum mengalami penurunan dari 163 kabupaten menjadi 140 kabupaten. Sedangkan jumlah kabupaten pada kelompok baik (agak baik, baik, sangat baik) secara umum mengalami peningkatan dari 253 kabupaten menjadi 276 kabupaten. Kabupaten dengan rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun terendah, yaitu Puncak, Intan Jaya, Deiyai, Mamberamo, dan Dogiyai yang kelimanya berada di Provinsi Papua.



**Gambar 4.4 Sebaran Kelompok Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun Kabupaten**

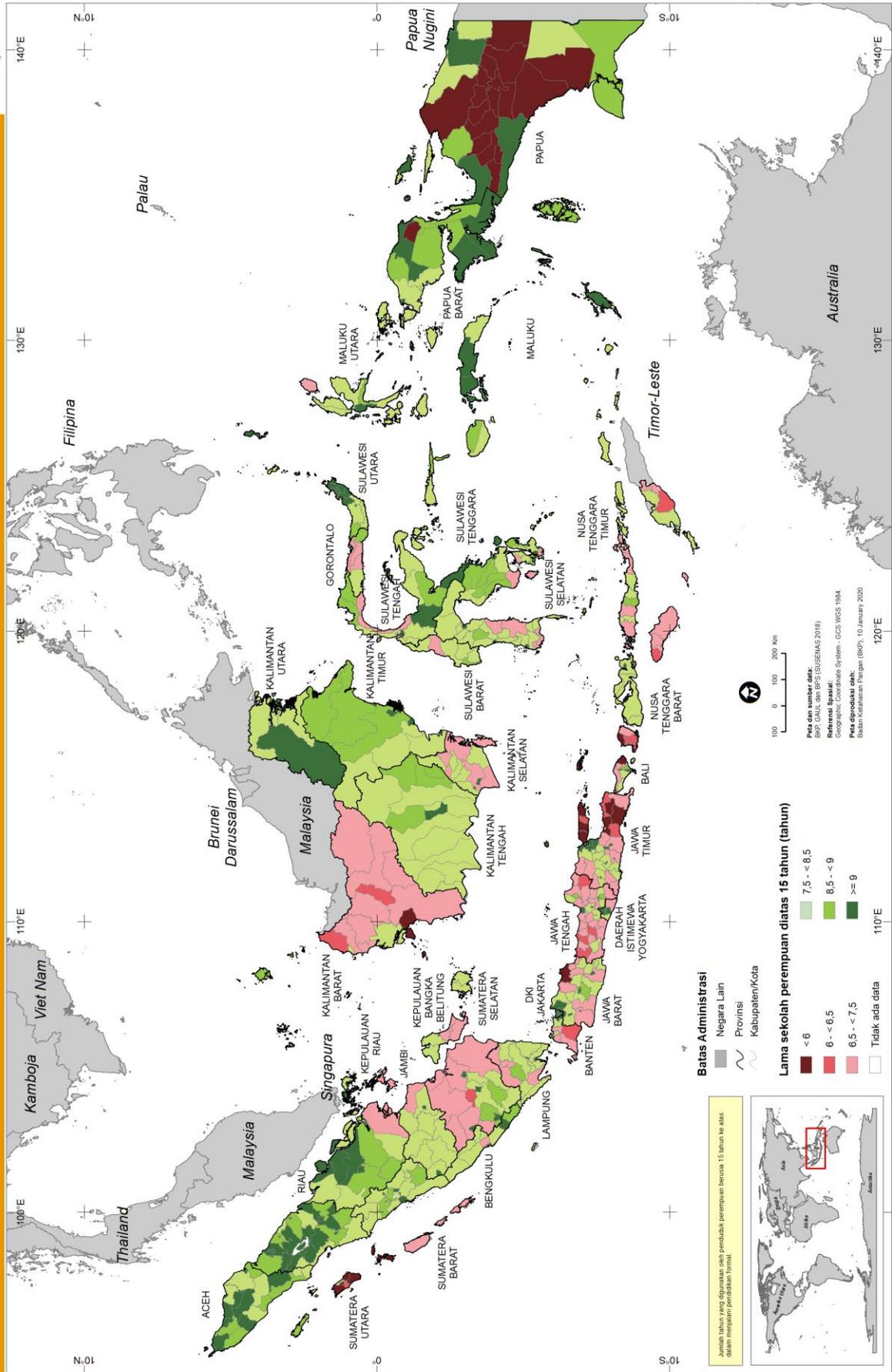
Sementara wilayah perkotaan, seluruhnya memiliki rata-rata lama sekolah perempuan dalam kelompok baik, dimana seluruh kota telah masuk pada kelompok baik. Rata-rata lama sekolah perempuan pada kelompok sangat baik meningkat kualitasnya dari 10,29 tahun pada kondisi 2017 (FSVA 2018) menjadi 10,37 tahun pada kondisi 2018 (FSVA 2019).



**Gambar 4.5 Sebaran Kelompok Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun Kota**



### Peta 4.3 Rata-rata Lama Sekolah Perempuan Diatas 15 Tahun



#### 4.4. Tantangan Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Beberapa tantangan pada aspek pemanfaatan pangan adalah situasi konsumsi, Pola Pangan Harapan (PPH), dan *food loss and waste*. Konsumsi energi dan protein di Indonesia telah melebihi anjuran Angka Kecukupan Gizi (AKG). Pada tahun 2016 – 2018, total konsumsi energi dan protein cenderung meningkat. Akan tetapi konsumsi ini masih didominasi pangan sumber karbohidrat, khususnya sereal.

Pemenuhan konsumsi pangan perlu memperhatikan keberagaman jenis dan jumlah pangan sesuai dengan anjuran, yaitu melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pada tahun 2018, skor PPH mencapai 91,3 telah meningkat dari tahun 2016 dan 2017. Kelompok pangan yang telah melebihi anjuran yaitu padi-padian, gula, minyak dan lemak sedangkan kelompok pangan hewani, umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta sayur dan buah masih perlu ditingkatkan.

**Tabel 4.5 Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2016-2018**

Uraian	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari			Rekomendasi WNP 2013
	2016	2017	2018	
1. Energi (kkal)	2147	2128	2165	2150
2. Protein (gram)	60,25	61,45	62,91	57
Nabati	40,95	40,59	42,66	
Hewani	19,3	20,86	20,2	
3. Skor PPH	86	90,4	91,3	

Sumber: Susenas BPS, diolah BKP 2019

Tingginya *food loss* (susut hasil panen) and *waste* (pemborosan pangan) merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan ketersediaan pangan. *Food loss* atau susut hasil panen terjadi dari mulai produksi, panen, penanganan hasil, hingga distribusi/pengangkutan. Sementara *food loss* umumnya terjadi karena kurangnya perencanaan maupun kebiasaan membuang makanan pada saat konsumsi. *Food loss* dapat dikurangi melalui penggunaan teknologi yang lebih modern dan dapat menjaga keutuhan bahan pangan serta memperpanjang umur simpan, sedangkan *food waste* dapat dikurangi melalui perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan di wilayah JABODETABEK, besaran *food waste* rumah tangga secara total adalah 113 kg/tahun. Apabila diasumsikan bahwa jumlah anggota setiap rumah tangga adalah 4 orang, maka total *food waste* adalah 28 kg/tahun dengan rincian sebagai berikut: beras 2,7 kg/tahun, sayur 7,3 kg/tahun, buah 5 kg/tahun, ikan dan *seafood* 1,5 kg/tahun, daging 1,6 kg/tahun, telur 1 kg/tahun, tempe-tahu-oncom 2,8 kg/tahun, susu 1,7 kg/tahun, kacang-kacangan 0,4 kg/tahun, umbi dan jagung 2,4 kg/tahun, dan lain-lain 1,8 kg/tahun.

Kelompok bahan pangan beras banyak terbuang dalam bentuk olahan (nasi), sedangkan kelompok buah banyak terbuang dalam bentuk segar/mentah. Adapun kelompok sayur-sayuran sering terbuang dalam bentuk segar maupun matang. Bahan pangan lainnya seperti daging, ikan dan susu lebih banyak terbuang dalam bentuk olahan dibandingkan dengan bahan segar. Bahan pangan yang terbuang dalam

keadaan segar biasanya karena rumah tangga membeli terlalu banyak sehingga akhirnya tidak termasak dan terbuang karena sudah kadaluarsa atau busuk.

Upaya pengurangan *food loss and waste* sejalan dengan perintah agama yang mengajarkan untuk tidak membuang-buang makanan. Upaya ini juga sejalan dengan target SDGs 12.3 untuk mengurangi *food loss and waste* menjadi setengahnya pada tahun 2030.

## BAB 5

# DAMPAK DARI STATUS GIZI DAN KESEHATAN

Status gizi adalah keadaan kesehatan hasil interaksi antara makanan, metabolisme tubuh dan lingkungan hidup manusia. Gizi mempengaruhi kekebalan tubuh, kerentanan terhadap penyakit, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Terpenuhinya kecukupan gizi menurunkan terjadinya kesakitan, kecacatan, dan kematian sehingga meningkatkan kualitas kesehatan individu.

Kekurangan gizi menyebabkan sistem kekebalan tubuh melemah sehingga meningkatkan kemungkinan terkena infeksi dan penyakit. Dalam jangka panjang akan mengakibatkan hilangnya potensi generasi muda yang cerdas dan berkualitas (*lost generation*) karena tidak produktif dan tidak mampu bersaing di masa depan. Apabila seorang anak sering terkena penyakit/infeksi maka masalah kekurangan gizi yang dialaminya akan semakin parah.

Masalah gizi pada saat ini dapat berdampak pada kualitas sumberdaya manusia pada generasi berikutnya. Masalah gizi terdiri atas gizi lebih dan gizi kurang. Kekurangan gizi erat kaitannya dengan kemiskinan, kurang tersedianya bahan pangan, buruknya sanitasi, kesalahan pola asuh, rendahnya pemahaman terhadap menu seimbang dan masih terbatasnya fasilitas infrastruktur. Sedangkan masalah gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu namun belum disertai pemahaman yang cukup mengenai pengetahuan gizi, menu seimbang, dan kesehatan.

Program perbaikan gizi dan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah harus memperhatikan data dan informasi spesifik terkait permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima manfaat sesuai dengan kebutuhannya dan permasalahan gizi dan kesehatan segera terselesaikan.

### 5.1. Dampak dari Status Gizi

Status gizi dipengaruhi oleh penyebab langsung dan tidak langsung. Status ketahanan pangan keluarga merupakan salah satu faktor penyebab tidak langsung yang mempengaruhi status gizi anak, selain faktor penyebab lain seperti pola asuh dan akses terhadap fasilitas kesehatan dan air bersih. Sementara konsumsi makanan dan penyakit infeksi yang kemungkinan diderita akan berpengaruh langsung terhadap status gizi anak. Keduanya saling mempengaruhi dan berinteraksi, pada anak yang konsumsi pangannya kurang baik maka daya tahannya akan lemah sehingga akan lebih mudah terserang infeksi, pada akhirnya berpengaruh terhadap status gizinya. Selain itu seorang anak dengan konsumsi pangan yang baik namun sering menderita penyakit infeksi akan berpengaruh terhadap

penyerapan zat gizi oleh tubuh, sehingga berpengaruh terhadap status gizinya. Meskipun tidak secara langsung mempengaruhi status gizi.

Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator, yaitu prevalensi *stunting* (tinggi badan menurut umur), *underweight* (berat badan menurut umur) dan *wasting* (berat badan menurut tinggi badan).

1. Pendek atau *stunting*: rasio tinggi badan menurut umur -TB/U- di bawah -2 standar deviasi dari mean referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara terus-menerus, dalam jangka panjang dan kronis.
2. Gizi kurang dan buruk atau *underweight*: rasio berat badan menurut umur -BB/U- di bawah -2 standar deviasi dari mean referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi.
3. Kurus atau *wasting*: rasio berat badan menurut tinggi badan -BB/TB- di bawah - 2 standar deviasi dari mean referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara akut atau baru terjadi.

WHO mengklasifikasikan masalah gizi sebagai masalah kesehatan berdasarkan prevalensi *underweight*, *stunting* dan *wasting* dalam populasi seperti pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1 Klasifikasi WHO tentang Masalah Kesehatan Masyarakat untuk Prevalensi Kurang Gizi**

Klasifikasi	<i>Underweight</i>	<i>Stunting</i>	<i>Wasting</i>
Baik	<10%	<20%	<5%
Kurang	10-19%	20-29%	5-9%
Buruk	20-29%	30-39%	10-14%
Sangat Buruk	≥30%	≥40%	≥15%

Sumber: WHO, 2000

Secara nasional, Indonesia mengalami tiga beban gizi yang masih melingkupi sistem pangan. Pertama, masalah kekurangan gizi pada anak usia balita. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat prevalensi kurang gizi (*malnutrition*), terutama anak usia Balita di Indonesia mencapai 17,7 persen (terdiri dari 3,9% gizi buruk dan 13,8% gizi kurang). Angka tersebut telah menurun dari 19,6 persen dibandingkan tahun 2013 (5,7% gizi buruk dan 13,9% gizi kurang). Kedua, fenomena anak pendek (*stunting*) saat ini tercatat 30,8%, menurun dari 37,2% pada tahun 2013 (Riskesdas, 2018). Secara teknis kesehatan, anak pendek adalah salah bentuk output dari kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama. Tingkat kesejahteraan ibu hamil dan menyusui menjadi amat krusial karena *stunting* terjadi mulai janin. Ketiga, Indonesia mengalami masalah kelebihan gizi yaitu *overweight* dan obesitas yang cenderung mengalami peningkatan prevalensinya pada kelompok usia di atas 18 tahun. Tidak hanya masalah gizi makro, masalah kekurangan zat gizi mikro yaitu kekurangan vitamin dan mineral seperti masalah anemia pada ibu hamil, kekurangan vitamin A, kekurangan mineral Iodium masih menjadi beban gizi yang perlu ditangani bersama.

Bentuk lain dari masalah gizi kurang yang ditandai tinggi badan yang terlalu pendek dibandingkan dengan pertumbuhan standar adalah *stunting*. Pada tahun 2018 menunjukkan adanya perbaikan status gizi pada balita di Indonesia dibandingkan tahun 2013, angka *stunting* turun dari 37,2 menjadi 30,8. Namun demikian, WHO menetapkan batasan masalah gizi tersebut tidak lebih dari 20%, sehingga Indonesia masih termasuk dalam negara yang memiliki masalah kesehatan masyarakat, yang disebabkan oleh multi-faktorial dan bersifat antar generasi.

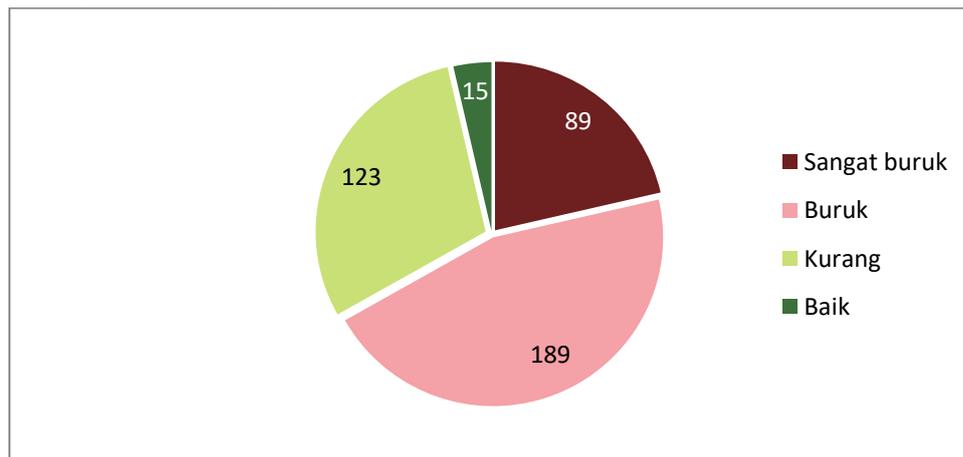
**Tabel 5.2 Prevalensi Kurang Gizi pada Balita per Provinsi (*Stunting*, *Underweight* dan *Wasting*) Tahun 2018**

No	Provinsi	<i>Underweight</i>	<i>Stunting</i>	<i>Wasting</i>
1	Aceh	23,5	37,1	11,9
2	Sumatera Utara	19,7	32,4	12,1
3	Sumatera Barat	18,9	29,9	11,3
4	Riau	18,3	27,4	12,2
5	Jambi	15,7	30,2	12,0
6	Sumatera Selatan	17,2	31,6	11,4
7	Bengkulu	13,2	28,0	8,3
8	Lampung	15,9	27,3	10,7
9	Kep Bangka Belitung	17,0	23,4	9,9
10	Kep Riau	13,0	23,6	11,2
11	DKI Jakarta	14,3	17,6	10,1
12	Jawa Barat	13,2	31,1	8,4
13	Jawa Tengah	16,8	31,3	8,5
14	DI Yogyakarta	15,5	21,4	8,4
15	Jawa Timur	16,7	32,8	9,2
16	Banten	16,2	26,6	10,5
17	Bali	13,1	21,9	6,3
18	Nusa Tenggara Barat	26,4	33,5	14,4
19	Nusa Tenggara Timur	29,5	42,7	12,8
20	Kalimantan Barat	10,4	33,3	14,3
21	Kalimantan Tengah	21,8	34,0	13,9
22	Kalimantan Selatan	24,5	33,1	13,1
23	Kalimantan Timur	14,7	29,2	7,5
24	Kalimantan Utara	16,8	26,9	4,6
25	Sulawesi Utara	15,4	25,5	9,6
26	Sulawesi Tengah	23,4	32,3	12,9
27	Sulawesi Selatan	23,0	35,7	10,0
28	Sulawesi Tenggara	22,0	28,7	11,9
29	Gorontalo	26,1	32,5	14,4
30	Sulawesi Barat	24,7	41,6	10,5
31	Maluku	24,9	34,0	13,1
32	Maluku Utara	22,2	31,4	11,9
33	Papua Barat	19,2	27,8	12,2
34	Papua	16,5	33,1	10,3
	<b>INDONESIA</b>	<b>17,7</b>	<b>30,8</b>	<b>10,2</b>

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2018

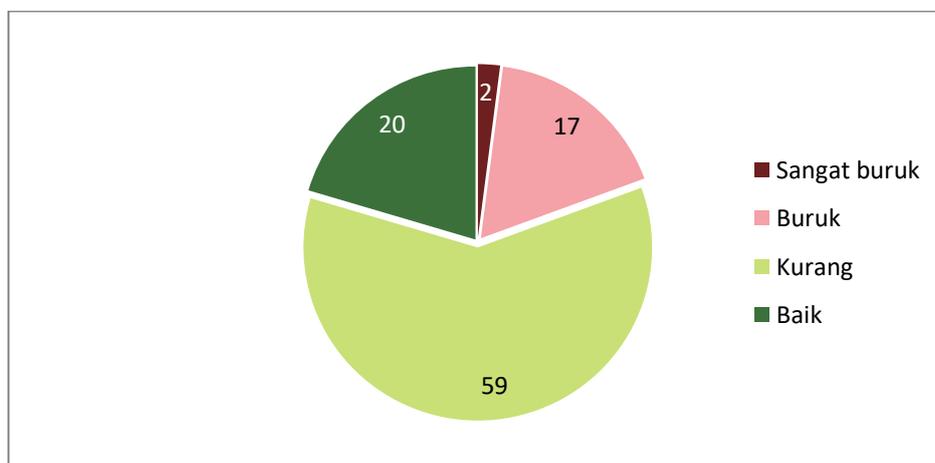
Sebaran kelompok persentase balita *stunting* pada FSVA 2019 terbagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan klasifikasi WHO tentang masalah kesehatan masyarakat untuk prevalensi kurang gizi. Prevalensi kurang gizi (*stunting*) pada balita di Indonesia mencapai 30,8% yang berarti kesehatan masyarakat di Indonesia untuk prevalensi kurang gizi tergolong buruk di mana terdapat 30,8% balita mengalami *stunting* dari seluruh balita di Indonesia. Provinsi yang sudah tergolong baik adalah Provinsi DKI Jakarta (17,6%). Provinsi dengan prevalensi paling tinggi atau tergolong sangat buruk adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (42,7%).

Pada tingkat kabupaten, jumlah kabupaten terbanyak tergolong dalam kelompok buruk, yaitu 189 kabupaten (45,43%). Sementara jumlah kabupaten yang sudah tergolong baik sebanyak 15 kabupaten (3,61%). Kabupaten yang termasuk ke dalam kelompok sangat buruk sejumlah 89 kabupaten (21,39%) di mana 48 kabupaten di antaranya berada di Kawasan Timur Indonesia.



**Gambar 5.1 Sebaran Kelompok Balita *Stunting* Kabupaten**

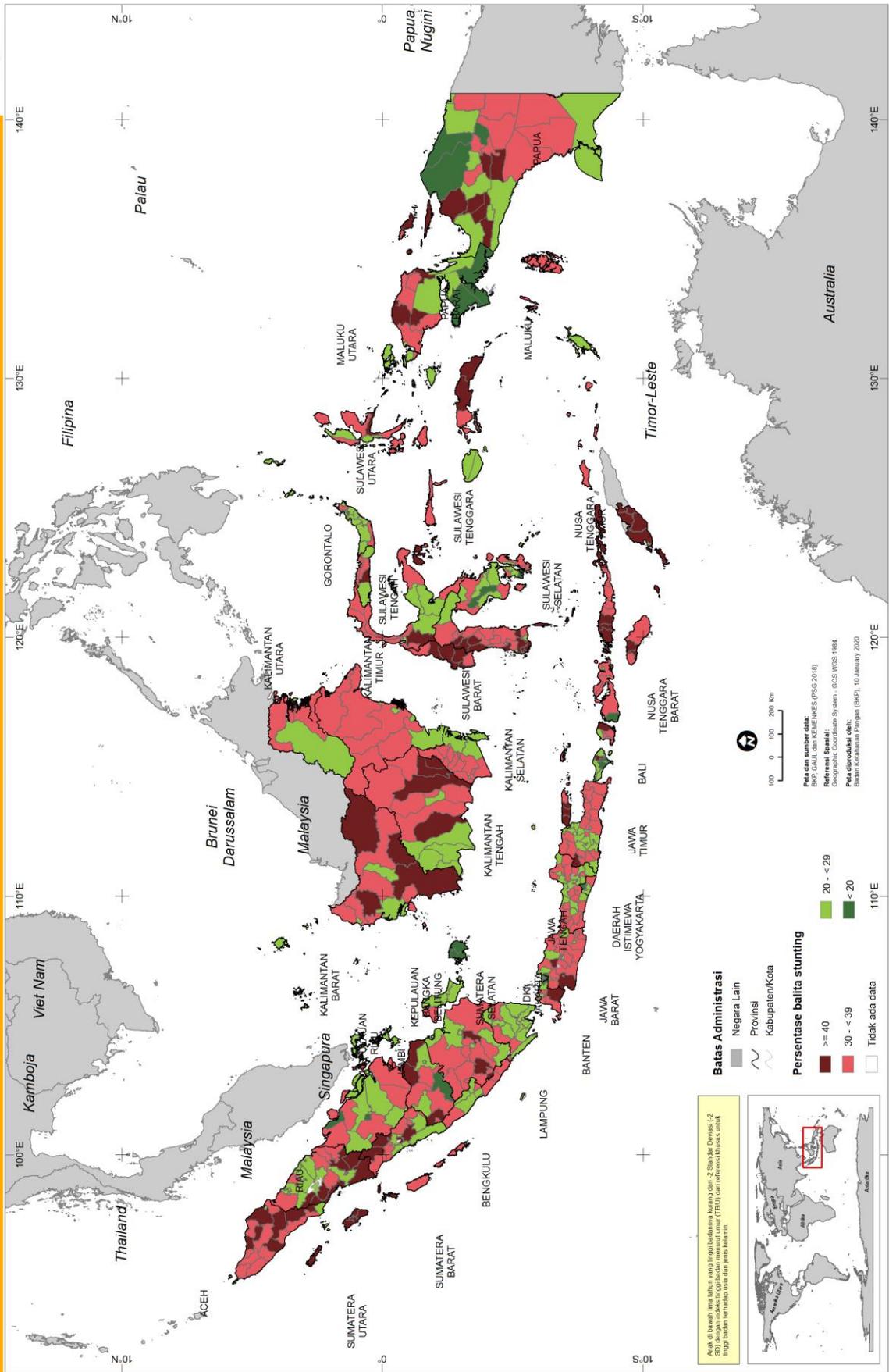
Pada tingkat kota, jumlah kota terbanyak tergolong dalam kelompok kurang, yaitu 59 kota (60,20%). Sementara jumlah kota yang sudah tergolong baik yaitu 20 kota (20,41%). Kota yang termasuk ke dalam kelompok sangat buruk sejumlah 2 kota (2,04%), yaitu Kota Subulussalam dan Kota Gunung Sitoli. Kota yang sudah tergolong baik adalah 16 kota dari Kawasan Barat Indonesia dan 4 kota dari Kawasan Timur Indonesia.



**Gambar 5.2 Sebaran Kelompok Persentase Balita *Stunting* Kota**



## Peta 5.1 Persentase Balita dengan Tinggi Badan Di Bawah Standar (Stunting)



## 5.2. Dampak dari Status Kesehatan

Angka harapan hidup merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara umum, semakin tingginya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Angka harapan hidup pada saat lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya.

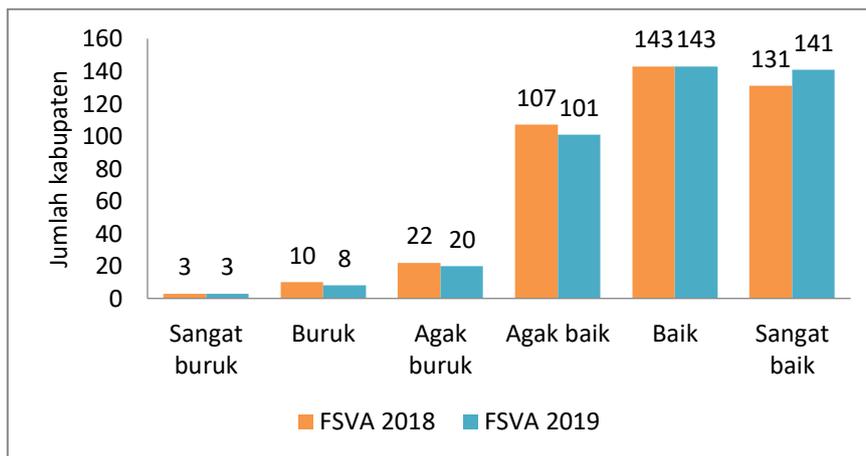
**Tabel 5.3 Angka Harapan Hidup per Provinsi**

No	Provinsi	AHH (Tahun)
1	Aceh	69,70
2	Sumatera Utara	68,63
3	Sumatera Barat	69,05
4	Riau	71,22
5	Jambi	70,85
6	Sumatera Selatan	69,46
7	Bengkulu	68,83
8	Lampung	70,09
9	Kep. Bangka Belitung	70,22
10	Kep. Riau	69,66
11	DKI Jakarta	72,72
12	Jawa Barat	72,69
13	Jawa Tengah	74,19
14	DI Yogyakarta	74,84
15	Jawa Timur	70,93
16	Banten	69,67
17	Bali	71,69
18	Nusa Tenggara Barat	65,82
19	Nusa Tenggara Timur	66,40
20	Kalimantan Barat	70,21
21	Kalimantan Tengah	69,65
22	Kalimantan Selatan	68,18
23	Kalimantan Timur	74,00
24	Kalimantan Utara	72,45
25	Sulawesi Utara	71,28
26	Sulawesi Tengah	67,81
27	Sulawesi Selatan	70,15
28	Sulawesi Tenggara	70,77
29	Gorontalo	67,52
30	Sulawesi Barat	64,62
31	Maluku	65,63
32	Maluku Utara	67,81
33	Papua Barat	65,50
34	Papua	65,45
<b>INDONESIA</b>		<b>71,25</b>

Sumber: BPS, 2018

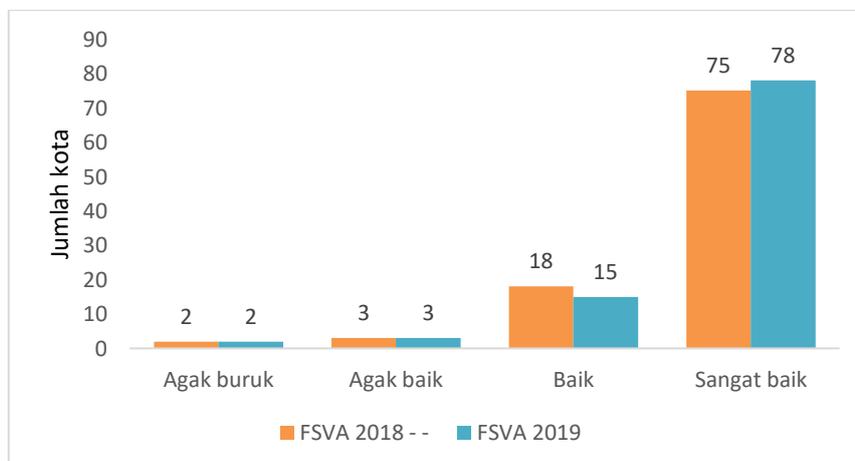
Angka harapan hidup di Indonesia mencapai 71,25 tahun yang berarti angka harapan hidup di Indonesia sudah tergolong sangat baik. Pada tingkat provinsi, provinsi yang memiliki angka harapan hidup paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat yaitu, 64,62 tahun. Sementara provinsi dengan angka harapan hidup paling tinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta yaitu, 74,84 tahun. Tidak ada provinsi yang memiliki angka harapan hidup yang tergolong sangat buruk. Hal ini berarti angka harapan hidup pada tingkat provinsi maupun secara nasional sudah baik.

Pada tingkat kabupaten, jumlah kabupaten terbanyak tergolong dalam kelompok baik, yaitu 143 kabupaten (34,38%). Sementara jumlah kabupaten yang sudah tergolong sangat baik, yaitu 141 kabupaten (33,89%), di mana jumlah ini menunjukkan peningkatan dari FSVA 2018 sebanyak 10 kabupaten. Kabupaten yang mengalami peningkatan adalah Kabupaten Pasuruan, Bangli, Karangasem, Kubu Raya, Tabalong, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Bantaeng, Gowa, Luwu Timur, dan Konawe Selatan.



**Gambar 5.3 Sebaran Kelompok Angka Harapan Hidup Kabupaten**

Pada tingkat kota, jumlah kota terbanyak tergolong dalam kelompok sangat baik, yaitu 78 kota (79,59%). Apabila dibandingkan dengan FSVA 2018, terdapat 3 kota yang mengalami peningkatan status, yaitu Kota Palu, Kota Ambon, dan Kota Jayapura. Tidak ada kota yang tergolong sangat buruk dan buruk.



**Gambar 5.4 Sebaran Kelompok Angka Harapan Hidup Kota**



## BAB 6

# ANALISIS KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

### 6.1. Ketahanan Pangan di Indonesia

Faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan pangan suatu wilayah menurut keterkaitannya dengan dimensi ketahanan pangan dibagi kedalam tiga aspek, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan serta pemanfaatan zat-zat gizi dalam pangan. Peta FSVA 2019 menggambarkan kondisi ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota, menampilkan perubahan status ketahanan pangan dari periode 2018-2019 dan merupakan hasil pemutakhiran dari peta 2018 yang sudah disusun sebelumnya. Peta ini menetapkan sembilan indikator yang mencakup tiga dimensi ketahanan pangan dengan mempertimbangkan kelengkapan ketersediaan dan kontinuitas data setiap tahunnya.

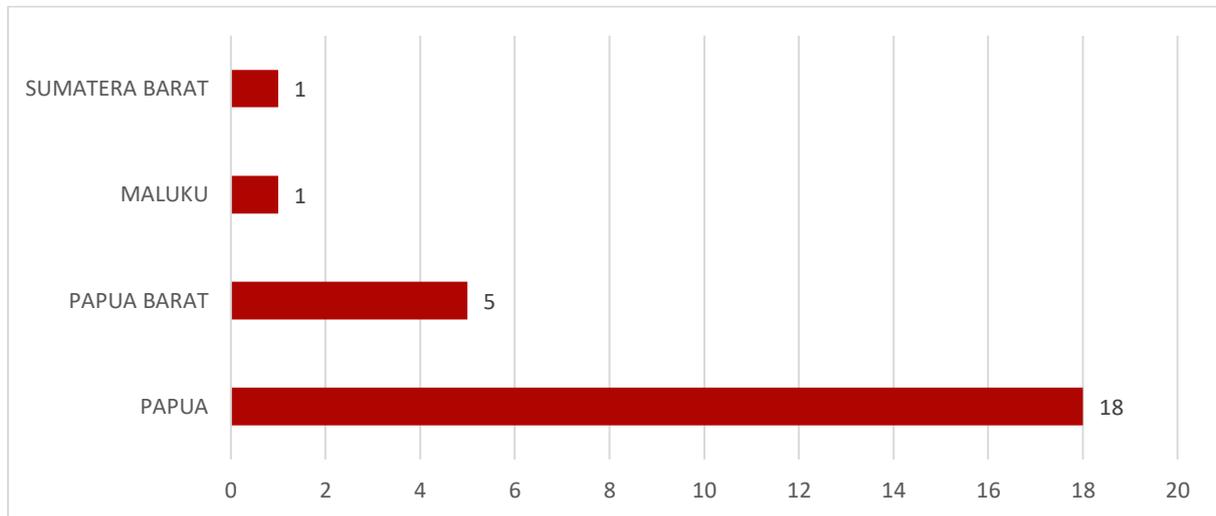
Metodologi untuk menyusun peringkat dan mengelompokkan kabupaten/kota ke dalam prioritas status ketahanan pangan, menggunakan metode pembobotan yang mengadopsi metode dari *Global Food Security Index (GFSI)*. Bobot masing-masing indikator individu menggunakan *judgment* yang ditetapkan oleh para ahli. Metode ini menghasilkan skor di masing-masing kabupaten/kota selanjutnya dikelompokkan ke dalam salah satu dari 6 kelompok prioritas. Metode pembobotan akan meningkatkan obyektifitas dan kepercayaan hasil analisis.

Kabupaten/kota diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat kerentanan pangan dan faktor penyebabnya. Kabupaten/kota di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 (sangat rentan), Prioritas 2 (rentan), dan Prioritas 3 (agak rentan). Kabupaten/kota di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi Prioritas 4 (agak tahan), Prioritas 5 (tahan), dan Prioritas 6 (sangat tahan). Kabupaten atau kota dipetakan dalam warna merah untuk kelompok Prioritas 1, 2, dan 3, dan warna hijau untuk Prioritas 4, 5 dan 6 (Peta 6.1). Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk mengidentifikasi dimanakah kabupaten/kota yang lebih rentan terhadap terjadinya kerawanan pangan dan gizi serta bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun 2018. Karena karakteristik kabupaten dan kota berbeda, maka pada penyusunan atlas 2019 ini analisis terhadap 416 kabupaten dan 98 kota dilakukan secara terpisah.

#### **Analisis Kabupaten pada Atlas 2019**

Berdasarkan analisis komposit ketahanan pangan, 416 kabupaten dikelompokkan dalam enam kelompok prioritas dengan rincian sebagai berikut: 25 kabupaten pada Prioritas 1 (6%), 19 kabupaten pada Prioritas 2 (5%), 27 kabupaten pada Prioritas 3 (6%), 38 kabupaten pada Prioritas 4 (9%), 106

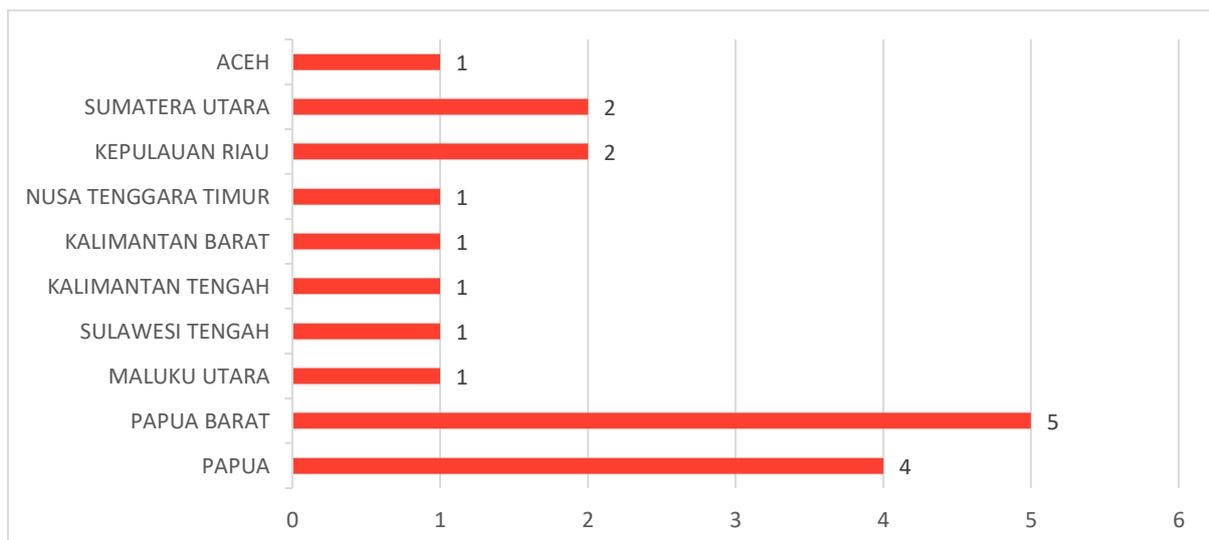
kabupaten pada Prioritas 5 (25%) dan 201 kabupaten pada Prioritas 6 (48%). Total kabupaten Prioritas 1-3 (rentan terhadap kerawanan pangan) berjumlah 71 kabupaten, sedangkan kabupaten Prioritas 4-6 (tahan terhadap kerawanan pangan) berjumlah 345 kabupaten. Kabupaten pada Prioritas I tersebar di Provinsi Papua (delapan belas kabupaten), Papua Barat (lima kabupaten), Maluku dan Sumatera Barat masing-masing satu kabupaten (Gambar 6.1).



Sumber: Hasil analisis, 2019

**Gambar 6.1 Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas I per Provinsi**

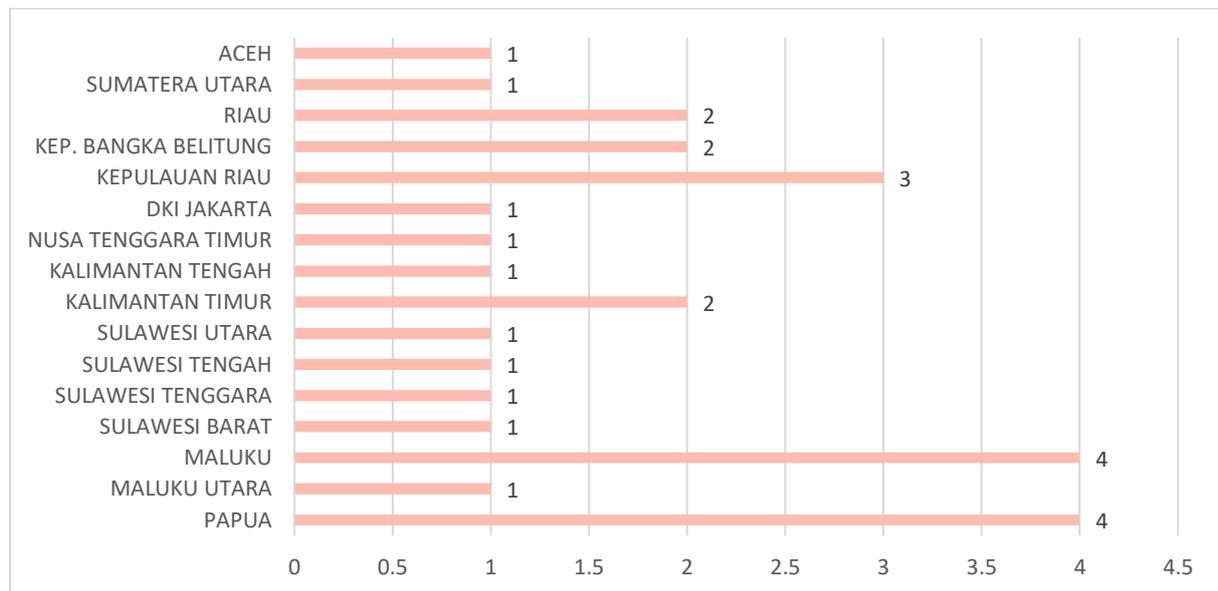
Kabupaten pada Prioritas 2 tersebar di Provinsi Papua (empat kabupaten), Papua Barat (lima kabupaten), Kepulauan Riau (dua kabupaten), Sumatera Utara (dua kabupaten), dan di Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara masing-masing satu kabupaten (Gambar 6.2).



Sumber: Hasil analisis, 2019

**Gambar 6.2 Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas 2 per Provinsi**

Kabupaten pada Prioritas 3 tersebar di Provinsi Papua (empat kabupaten), Maluku (empat kabupaten), Kepulauan Riau (tiga kabupaten), Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dan Riau masing-masing dua kabupaten, serta di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara masing-masing satu kabupaten (Gambar 6.3).



Sumber: Hasil analisis, 2019

**Gambar 6.3 Jumlah Kabupaten Rentan di Prioritas 3 per Provinsi**

Secara umum hasil analisis menunjukkan Kawasan Timur Indonesia memiliki status ketahanan pangan yang lebih rendah dibandingkan Kawasan Barat Indonesia. Begitu pula daerah kepulauan memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan daerah bukan kepulauan.

Tabel 6.1 menunjukkan sebaran prioritas kabupaten di setiap provinsi. Provinsi dengan tingkat kerentanan pangan tinggi (Prioritas 1) secara umum terdapat di daerah Papua (64% dari total kabupaten), Papua Barat (42%), dan Maluku (11%). Provinsi dengan tingkat ketahanan pangan paling baik adalah provinsi DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo dimana seluruh kabupatennya masuk dalam kategori tahan pangan Prioritas 6, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (93%), Sumatera Barat (92%), serta Sulawesi Selatan (90%).

**Tabel 6.1 Sebaran Prioritas Kabupaten di Setiap Provinsi (Persentase)**

Provinsi	Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Aceh	0%	6%	6%	0%	61%	28%	100%
Sumatera Utara	0%	8%	4%	32%	20%	36%	100%
Sumatera Barat	8%	0%	0%	0%	0%	92%	100%
Riau	0%	0%	20%	40%	20%	20%	100%
Jambi	0%	0%	0%	0%	89%	11%	100%
Sumatera Selatan	0%	0%	0%	23%	38%	38%	100%
Bengkulu	0%	0%	0%	22%	78%	0%	100%

Provinsi	Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Lampung	0%	0%	0%	0%	31%	69%	100%
Kep. Bangka Belitung	0%	0%	33%	50%	17%	0%	100%
Kepulauan Riau	0%	40%	60%	0%	0%	0%	100%
DKI Jakarta	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
Jawa Barat	0%	0%	0%	0%	22%	78%	100%
Jawa Tengah	0%	0%	0%	0%	7%	93%	100%
Di Yogyakarta	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Jawa Timur	0%	0%	0%	0%	28%	72%	100%
Banten	0%	0%	0%	0%	75%	25%	100%
Bali	0%	0%	0%	0%	13%	88%	100%
Nusa Tenggara Barat	0%	0%	0%	13%	50%	38%	100%
Nusa Tenggara Timur	0%	5%	5%	33%	48%	10%	100%
Kalimantan Barat	0%	8%	0%	8%	83%	0%	100%
Kalimantan Tengah	0%	8%	8%	15%	15%	54%	100%
Kalimantan Selatan	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kalimantan Timur	0%	0%	29%	14%	14%	43%	100%
Kalimantan Utara	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100%
Sulawesi Utara	0%	0%	9%	0%	18%	73%	100%
Sulawesi Tengah	0%	8%	8%	0%	25%	58%	100%
Sulawesi Selatan	0%	0%	0%	5%	5%	90%	100%
Sulawesi Tenggara	0%	0%	7%	0%	27%	67%	100%
Gorontalo	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Sulawesi Barat	0%	0%	17%	0%	33%	50%	100%
Maluku	11%	0%	44%	33%	0%	11%	100%
Maluku Utara	0%	13%	13%	0%	50%	25%	100%
Papua Barat	42%	42%	0%	8%	8%	0%	100%
Papua	64%	14%	14%	4%	0%	4%	100%
<b>Total</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>9%</b>	<b>25%</b>	<b>48%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil analisis, 2019

Indikator utama yang menyebabkan kerentanan terhadap kerawanan pangan di 416 kabupaten secara umum adalah: i) tingginya prevalensi balita stunting, ii) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, iii) rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan >15 tahun, iv) tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih, dan v) tingginya penduduk miskin.

Secara lebih khusus, kabupaten-kabupaten dalam kelompok rentan rawan pangan Prioritas 1-3 (71 kabupaten) diindikasikan oleh: i) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, ii) tingginya prevalensi balita *stunting*, iii) tingginya penduduk miskin, iv) tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih, dan v) tingginya rasio penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk. Rata-rata rasio konsumsi terhadap produksi pangan di daerah rentan pangan Prioritas 1-3 adalah 4,27. Kabupaten-kabupaten tersebut sangat tergantung pada *supply* pangan dari wilayah lain yang merupakan daerah sentra untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Rata-rata persentase balita *stunting* pada daerah rentan pangan adalah sebesar 33,58%. Namun demikian, angka tersebut tidak berbeda jauh dengan angka *stunting* di kabupaten tahan pangan, yaitu 33,36. WHO mengklasifikasikan wilayah dengan persentase balita *stunting* sebesar 30-40% sebagai wilayah dengan kategori buruk (WHO 2000). Melihat kondisi tersebut, maka penanganan *stunting* harus menjadi fokus tidak hanya di kabupaten rentan pangan tetapi juga di kabupaten yang tahan pangan.

Rata-rata angka kemiskinan di kabupaten rentan pangan adalah sebesar 22,91%. Angka ini jauh di atas rata-rata angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,82% (Susenas Maret 2018). Rata-rata rumah tangga tanpa akses bersih yang memadai pada kabupaten rentan pangan adalah 53,46%, sedangkan rata-rata angka lama sekolah perempuan >15 tahun di kabupaten rentan pangan hanya sebesar 7,02 tahun (Tabel 6.2).

**Tabel 6.2 Nilai Rata-Rata Kelompok Kabupaten Prioritas Rentan dan Prioritas Tahan**

Indikator	Prioritas Rentan (1 – 3)	Prioritas Tahan (4 – 6)
Rasio konsumsi terhadap produksi	4,27	0,87
Angka kemiskinan	22,91	11,66
Pengeluaran pangan >65%	37,05	32,31
Terbatasnya akses ke listrik	21,91	2,78
Terbatasnya akses ke air bersih	53,46	33,94
Angka harapan hidup	65,46	69,16
Rasio penduduk per tenaga kesehatan	24,15	4,43
Lama sekolah perempuan >15 tahun	7,02	7,85
Stunting pada balita	33,58	33,36

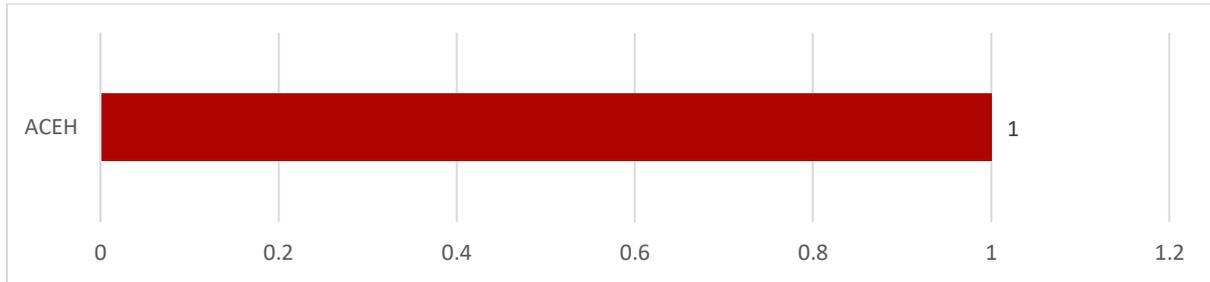
Sumber: Hasil analisis, 2019

Indikator utama dari kerentanan terhadap kerawanan pangan di tiap kabupaten berbeda-beda, maka pendekatan-pendekatan khusus untuk mengurangi kerentanan juga akan berbeda-beda pada setiap kabupaten. Dengan menentukan indikator utama kerentanan pangan di tingkat kabupaten, maka peta ini dapat memberikan petunjuk yang lebih baik kepada para pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektifitas dan penentuan program ketahanan pangan.

### Analisis Perkotaan pada Atlas 2019

Berdasarkan analisis komposit ketahanan pangan, 98 kota dikelompokkan kedalam enam kelompok prioritas sebagai berikut: 1 kota pada Prioritas 1 (1%), 1 kota pada Prioritas 2 (1%), 3 kota pada Prioritas 3 (3%), 5 kota pada Prioritas 4 (5%), 20 kota pada Prioritas 5 (20%) dan 68 kota pada Prioritas 6 (69%). Total kota Prioritas 1-3 (paling rentan terhadap kerawanan pangan) berjumlah 5 kota, sedangkan kota prioritas 4-6 (paling tahan terhadap kerawanan pangan) berjumlah 93 kota.

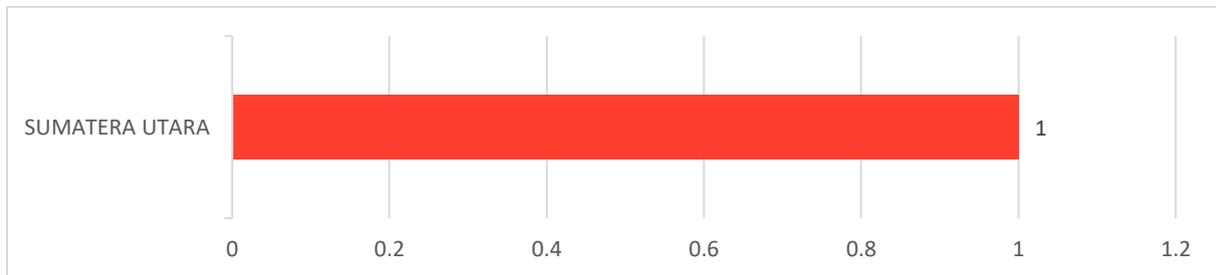
Kota pada Prioritas 1 berada di Kota Subulussalam di Provinsi Aceh (Gambar 6.4). Kota tersebut dikategorikan daerah rentan pangan disebabkan oleh persentase balita *stunting* yang tinggi, pangsa pengeluaran pangan yang tinggi, rendahnya akses ke air bersih, dan rendahnya angka harapan hidup.



Sumber: Hasil analisis, 2019

**Gambar 6.4 Jumlah Kota Rentan di Prioritas 1 per Provinsi**

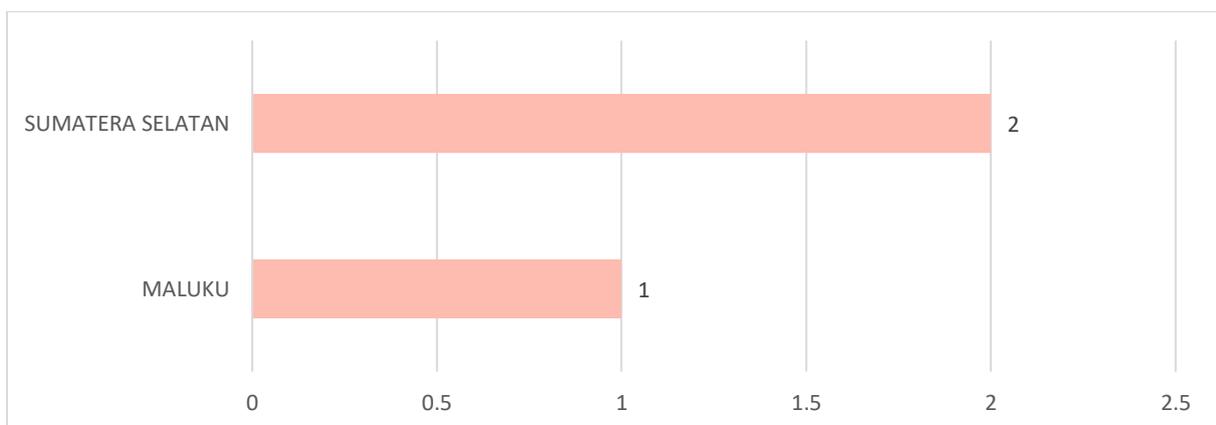
Kota pada Prioritas 2 berada di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Gunung Sitoli (Gambar 6.5). Satu kota tersebut masuk dalam kategori rentan pangan prioritas 2 karena memiliki persentase balita *stunting* yang tinggi.



Sumber: Hasil analisis, 2019

**Gambar 6.5 Jumlah Kota Rentan di Prioritas 2 per Provinsi**

Kota pada Prioritas 3 tersebar di Provinsi Sumatera Selatan (dua kota), dan Maluku (satu kota) (Gambar 6.6). Adapun kota rentan pangan Prioritas 3 tersebut adalah Kota Pagar Alam dan Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, dan Kota Tual di Maluku. Kota-kota tersebut masuk dalam kategori rentan pangan Prioritas 3 karena memiliki persentase balita *stunting* yang tinggi, rumah tangga dengan akses terhadap air bersih yang rendah, dan penduduk miskin yang masih tinggi.



Sumber: Hasil analisis, 2019

**Gambar 6.6 Jumlah Kota Rentan di Prioritas 3 per Provinsi**

Tabel 6.3 menunjukkan sebaran prioritas wilayah perkotaan di setiap provinsi. Secara umum, wilayah perkotaan memiliki tingkat ketahanan yang baik. Hanya satu kota yang masuk kategori Prioritas 1. Provinsi yang memiliki wilayah perkotaan dengan tingkat kerentanan pangan tinggi (Prioritas 1), yaitu Aceh.

**Tabel 6.3 Sebaran Prioritas Kota di Setiap Provinsi (Persentase)**

Provinsi	Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Aceh	20%	0%	0%	0%	20%	60%	100%
Sumatera Utara	0%	13%	0%	25%	25%	38%	100%
Sumatera Barat	0%	0%	0%	0%	14%	86%	100%
Riau	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Jambi	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Sumatera Selatan	0%	0%	50%	0%	25%	25%	100%
Bengkulu	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
Lampung	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kep. Bangka Belitung	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kepulauan Riau	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
DKI Jakarta	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Jawa Barat	0%	0%	0%	11%	22%	67%	100%
Jawa Tengah	0%	0%	0%	0%	17%	83%	100%
DI Yogyakarta	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Jawa Timur	0%	0%	0%	0%	22%	78%	100%
Banten	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100%
Bali	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Nusa Tenggara Barat	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Nusa Tenggara Timur	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kalimantan Barat	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%
Kalimantan Tengah	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kalimantan Selatan	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
Kalimantan Timur	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Kalimantan Utara	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Sulawesi Utara	0%	0%	0%	0%	25%	75%	100%
Sulawesi Tengah	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Sulawesi Selatan	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Sulawesi Tenggara	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Gorontalo	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Maluku	0%	0%	50%	0%	0%	50%	100%
Maluku Utara	0%	0%	0%	50%	0%	50%	100%
Papua Barat	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
Papua	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
<b>Total</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>	<b>5%</b>	<b>20%</b>	<b>69%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil analisis, 2019

Indikator yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerawanan pangan secara umum di 98 kota di Indonesia adalah: i) tingginya prevalensi balita *stunting*, ii) tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih, iii) tingginya rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan >65% terhadap total pengeluaran, iv) rendahnya angka harapan hidup, dan v) tingginya angka kemiskinan.

Secara khusus, kota-kota di Prioritas 1 – 3 diindikasikan oleh: i) tingginya prevalensi balita *stunting*, ii) tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih, iii) tingginya penduduk miskin, iv) tingginya rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan >65% terhadap total pengeluaran, dan v) rendahnya angka harapan hidup. Kota-kota yang rentan rawan pangan memiliki rata-rata pengeluaran pangan >65% masih tinggi, yaitu sebesar 27,41%; rata-rata 37,21% penduduknya memiliki akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar air bersih; rata-rata *stunting* pada balita sebesar 36,96%; rata-rata angka kemiskinan yang tinggi, yaitu sebesar 16,43%; serta rata-rata angka harapan hidup sebesar 66,84 tahun, lebih rendah dari angka harapan hidup kota-kota di Prioritas 4 – 6 (Tabel 6.4).

**Tabel 6.4 Nilai Rata-rata Kelompok Kota Prioritas Rentan dan Prioritas Tahan**

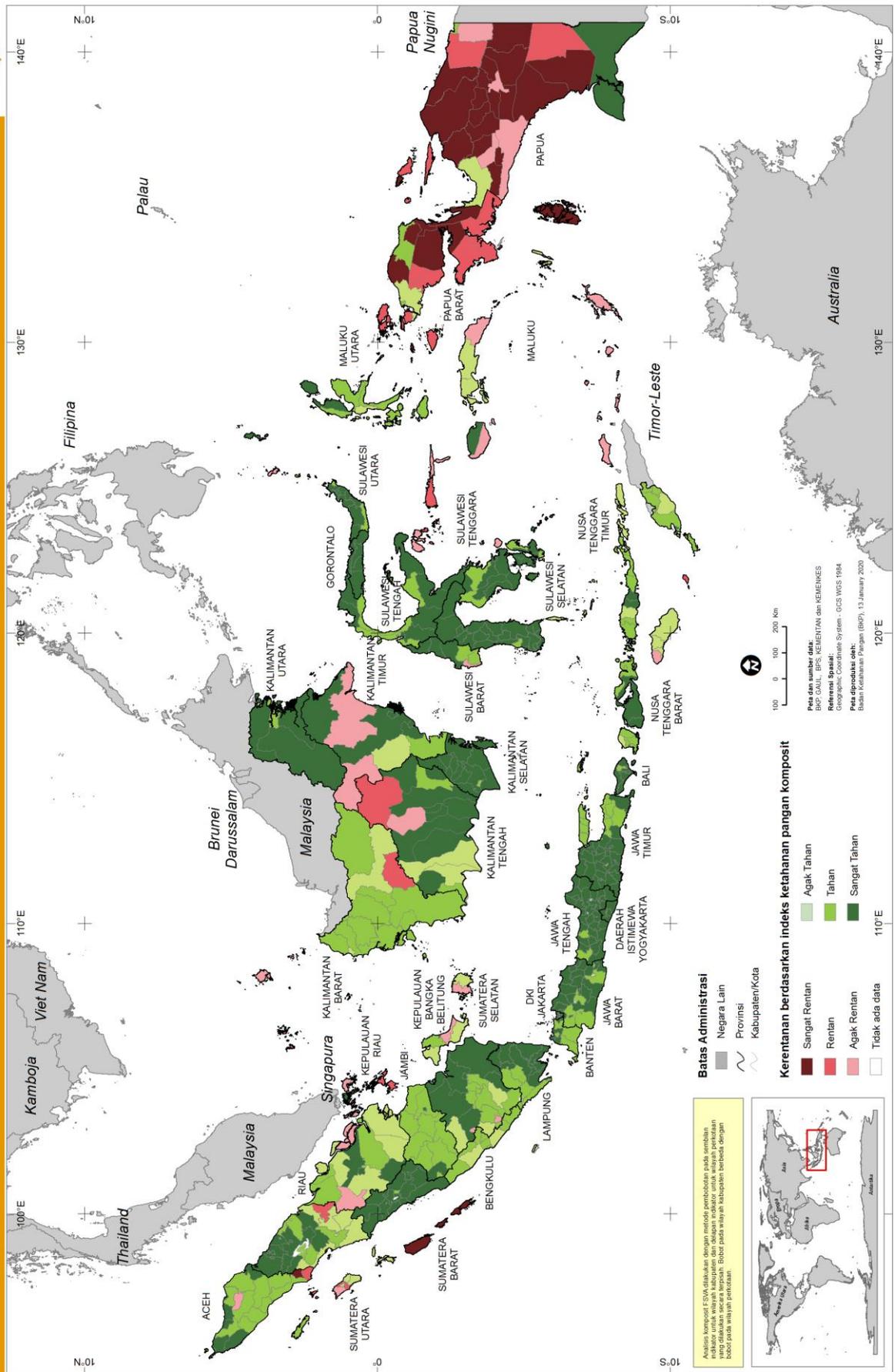
Indikator	Prioritas Rentan (1 – 3)	Prioritas Tahan (4 – 6)
Angka kemiskinan	16,43	6,53
Pengeluaran pangan >65%	27,41	16,48
Terbatasnya akses ke listrik	1,11	0,12
Terbatasnya akses ke air bersih	37,21	12,17
Angka harapan hidup	66,84	71,95
Rasio penduduk per tenaga kesehatan	0,72	0,17
Lama sekolah perempuan >15 tahun	9,12	10,24
Stunting pada balita	36,96	25,10

Sumber: Hasil analisis, 2019

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pengentasan daerah rentan rawan pangan harus ditekankan pada penyelesaian akar utama penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan. Dengan menentukan indikator utama dari kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kota, maka peta ini dapat memberikan petunjuk yang lebih baik kepada para pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektifitas dan penentuan program ketahanan pangan.



## Peta 6.1 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2019



## 6.2. Perubahan Tingkat Kerentanan Terhadap Ketahanan Pangan Kronis Tahun 2018-2019

Perubahan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dilakukan dengan membandingkan secara langsung kondisi ketahanan pangan tahun 2018 dan 2019 pada 416 kabupaten dan 98 kota.

Analisis perubahan tingkat ketahanan pangan dibagi menjadi lima kategori:

1. Warna hijau tua menunjukkan peningkatan prioritas sebanyak dua tingkat atau lebih, misalnya dari Prioritas 3 menjadi 5.
2. Warna hijau muda menunjukkan peningkatan prioritas sebanyak satu tingkat, misalnya dari Prioritas 3 menjadi 4.
3. Warna kuning menunjukkan tidak adanya perubahan prioritas misalnya dari Prioritas 3 tetap di Prioritas 3.
4. Warna merah muda menunjukkan penurunan sebanyak satu tingkat, misalnya dari Prioritas 3 menjadi 2.
5. Warna merah tua menunjukkan penurunan prioritas sebanyak dua tingkat atau lebih, misalnya dari Prioritas 3 menjadi 1.

### **Perubahan Status Ketahanan Pangan Kabupaten pada Atlas 2018-2019**

Berdasarkan hasil analisis indikator komposit 2019, dari 416 kabupaten sebanyak 11 kabupaten (3%) telah berhasil mengalami peningkatan status ketahanan pangan sebanyak dua tingkat atau lebih. Kabupaten yang mengalami perbaikan status ketahanan paling tinggi berturut-turut di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 99 kabupaten (24%) yang menunjukkan perbaikan satu tingkat, yang sebagian besar tersebar di Provinsi Gorontalo, Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah. Sementara, 270 kabupaten (65%) tidak mengalami perubahan pada status ketahanan pangan wilayahnya.

Secara khusus, pada kabupaten-kabupaten kelompok rentan (Prioritas 1–3) yang berjumlah 81 kabupaten pada FSVA 2018, terdapat 27 kabupaten (33%) yang mengalami peningkatan sebanyak satu tingkat atau lebih, sedangkan 48 kabupaten (59%) tidak mengalami perubahan status ketahanan pangan wilayah. Kabupaten-kabupaten kelompok tahan Prioritas 4–6 yang berjumlah 335 kabupaten, terdapat 83 kabupaten (25%) mengalami peningkatan sebanyak satu tingkat atau lebih.

**Tabel 6.5 Perubahan Tingkat Prioritas Kabupaten per Provinsi 2018 – 2019 (Persentase)**

Provinsi	Penurunan Prioritas 2 tingkat atau lebih	Penurunan Prioritas 1 tingkat	Tidak ada perubahan	Peningkatan Prioritas 1 tingkat	Peningkatan Prioritas 2 tingkat atau lebih
Aceh	0%	0%	67%	33%	0%
Sumatera Utara	4%	20%	72%	4%	0%
Sumatera Barat	0%	8%	58%	33%	0%
Riau	0%	0%	20%	80%	0%
Jambi	0%	22%	56%	22%	0%
Sumatera Selatan	0%	15%	69%	15%	0%
Bengkulu	0%	22%	67%	11%	0%
Lampung	0%	0%	77%	23%	0%
Kep. Bangka Belitung	0%	0%	67%	17%	17%
Kepulauan Riau	0%	0%	100%	0%	0%
DKI Jakarta	0%	0%	100%	0%	0%
Jawa Barat	0%	0%	56%	44%	0%
Jawa Tengah	0%	0%	79%	21%	0%
DI Yogyakarta	0%	0%	100%	0%	0%
Jawa Timur	0%	0%	86%	14%	0%
Banten	0%	0%	75%	25%	0%
Bali	0%	13%	88%	0%	0%
Nusa Tenggara Barat	0%	0%	88%	13%	0%
Nusa Tenggara Timur	0%	0%	29%	67%	5%
Kalimantan Barat	8%	33%	50%	8%	0%
Kalimantan Tengah	8%	23%	54%	15%	0%
Kalimantan Selatan	0%	0%	100%	0%	0%
Kalimantan Timur	29%	14%	57%	0%	0%
Kalimantan Utara	0%	0%	100%	0%	0%
Sulawesi Utara	0%	0%	36%	45%	18%
Sulawesi Tengah	0%	0%	50%	42%	8%
Sulawesi Selatan	0%	5%	76%	19%	0%
Sulawesi Tenggara	0%	13%	40%	13%	33%
Gorontalo	0%	0%	0%	100%	0%
Sulawesi Barat	0%	17%	50%	33%	0%
Maluku	0%	0%	56%	33%	11%
Maluku Utara	0%	0%	63%	38%	0%
Papua Barat	8%	8%	50%	33%	0%
Papua	4%	11%	82%	4%	0%
<b>Total</b>	<b>2%</b>	<b>7%</b>	<b>65%</b>	<b>24%</b>	<b>3%</b>

Sumber: Hasil analisis, 2019

## Perubahan Status Ketahanan Pangan Kota pada Atlas 2018-2019

Berdasarkan hasil analisis indikator komposit 2019, dari 98 kota sebanyak 1 kota (1%) telah berhasil mengalami peningkatan status ketahanan pangan sebanyak dua tingkat atau lebih yaitu kota Tual yang berada di Provinsi Maluku. Ada 27 kota (28%) yang menunjukkan perbaikan satu tingkat, yang sebagian besar tersebar di Provinsi Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Sementara, 70 kota (71%) tidak mengalami perubahan pada status ketahanan pangan wilayahnya (Tabel 6.6).

Peningkatan status pada daerah-daerah tersebut secara umum disebabkan oleh penurunan persentase pengeluaran pangan >65%, peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih, dan penurunan persentase balita *stunting*. Peningkatan status juga disebabkan oleh perbaikan kondisi indikator pada kota-kota tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota-kota lain. Hal ini menyebabkan secara agregat nilai indeks ketahanan pangannya relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota lainnya diseluruh Indonesia.

Secara khusus, pada kota-kota kelompok rentan (Prioritas 1–3) yang berjumlah 7 kota pada FSVA 2018, terdapat 4 kota (57%) yang mengalami peningkatan sebanyak satu tingkat atau lebih, sedangkan 3 kota (43%) tidak mengalami perubahan status ketahanan pangan wilayah. Kota-kota kelompok tahan Prioritas 4–6 yang berjumlah 91 kota, terdapat 24 kota (26%) mengalami peningkatan sebanyak satu tingkat atau lebih dan 67 kota (74%) tetap status ketahanan pangan wilayahnya.

**Tabel 6.6 Perubahan Tingkat Prioritas Kota per Provinsi 2018 – 2019 (Persentase)**

Provinsi	Penurunan Prioritas 2 tingkat atau lebih	Penurunan Prioritas 1 tingkat	Tidak ada perubahan	Peningkatan Prioritas 1 tingkat	Peningkatan Prioritas 2 tingkat atau lebih
Aceh	0%	0%	40%	60%	0%
Sumatera Utara	0%	0%	63%	38%	0%
Sumatera Barat	0%	0%	86%	14%	0%
Riau	0%	0%	100%	0%	0%
Jambi	0%	0%	100%	0%	0%
Sumatera Selatan	0%	0%	50%	50%	0%
Bengkulu	0%	0%	100%	0%	0%
Lampung	0%	0%	0%	100%	0%
Kep. Bangka Belitung	0%	0%	100%	0%	0%
Kepulauan Riau	0%	0%	50%	50%	0%
DKI Jakarta	0%	0%	100%	0%	0%
Jawa Barat	0%	0%	100%	0%	0%
Jawa Tengah	0%	0%	83%	17%	0%
DI Yogyakarta	0%	0%	100%	0%	0%
Jawa Timur	0%	0%	67%	33%	0%
Banten	0%	0%	50%	50%	0%
Bali	0%	0%	100%	0%	0%
Nusa Tenggara Barat	0%	0%	0%	100%	0%

Provinsi	Penurunan Prioritas 2 tingkat atau lebih	Penurunan Prioritas 1 tingkat	Tidak ada perubahan	Peningkatan Prioritas 1 tingkat	Peningkatan Prioritas 2 tingkat atau lebih
Nusa Tenggara Timur	0%	0%	0%	100%	0%
Kalimantan Barat	0%	0%	100%	0%	0%
Kalimantan Tengah	0%	0%	100%	0%	0%
Kalimantan Selatan	0%	0%	100%	0%	0%
Kalimantan Timur	0%	0%	100%	0%	0%
Kalimantan Utara	0%	0%	100%	0%	0%
Sulawesi Utara	0%	0%	75%	25%	0%
Sulawesi Tengah	0%	0%	100%	0%	0%
Sulawesi Selatan	0%	0%	67%	33%	0%
Sulawesi Tenggara	0%	0%	50%	50%	0%
Gorontalo	0%	0%	100%	0%	0%
Maluku	0%	0%	0%	50%	50%
Maluku Utara	0%	0%	50%	50%	0%
Papua Barat	0%	0%	0%	100%	0%
Papua	0%	0%	100%	0%	0%
<b>Total</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>71%</b>	<b>28%</b>	<b>1%</b>

Sumber: Hasil analisis, 2019

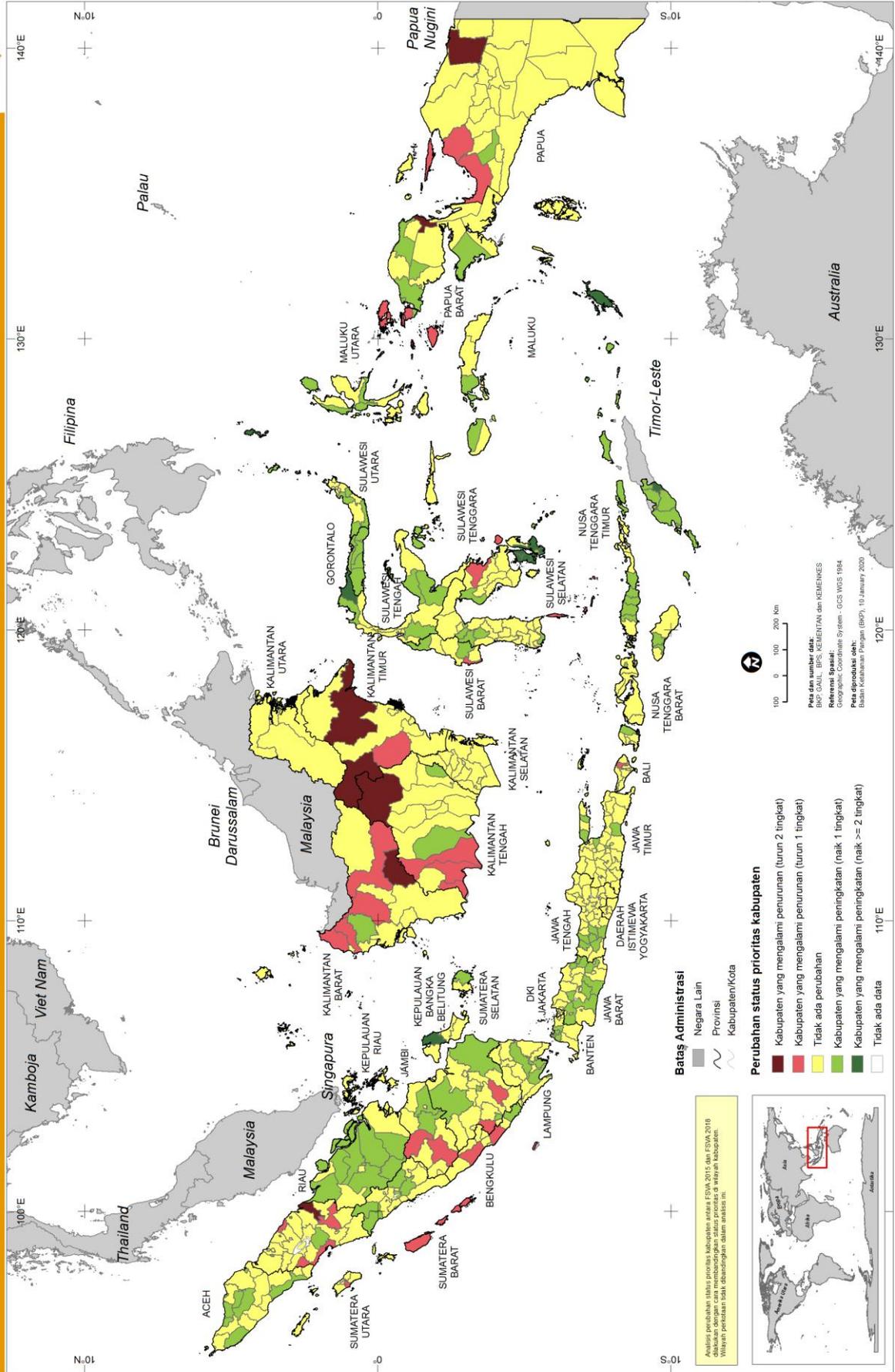
Selama periode 2018-2019 dari total 514 kabupaten/kota, telah terjadi penurunan jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan dari 88 kabupaten/kota (17%) di 2018 menjadi 76 kabupaten/kota (15%) di 2019. Sedangkan untuk kabupaten/kota tahan pangan terjadi kenaikan dari 426 kabupaten/kota (83%) di 2018 menjadi 438 kabupaten/kota (85%) di 2019 (Tabel 6.7).

**Tabel 6.7 Sebaran Kabupaten/Kota per Prioritas 2018-2019**

Prioritas	Jumlah Kabupaten/Kota		Presentase Kabupaten/Kota	
	2018	2019	2018	2019
1	28	26	5%	5%
2	23	20	4%	4%
3	37	30	7%	6%
4	56	43	11%	8%
5	169	126	33%	25%
6	201	269	39%	52%
<b>Total kabupaten/kota</b>	<b>514</b>	<b>514</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



## Peta 6.2 Perubahan status prioritas kabupaten antara FSVA 2018 dan FSVA 2019



## BAB 7

# KERENTANAN PANGAN TRANSIEN

Kerentanan terhadap bencana alam dan gangguan mendadak lainnya dapat mempengaruhi ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah baik bersifat sementara maupun jangka waktu panjang. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara sementara dikenal sebagai kerawanan pangan sementara (*transient food insecurity*). Bencana alam yang terjadi tiba-tiba, maupun perubahan harga atau guncangan terhadap pasar, epidemik penyakit, konflik sosial dan lain-lain dapat menyebabkan terjadinya kerawanan pangan transien (sementara). Kerawanan pangan transien dapat berpengaruh terhadap satu atau semua aspek ketahanan pangan seperti ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan.

Kerawanan pangan transien dapat juga dibagi menjadi dua, yaitu **berulang (cyclical)**, di mana terdapat suatu pola yang berulang terhadap kondisi rawan pangan, misalnya, “musim paceklik” yang terjadi dalam periode sebelum panen dan **temporal (temporary)**, yang merupakan hasil dari suatu gangguan mendadak dari luar pada jangka pendek, seperti kekeringan atau banjir. Konflik sipil juga termasuk dalam kategori guncangan (*shock*) temporal meskipun dampak negatifnya terhadap ketahanan pangan dapat berlanjut untuk jangka waktu lama. Dengan kata lain, kerawanan pangan transien dapat mempengaruhi orang-orang yang berada pada kondisi rawan pangan kronis dan juga orang-orang yang berada pada keadaan tahan pangan.

Di dalam bab ini, kerawanan pangan dianalisis dari segi iklim dan lingkungan. Faktor iklim dan lingkungan serta kemampuan masyarakat untuk mengatasi guncangan sangat menentukan apakah suatu negara atau wilayah dapat mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan dan status gizi masyarakat. Untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kondisi iklim yang mempengaruhi kerawanan pangan transien, empat faktor utama dianalisis dalam FSVA 2019, yaitu: i) Data kejadian bencana alam yang terjadi di tingkat kabupaten; ii) Estimasi kehilangan produksi padi dan jagung akibat banjir dan kekeringan; dan iii) variabilitas curah hujan.

Tinjauan ketahanan pangan dan gizi ini berdasarkan pada dampak dari berbagai bencana alam dan degradasi lingkungan terhadap ketersediaan dan akses pangan. Variabilitas curah hujan dan daerah yang terkena banjir dan tanah longsor merupakan beberapa indikator yang digunakan dalam bab ini untuk menjelaskan kerawanan pangan transien di Indonesia.

### 7.1 Bencana Alam

Sebagai salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia, bencana alam merupakan faktor utama kerawanan pangan transien di Indonesia. Berdasarkan penelitian dari *Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)*, terdapat lima negara (China, India, Amerika Serikat, Indonesia dan Philipina) yang paling sering mengalami bencana alam pada tahun 2018 (Tabel 7.1).

**Tabel 7.1 Negara yang Mengalami Bencana Alam Terbanyak 2018**

Negara	Jumlah Kejadian Utama
China	22
India	22
Amerika Serikat	19
Indonesia	15
Philipina	10
Vietnam	7
Jepang	7
Perancis	7
Afganistan	6
Argentina	5
Myanmar	5

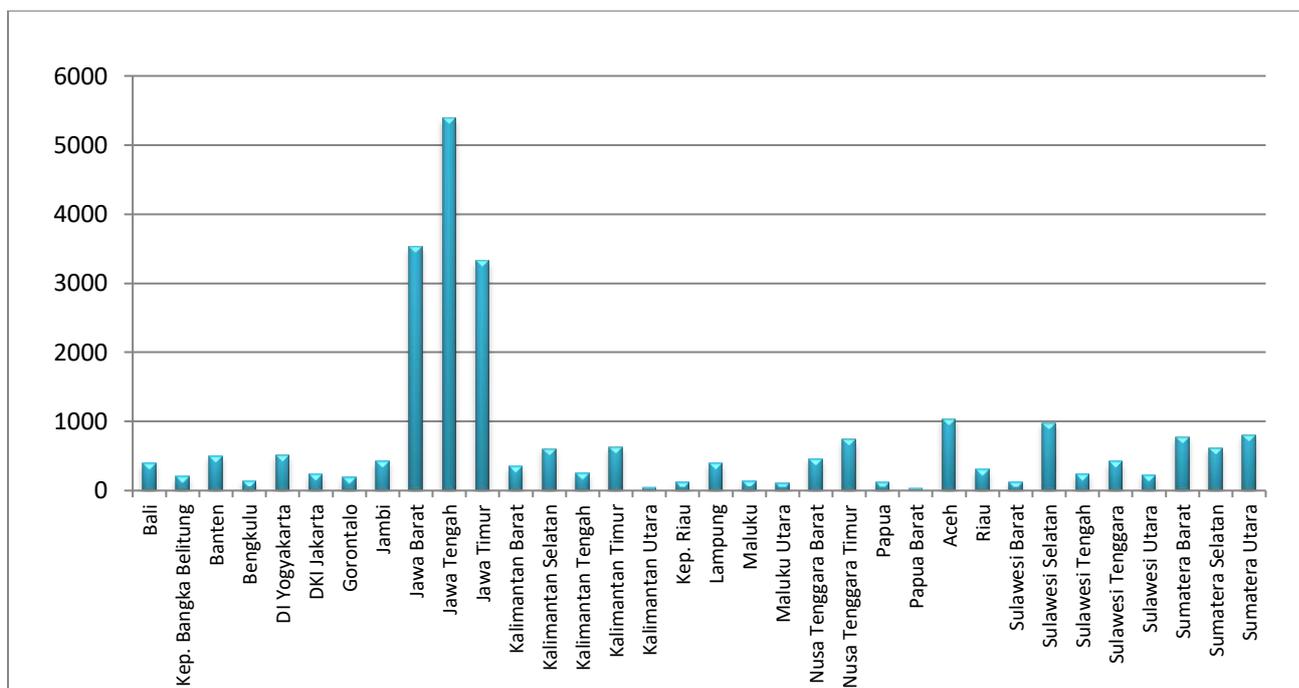
Sumber: Center for Research on the Epidemiology of Disasters, 2018

Berdasarkan data dari pemerintah, terjadi 24.413 bencana alam selama periode tahun 2004-2018 yang telah menyebabkan 185.561 orang meninggal dunia (Tabel 7.2). Data ini mencatat seluruh jenis kejadian bencana yang meliputi banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tsunami, gempa bumi dan tsunami, letusan gunung api, perubahan iklim, hama penyakit tanaman dan kejadian luar biasa (KLB). Pada periode tahun 2004-2018, kejadian bencana alam yang paling sering terjadi adalah banjir, angin puting beliung dan tanah longsor. Sedangkan gempa bumi dan tsunami merupakan kejadian bencana yang paling fatal yang menyebabkan 166.597 orang meninggal. Bencana alam juga berdampak pada rusaknya lahan pertanian. Lahan pertanian yang terdampak oleh bencana alam selama 15 tahun terakhir mencapai 3.058.124 ha. Kejadian bencana alam di Indonesia paling sering terjadi di Jawa Tengah, kemudian diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh dan Sulawesi Selatan (Gambar 7.1).

**Tabel 7.2 Bencana Alam yang Terjadi di Indonesia dan Kerusakannya 2004-2018**

Bencana	Kejadian	Meninggal & Hilang	Luka-luka	Menderita & mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan	Fasilitas Kesehatan Rusak	Fasilitas Pendidikan Rusak	Lahan Pertanian (Ha)	Hutan (ha)
Banjir	8.959	3.886	177.194	27.991.404	91.524	16.792	326.201	1.301	9.632	1.810.423	186.410
Tanah Longsor	5.069	2.642	2.628	270.070	17.322	5.736	21.268	37	238	27.197	1.905
Gelombang Pasang/Abrasi	335	84	235	196.179	4.653	516	5.401	6	30	2.973	128
Puting Beliung	6.562	429	3.325	316.836	51.822	27.050	163.142	106	931	19.650	4.576
Kekeringan	1.935	2	0	11.812.576	0	0	0	0	0	983.473	1.084
Kebakaran Hutan dan Lahan	1.105	36	373	443.451	116	5	14	0	4	72.353	44.163.846
Gempa Bumi	243	9.054	61.103	3.630.784	550.696	49.317	797.778	2.123	22.510	3.127	0
Tsunami	11	1.651	15.086	64.472	3.894	70	1.910	11	17	350	251
Gempa Bumi dan Tsunami	4	166.597	7.539	691.497	213.478	28.899	47.149	425	2.525	133.332	0
Letusan Gunung Api	137	436	3.539	1.113.023	14.888	158	5.726	24	617	5.146	1.842
Perubahan Iklim	1	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hama Penyakit Tanaman	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
KLB	51	649	22.112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>24.413</b>	<b>185.561</b>	<b>293.134</b>	<b>46.530.292</b>	<b>948.393</b>	<b>128.543</b>	<b>1.368.589</b>	<b>4.033</b>	<b>36.504</b>	<b>3.058.124</b>	<b>44.360.042</b>

Sumber: BNPB, 2018



Sumber: BNPB, 2018

**Gambar 7.1 Bencana Alam per Provinsi 2004 – 2018**

## 7.2. Variabilitas Iklim

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau-pulau yang sangat banyak, memiliki letak geografis Indonesia di antara Benua Asia dan Australia serta berada di wilayah Samudera Hindia dan Pasifik dan merupakan negara yang dilalui oleh garis Khatulistiwa. Kondisi fisik wilayah Indonesia ini menyebabkan Indonesia memiliki pola iklim yang bervariasi. Beberapa fenomena dinamika atmosfer dunia sangat mempengaruhi pola dan intensitas cuaca dan iklim di Indonesia, seperti fenomena *El Nino/ La Nina* dan *Dipole Mode*. Selain itu juga dipengaruhi oleh fenomena regional, seperti sirkulasi monsoon Asia-Australia, Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis atau *Inter Tropical Convergence Zone* (ITCZ) yang merupakan daerah pertumbuhan awan, serta suhu permukaan laut sekitar wilayah Indonesia. Kondisi topografi wilayah Indonesia yang bergunung, lembah dan berpantai juga menambah keragaman kondisi iklim di wilayah Indonesia dalam ruang dan waktu.

Parameter iklim utama yang menjadi perhatian di wilayah Indonesia adalah suhu udara dan hujan. Variabilitas suhu udara dan hujan mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi, seperti pertanian, perkebunan dan perikanan. Perubahan suhu udara dan ketersediaan curah hujan dalam kurun waktu musiman sangat mempengaruhi produktivitas dari aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut.

Berdasarkan data observasi BMKG tahun 1981-2018, trend suhu tahunan rata-rata di Indonesia secara keseluruhan memiliki trend positif dengan besaran yang bervariasi. Perubahan suhu udara juga dapat dianalisis dari fenomena anomali suhu. Anomali suhu udara adalah perbandingan suhu udara pada tahun tertentu, relatif terhadap periode normal rentang waktu tahun 1981-2010. Wilayah Indonesia, tahun 2018 mengalami anomali suhu udara sebesar  $0.46^{\circ}\text{C}$  dibandingkan dengan periode normal 1981-2010. Sebagai perbandingan, organisasi meteorologi dunia (WMO) secara global

menempatkan tahun 2016 sebagai tahun terpanas yang pernah dicatat ( $1,2^{\circ}\text{C}$  dibandingkan era pra industri). Disusul dengan tahun 2017 dan 2015 dengan kenaikan  $1,1^{\circ}\text{C}$  dibandingkan era pra industri. Pada tahun 2018, beberapa provinsi yang mengalami anomali suhu udara tertinggi dibandingkan periode normal adalah Sumut  $0,90^{\circ}\text{C}$ , Malut  $0,90^{\circ}\text{C}$ , Banten  $0,77^{\circ}\text{C}$  dan Kalteng  $0,76^{\circ}\text{C}$ .

Sifat hujan tahunan Indonesia dibandingkan dengan rata-rata normal hujan periode 1981-2010 berdasarkan hasil olahan data CHIRPS 1981-2018 diilustrasikan dalam Peta 7.1. Sebagian besar wilayah Indonesia tahun 2018 memiliki sifat hujan normal, kecuali untuk sebagian besar pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dan sedikit di Papua kondisi sifat hujannya di atas normal. Pada periode musiman Desember-Januari-Februari (DJF), sifat hujannya bervariasi namun masih didominasi kondisi sifat hujan normal. Periode Maret-April-Mei (MAM) sifat hujan juga cukup bervariasi. Wilayah Kalimantan yang sebagian besar sifat hujan di bawah normal, namun untuk wilayah Jawa dan Sulawesi didominasi oleh sifat hujan di atas normal. Pada periode Juni-Juli-Agustus (JJA) hampir sebagian besar Indonesia mempunyai sifat hujan di atas normal kecuali pada bagian selatan wilayah Sulawesi memiliki sifat hujan di bawah normal. Periode September-Oktober-November (SON), sifat hujan cukup bervariasi namun pada wilayah Sumatera sebagian besar wilayahnya mempunyai sifat hujan di bawah normal, namun hampir sebagian besar di Jawa dan Sulawesi kondisi sifat hujannya di atas normal.

### 7.3. Kehilangan Produksi yang Disebabkan oleh Kekeringan, Banjir dan Organisme Pengganggu Tanaman

Produksi dan produktivitas tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca. Daerah yang rusak didefinisikan sebagai suatu daerah yang produksi pangannya menurun akibat bencana alam (banjir, kekeringan) dan/atau penularan hama oleh Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Kehilangan produksi pada statistik Indonesia dikategorikan sebagai kehilangan total (puso) dan terdampak (ketika kehilangan kurang dari 50%). Tabel 7.3 menunjukkan proporsi kerusakan tanaman padi dan jagung terhadap luas area tanaman padi dan jagung yang disebabkan oleh banjir, kekeringan dan OPT di setiap provinsi pada periode 2014-2018. Secara nasional, kerusakan tanaman padi dan jagung relatif rendah selama periode tersebut (kurang dari 1% dari total luas tanam setiap tahun), kecuali tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014, kerusakan tanaman padi sebesar 1,31%, dan tahun 2015 kerusakan tanaman padi mencapai 1,79%. Kerusakan areal tanaman padi tahun 2018 (0,59%) lebih kecil dibandingkan tahun 2017 (0,68%), tahun 2015 (1,79%), tahun 2014 (1,31%) dan lebih besar dibandingkan tahun 2016 (0,45%). Pada tahun 2018, tingkat kerusakan terparah tanaman padi ditemukan di Riau (4,70%), Sulawesi Selatan (1,82%), Sulawesi Tenggara (1,47%), Lampung (1,29%) dan Jambi (1,16%). Kerusakan tanaman jagung pada tahun 2018 (0,73%) lebih kecil daripada tahun 2017 (0,18%), tahun 2015 (0,58%), tahun 2014 (0,14%) dan lebih besar dibandingkan tahun 2016 (0,76%). Pada tahun 2018, tingkat kerusakan terparah tanaman jagung terjadi di Jawa Barat (3,84%) yang diikuti Aceh (2,90%), Jambi (2,62%), Kalimantan Tengah (2,52%) dan Jawa Tengah (1,72%).

**Tabel 7.3 Perbandingan Area Puso Padi dan Jagung Akibat Banjir, Kekeringan dan Organisme Pengganggu Tanaman 2014-2018**

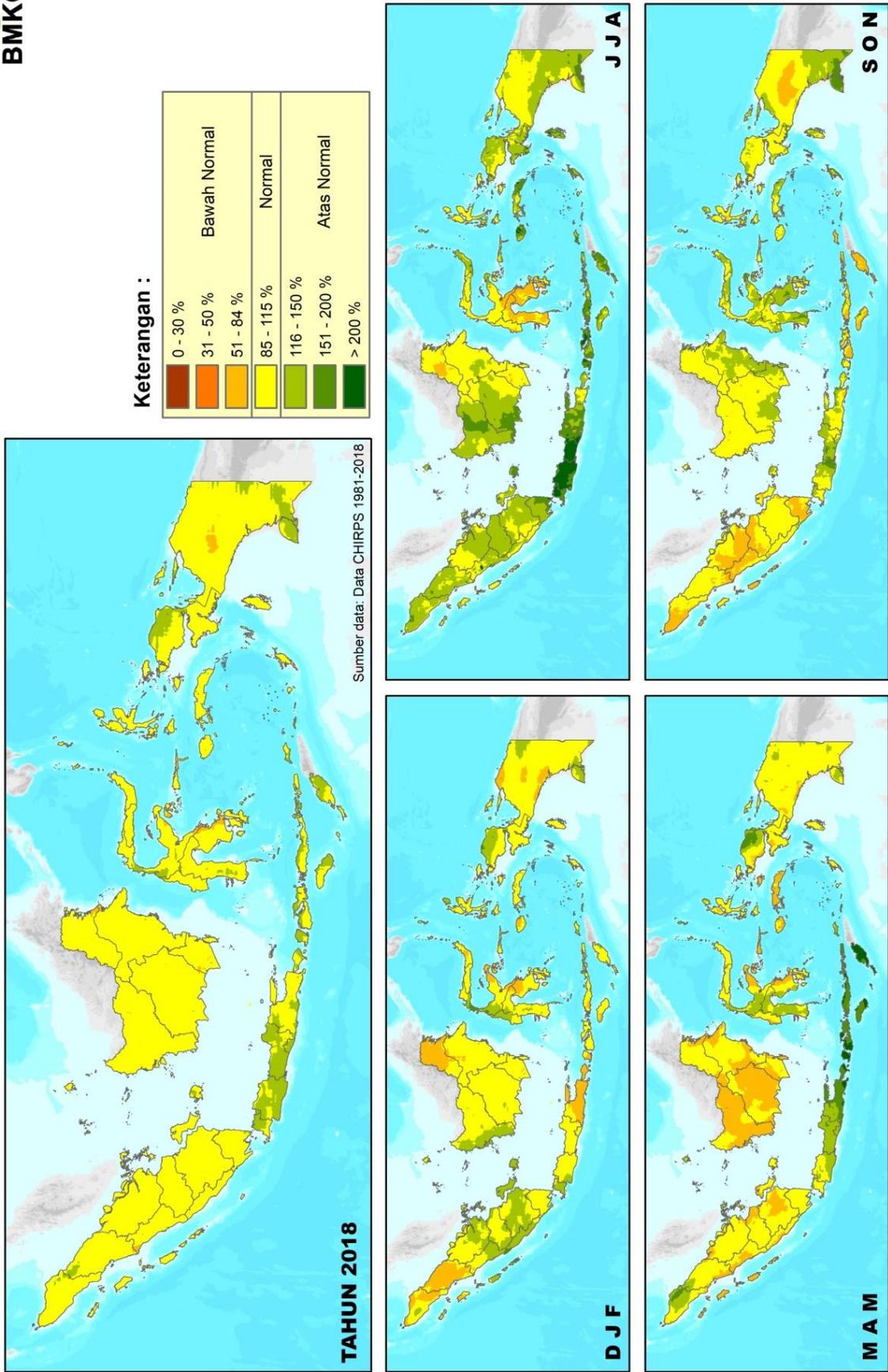
No	Provinsi	Padi (%)					Jagung (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	6,73	1,27	1,44	1,78	0,50	0,99	1,35	0,97	1,23	2,90
2	Sumatera Utara	0,20	0,35	0,27	0,40	0,34	0,04	0,17	1,19	1,19	0,10
3	Sumatera Barat	0,31	0,31	0,47	0,10	0,15	0,03	0,07	0,33	0,23	0,12
4	Riau	1,21	1,11	5,03	0,58	4,70	0,11	2,16	1,05	0,23	0,37
5	Jambi	0,94	4,43	3,81	2,23	1,16	0,78	1,07	2,67	2,33	2,62
6	Sumatera Selatan	0,62	3,22	1,36	0,74	0,20	0,10	1,83	0,26	0,02	0,05
7	Bengkulu	-	0,16	0,01	0,01	0,01	-	0,14	-	-	-
8	Lampung	0,78	2,27	0,07	1,38	1,29	0,00	0,06	0,14	0,01	0,42
9	Bangka Belitung	0,08	2,08	1,88	1,01	0,16	-	6,33	-	-	0,49
10	Kepulauan Riau*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	9,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	2,70	2,61	0,23	0,30	0,39	-	0,01	0,01	0,12	3,84
13	Jawa Tengah	2,12	1,06	0,40	0,47	0,71	0,06	0,04	0,21	0,04	1,72
14	DI Yogyakarta	0,09	0,09	0,07	0,54	0,10	-	0,01	0,78	0,69	0,16
15	Jawa Timur	0,30	0,39	0,21	0,18	0,59	0,07	0,02	0,73	0,05	0,81
16	Banten	1,73	3,77	0,17	0,30	0,43	-	-	-	0,21	1,31
17	Bali	0,05	0,34	0,16	0,12	0,07	0,17	0,03	0,13	0,00	0,24
18	NTB	0,22	0,26	0,29	0,64	0,90	0,00	0,13	0,02	0,08	1,41
19	NTT	0,37	0,01	0,17	0,09	0,02	0,03	0,01	0,45	0,03	0,02
20	Kalimantan Barat	2,05	0,14	0,09	0,02	0,11	-	0,01	-	0,02	0,03
21	Kalimantan Tengah	0,21	0,04	0,24	0,64	0,30	-	0,97	0,04	0,31	2,52
22	Kalimantan Selatan	0,47	1,22	0,78	0,26	0,03	0,05	0,14	0,28	0,09	0,01
23	Kalimantan Timur	0,81	3,83	0,41	1,32	0,45	0,24	-	0,03	-	0,02
24	Kalimantan Utara	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	0,03	0,53	0,00	0,01	0,01	0,01	1,06	0,02	0,00	0,00
26	Sulawesi Tengah	0,69	3,14	0,26	0,24	0,14	0,64	2,32	0,22	0,60	0,03
27	Sulawesi Selatan	0,80	5,15	0,36	3,08	1,82	0,58	1,48	0,20	0,24	1,05
28	Sulawesi Tenggara	2,42	7,49	0,25	1,75	1,47	0,00	0,20	0,04	0,15	1,14
29	Gorontalo	0,56	8,39	1,98	0,67	0,19	1,14	7,03	7,72	0,41	0,04
30	Sulawesi Barat	0,02	2,37	0,14	0,04	0,04	-	0,08	0,21	0,15	0,05
31	Maluku	7,30	2,83	0,06	0,09	0,02	-	-	-	-	0,02
32	Maluku Utara	0,07	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-
33	Papua Barat	0,01	0,04	-	-	0,55	-	-	-	-	0,44
34	Papua	0,20	11,95	-	0,06	0,18	-	-	-	0,10	0,28
<b>Total</b>		<b>1,31</b>	<b>1,79</b>	<b>0,45</b>	<b>0,68</b>	<b>0,59</b>	<b>0,14</b>	<b>0,58</b>	<b>0,76</b>	<b>0,18</b>	<b>0,73</b>

Sumber: Kementerian Pertanian, 2018

\* Provinsi yang mempunyai tingkat kerusakan sangat kecil sehingga dapat diabaikan

Selama periode 2014-2018, puso pada tanaman padi yang disebabkan kekeringan paling banyak terjadi di Sulawesi Selatan (75.828 Ha), Jawa Barat (56.896 Ha), Jawa Tengah (34.951 Ha), Sumatera Selatan (22.357 Ha) dan Jawa Timur (16.616 Ha). Sementara, puso pada tanaman padi yang disebabkan banjir paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat (60.698 Ha), Jawa Tengah (50.939 Ha), Sulawesi Selatan (46.696 Ha), Aceh (40.505 Ha), dan Lampung (28.455 Ha).

**Peta 7.1 Peta Sifat Hujan Indonesia Tahun 2018**

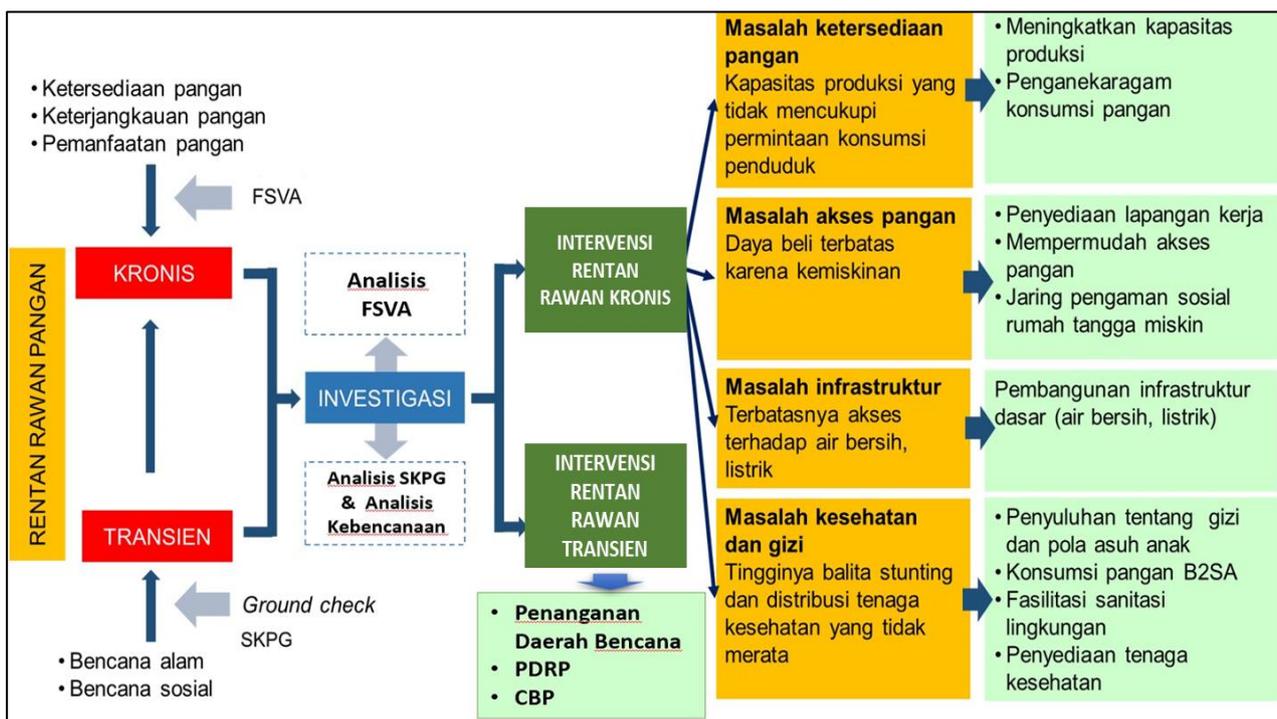


Sumber: BMKG, 2019

# BAB 8

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab terjadinya kondisi rentan rawan pangan di setiap wilayah tentu berbeda-beda, maka intervensi program untuk mencegah dan mengatasinya pun idealnya spesifik lokasi. Namun demikian, pendekatan pengentasan kerentanan pangan secara umum dapat dibedakan antara wilayah kabupaten dan perkotaan. Terdapat beberapa perbedaan karakteristik antara kabupaten dan kota diantaranya: i) luas wilayah kabupaten relatif lebih luas; ii) kepadatan penduduk kota lebih tinggi; iii) mata pencaharian penduduk kabupaten pada umumnya bergerak di sektor agraris, sedangkan penduduk kota di perdagangan dan jasa; iv) tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk kota relatif lebih baik; dan v) rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten relatif lebih rendah dibandingkan kota. Perbedaan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengentasan kerentanan pangan, dengan tetap memperhatikan kesamaan faktor yang menjadi penyebab kerentanan pangan di wilayah masing-masing.



**Gambar 8.1. Kerangka Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan**

Gambar 8.1. menyajikan kerangka pengentasan daerah rentan rawan pangan. Pengentasan daerah rentan pangan harus dilakukan secara holistik berdasarkan faktor yang menyebabkan daerah tersebut masuk ke dalam kategori rentan pangan. Jika permasalahan disebabkan oleh masalah ketersediaan maka perlu upaya-upaya peningkatan produksi. Masalah akses ekonomi/daya beli yang rendah dapat

diatasi dengan penyediaan lapangan kerja atau jaring pengaman sosial. Keterbatasan infrastruktur diatasi dengan pembangunan dan peningkatan fasilitas penunjang seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan gudang untuk penyimpanan stok pangan. Masalah kesehatan dan gizi diatasi dengan penyuluhan tentang gizi, konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman, sanitasi lingkungan serta pemerataan tenaga kesehatan. Sementara itu, penanganan kerentanan pangan transien dapat dilakukan melalui intervensi program pasca bencana, penyaluran cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, serta untuk meningkatkan ketersediaan pangan keluarga.

## 8.1. Wilayah Kabupaten

Hasil analisis komposit ketahanan pangan terhadap 416 kabupaten menunjukkan 25 kabupaten termasuk dalam Prioritas 1 (6%), 19 kabupaten pada Prioritas 2 (5%), 27 kabupaten pada Prioritas 3 (6%), 38 kabupaten pada Prioritas 4 (9%), 106 kabupaten pada Prioritas 5 (25%) dan 201 kabupaten pada Prioritas 6 (48%). Total kabupaten Prioritas 1-3 (rentan terhadap kerawanan pangan) berjumlah 71 kabupaten. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kawasan Timur Indonesia memiliki tingkat kerentanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan Kawasan Barat Indonesia. Begitu pula daerah kepulauan memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan daerah bukan kepulauan.

Fokus lokasi pengentasan kerentanan pangan di wilayah kabupaten berdasarkan FSVA 2019 direkomendasikan tetap diprioritaskan pada:

- a. Kabupaten-kabupaten yang terletak di Kawasan Timur Indonesia dengan daerah rentan rawan pangan terbesar
- b. Kabupaten-kabupaten di kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- c. Kabupaten-kabupaten yang lokasinya jauh dari ibu kota provinsi atau di wilayah yang berbatasan dengan provinsi/negara lain yang memiliki tingkat ketahanan pangan lebih rendah dibandingkan kabupaten lain.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerentanan pangan di setiap kabupaten tidak selalu sama, oleh karena itu diperlukan pendekatan/program yang spesifik agar menjadi solusi yang tepat terhadap kondisi setempat. FSVA menampilkan indikator utama yang menyebabkan wilayah kabupaten/kota tersebut menjadi rentan rawan pangan sehingga peta tersebut digunakan sebagai dasar menentukan program ketahanan pangan sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Kabupaten-kabupaten dalam kelompok rentan rawan pangan Prioritas 1-3 (71 kabupaten) diindikasikan oleh: i) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, ii) tingginya prevalensi balita *stunting*, iii) tingginya penduduk miskin, iv) tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih, dan v) tingginya rasio penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan wilayah kabupaten rentan rawan pangan dapat diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra pangan dengan mengoptimalkan lahan marginal dan ruang terbuka untuk produksi sesuai potensi sumberdaya lokal.

- b. Sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak; penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan sanitasi untuk menurunkan prevalensi *stunting* dan peningkatan gizi masyarakat.
- c. Penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah untuk menurunkan kemiskinan.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Pemerataan penyediaan tenaga kesehatan
- f. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan secara umum ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di kabupaten seperti digambarkan pada Gambar 8.2.



**Gambar 8.2 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Kabupaten**

## 8.2. Wilayah Perkotaan

Hasil analisis komposit ketahanan pangan dari 98 kota, total kota rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) berjumlah 5 kota, sedangkan kota tahan pangan (Prioritas 4-6) berjumlah 93 kota. Secara khusus, kota-kota di Prioritas 1 – 3 diindikasikan oleh: i) tingginya prevalensi balita *stunting*, ii) tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih, iii) tingginya penduduk miskin, iv) tingginya rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan >65% terhadap total pengeluaran, dan v) rendahnya angka harapan hidup.

Fokus lokasi pengentasan kerentanan pangan di wilayah perkotaan diprioritaskan pada:

- Kota-kota yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan terutama dalam hal stabilisasi pasokan dan daya beli masyarakat.
- Kota-kota yang memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan pangan dikarenakan oleh pemahaman/pengetahuan yang terbatas ataupun karena buruknya sanitasi.

Program-program pengentasan kerentanan pangan di daerah perkotaan diarahkan pada kegiatan:

- Penanganan balita *stunting* melalui intervensi program gizi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif. Intervensi spesifik dilakukan untuk mendukung kesehatan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) diantaranya adalah melalui pemberian vitamin yang dilengkapi zat besi, yodium, asam folat untuk ibu hamil; mendukung pemberian ASI eksklusif bayi usia 0-6 bulan; dan pemberian MP ASI untuk anak usia 7-23 bulan. Intervensi gizi sensitif yang diarahkan untuk penyediaan bahan pangan yang cukup dan beragam, akses air bersih, sanitasi, akses layanan kesehatan, pendidikan gizi, jaring pengaman sosial, dan peningkatan pendapatan keluarga.
- Sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
- Peningkatan akses terhadap air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih.
- Peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan daya beli.
- Peningkatan sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui sosialisasi dan penyuluhan.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan secara umum ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di perkotaan seperti digambarkan pada Gambar 8.3.



**Gambar 8.3 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Kota**

### 8.3. Kerja Sama Lintas Progam dan Lintas Sektor

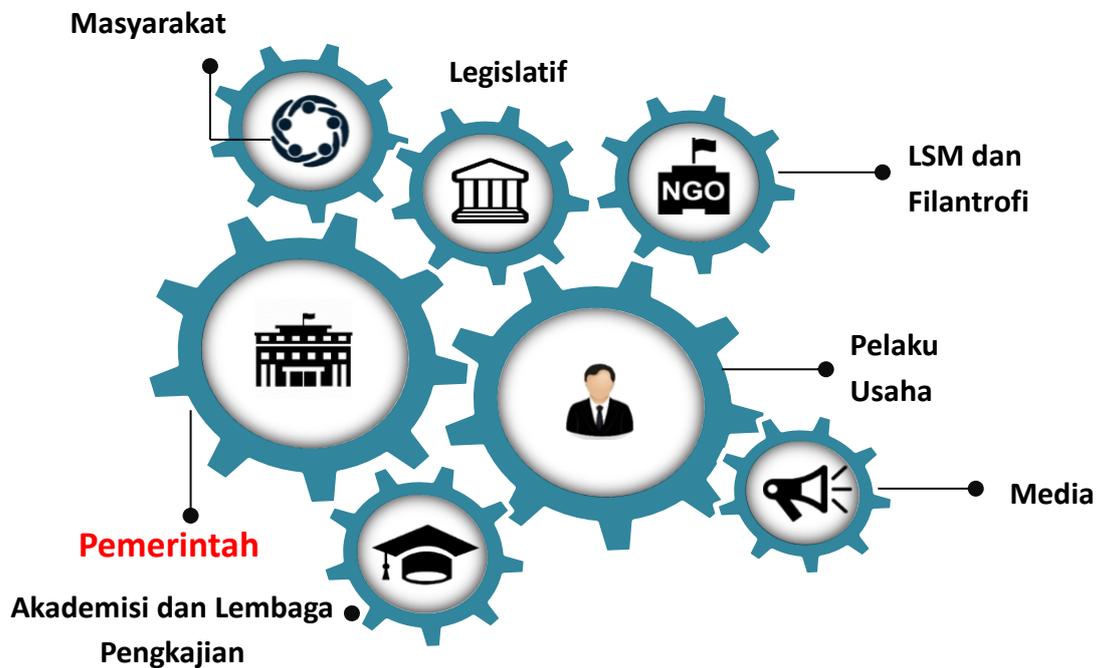
Menurunkan tingkat kerentanan pangan dan gizi merupakan tantangan yang besar bagi pihak perencana dan pengambil kebijakan karena masalah kerentanan pangan dan gizi merupakan permasalahan multi-efek, tidak hanya masalah satu sektor, tetapi meliputi aspek dari hulu hingga hilir. Dukungan dan partisipatif aktif seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah daerah, lembaga legislatif, pelaku usaha, filantropi, LSM, media, akademisi dan lembaga pengkajian serta komunitas madani di pusat dan daerah) perlu disinergikan sehingga ketahanan pangan secara berkelanjutan dapat terwujud.

Dalam rangka pengentasan daerah rentan rawan pangan secara bersinergi pada tanggal 30 Oktober 2019 telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS): Sinergi Dukungan Program Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan oleh 8 pihak yaitu Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian; Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan; Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial; Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan Kepala Pusat Laboratorium Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Dukungan Program Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan tersebut menjadi titik awal keterpaduan program lintas sektor untuk melaksanakan tugas negara yaitu mengentaskan masyarakat Indonesia dari kerawanan pangan, kemiskinan, dan *stunting*.

Inisiasi yang telah dilakukan di tingkat pusat perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, tidak hanya melibatkan komponen pemerintah saja tetapi juga akademisi, swasta, dan seluruh komponen masyarakat. Dengan upaya tersebut, diharapkan program pengentasan daerah rentan rawan pangan dan *stunting* dilakukan secara lebih massif dan terarah sampai tingkat administrasi terendah yaitu desa. Kerja sama lintas program dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan tenaga kerja serta mempercepat pencapaian tujuan akhir yang ingin dicapai.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi yang dilakukan harus mampu meningkatkan ketersediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan layanan kesehatan dan meningkatkan gizi masyarakat untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan sesuai amanat UU Pangan No. 18 Tahun 2012.

## PARTISIPASI AKTIF SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN



Gambar 8.4 Peran Aktif Pemangku Kepentingan dalam Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2015. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- Anonim. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. Pembangunan Kependudukan (disampaikan pada acara peluncuran buku Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2015-2045). Jakarta: Bappenas.
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2016. Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020. Jakarta: Bappenas.
- Benta A Abuya, James Ciera and Elizabeth Kimani-Murage. 2012. Effect of mother's education on child's nutritional status in the slums of Nairobi. *BMC Pediatrics* 12:80.
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2019. Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan. Jakarta: BKP.
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2017. Neraca Bahan Makanan 2017. Jakarta: BKP.
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2016. Persentase Penduduk Berdasarkan Konsumsi Total. Jakarta (ID): BKP.
- [BMKG] Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. 2018. Analisis Perubahan Iklim. Jakarta: BMKG.
- [BNPb] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2018. Data dan Informasi. Jakarta: BNPb.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Hasil Kerangka Sampling Area (KSA). Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Nilai Tukar Usaha Pertanian. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Hasil Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Indonesia. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2017. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Produksi Pangan 2008-2017. Statistik Indonesia. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta: BPS.
- Burger SE. and Esrey SA. 1995. Water and sanitation: health and nutrition benefits to children. In Pinstруп-Andersen P, Pelletier D, and Alderman H, editor. *Child Growth and Nutrition in Developing Countries*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- [CBD] Convention on Biological Diversity. 2018. Indonesia – Country Profile. [online] <https://www.cbd.int/countries/profile/default.shtml?country=id>. (diakses pada 3 Oktober 2018).
- [CRED] Centre for Research on the Epidemiology of Disaster. 2018. Natural Disaster 2018. Belgium: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Institute Health and Society UClouvain.

Cleland JG, Van Ginneken JK. 1988. *Maternal education and child survival in developing countries: the search for pathways of influence*. SocSci Med. 27 (12): 1357-1368. 10.1016/0277-9536(88)90201-8.

[DKP dan WFP] Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2015. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015. Jakarta (ID): DKP dan WFP.

Desai S, Alva S. 1998. *Maternal education and child health: is there a strong causal relationship?*. Demography. 35 (1): 71-81. 10.2307/3004028. [View ArticlePubMedGoogle Scholar](#).

[EIU] The Economist Intelligence Unit. 2018. *Global Food Security Index 2018. Building Resilience in the Face of Rising Food-Security Risks*. Dupont (GB): London.

[EIU] The Economist Intelligence Unit. 2017. *Global Food Security Index 2017, Measuring Food Security and The Impact of Resources Risks*. Dupont (GB): London.

[EIU] The Economist Intelligence Unit. 2016. *Global Food Security Index 2016 an Annual Measure of The State of Global Food Security*. Dupont (GB): London.

Frost MB, Forste R, Haas DW. 2005. *Maternal education and child nutritional status in Bolivia: finding the links*. SocSci Med. 60 (2): 395-407. 10.1016/j.socscimed.2004.05.010.

Goodridge P. 2007. Method explained index number, economic and labour. *Market Review*. 1(3): 54-57.

[HLPE] High Level Panel of Experts. 2011. *Price volatility and foodsecurity. A report by the HighLevel Panel of Experts on Food Security and Nutrition of theCommittee on World FoodSecurity*. Rome.

[IFPRI] International Food Policy Research Institute. 2014. *Global Hunger Index: The Inequalities of Hunger*. Washington DC (US): IFPRI.

[Kementan] Kementerian Pertanian. 2019. *Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2018*. Jakarta: Kementan.

[Kementan] Kementerian Pertanian. 2018. *Data Luas Puso Padi dan Jagung 2014-2018*. Jakarta: Kementan.

[Kemenkes] Kementerian Kesehatan. 2018. *Pemantauan Status Gizi*. Jakarta: Kemenkes.

[Kemenkes] Kementerian Kesehatan. 2018. *Riset Kesehatan Dasar 2018*. Jakarta: Kemenkes.

Kavosi E, Rostami ZH, Kavosi Z, Nasihatkon A, Moghadami M, Heidari M. 2014. *Prevalence and determinants of under-nutrition among children under six: a cross-sectional survey in Fars province*. Int J Health Policy Manag. 3(2):71-76.

Khan REA and Gill AR. 2009. *Determinants of food security in rural areas of Pakistan*. MPRAPaper No. 17146.

Mongabay. 2018. *The top 10 most biodiverse countries*. [online] <https://news.mongabay.com/2016/05/top-10-biodiverse-countries/> (diakses pada 3 Oktober 2018)

[Pusdatin] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2017. *Data Produksi Tanaman Pangan*. Jakarta: Pusdatin.

[Pemprov NTT, DKP, WFP] Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Ketahanan Pangan, dan World Food Programme. 2015. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015. Jakarta: Pemprov NTT, DKP dan WFP.

Sofiati EL. 2010. Analisis kerawanan pangan di tingkat kecamatan Kota Bogor. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

[TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2018. 160 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Stunting Tahun 2019. Jakarta: TNP2K.

The Lancet. 2013. Executive Summary of The Lancet Maternal and Child Nutrition Series. [www.thelancet.com](http://www.thelancet.com)

Thomas D and Strauss J. 1992. Prices, infrastructure, household characteristics and child height. *J Dev Econ.* 39(2):301-331.

[WHO] World Health Organization. 2000. *Classification of Severity of Malnutrition in a Community for Children Under 5 Years of Age from 'The Management of Nutrition in Major Emergencies'*. Geneva: WHO.



## Lampiran I. Data Indikator Individu dan Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Wilayah Kabupaten

No.	Kabupaten	N CPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
<b>Aceh</b>											
1	Simeulue	0,82	19,78	50,05	1,43	29,35	65,00	2,28	8,90	47,31	5
2	Aceh Singkil	5,00	21,25	31,52	0,29	46,01	67,16	2,93	8,33	26,94	2
3	Aceh Selatan	0,69	14,01	55,21	0,75	50,19	64,02	5,64	8,50	35,93	5
4	Aceh Tenggara	0,41	14,29	50,21	0,86	37,51	67,77	4,84	9,18	45,30	5
5	Aceh Timur	0,42	14,49	43,55	0,68	41,64	68,44	3,20	8,18	42,80	5
6	Aceh Tengah	0,88	15,58	35,06	0,16	39,50	68,62	3,82	9,77	39,80	5
7	Aceh Barat	0,68	19,31	40,58	1,45	29,88	67,72	2,75	9,32	32,63	5
8	Aceh Besar	0,48	14,47	36,78	1,03	11,35	69,59	1,72	9,82	38,72	6
9	Pidie	0,32	20,47	49,49	0,68	40,67	66,68	1,20	8,96	36,16	5
10	Bireuen	0,51	14,31	50,14	0,54	39,74	70,92	0,71	9,32	40,97	6
11	Aceh Utara	0,31	18,27	57,97	0,00	45,94	68,61	1,54	8,39	32,53	5
12	Aceh Barat Daya	0,35	17,10	57,39	1,96	55,03	64,65	2,55	8,59	35,41	5
13	Gayo Lues	0,44	20,70	26,80	0,62	27,56	65,12	6,57	7,65	44,40	5
14	Aceh Tamiang	1,01	14,21	29,25	0,33	22,92	69,28	2,51	8,92	33,42	6
15	Nagan Raya	0,64	18,97	37,73	0,72	35,98	68,89	4,85	8,15	40,56	5
16	Aceh Jaya	0,49	14,16	50,78	1,36	24,51	66,88	8,45	8,60	34,00	6
17	Bener Meriah	3,47	20,13	29,41	0,53	39,69	68,99	1,72	9,65	45,95	3
18	Pidie Jaya	0,30	20,17	49,76	0,99	28,96	69,81	1,37	9,03	36,80	6
<b>Sumatera Utara</b>											
19	Nias	0,85	16,37	57,98	33,47	78,73	69,43	2,23	4,91	61,32	4
20	Mandailing Natal	0,91	9,58	55,17	8,48	59,78	62,24	17,02	8,38	48,30	4
21	Tapanuli Selatan	0,52	9,16	59,05	5,61	44,80	64,55	8,33	8,77	28,76	5
22	Tapanuli Tengah	1,56	13,17	56,09	6,31	53,43	66,82	2,04	8,24	43,69	4
23	Tapanuli Utara	0,43	9,75	58,82	1,20	44,61	68,11	2,62	9,53	38,26	6
24	Toba Samosir	0,23	8,67	45,85	3,33	28,61	69,59	2,33	10,14	29,74	6
25	Labuhan Batu	2,58	8,61	34,95	3,79	36,88	69,60	2,41	9,06	36,38	4
26	Asahan	2,13	10,25	31,48	0,29	18,22	67,79	2,65	8,71	24,87	5
27	Simalungun	0,38	9,31	39,27	0,44	40,42	70,75	1,64	9,31	28,43	6
28	Dairi	0,45	8,20	62,36	1,16	37,03	68,41	1,40	9,16	40,17	6
29	Karo	0,39	8,67	53,54	1,39	28,52	70,97	2,04	9,53	29,59	6
30	Deli Serdang	1,18	4,13	23,72	0,11	18,31	71,31	0,61	9,98	25,68	6
31	Langkat	1,15	10,20	35,37	0,17	26,15	68,22	3,67	8,61	31,64	6
32	Nias Selatan	1,29	16,65	42,59	26,38	65,40	68,24	1,47	5,69	45,06	4
33	Humbang Hasundutan	0,41	9,00	47,79	1,37	59,03	68,69	5,94	9,11	41,33	5
34	Pakpak Barat	1,06	9,74	49,05	2,67	65,32	65,27	4,74	8,24	45,58	4
35	Samosir	0,54	13,38	61,97	0,68	59,01	70,87	4,24	9,07	24,37	5
36	Serdang Bedagai	0,26	8,22	40,16	0,51	31,46	68,08	1,43	8,71	35,99	6
37	Batu Bara	1,08	12,57	42,72	0,41	25,83	66,38	1,51	8,04	23,72	5
38	Padang Lawas Utara	2,24	10,06	47,21	7,37	51,90	66,77	5,12	9,01	47,53	4
39	Padang Lawas	1,68	8,41	46,74	7,45	51,21	66,69	4,44	8,95	42,89	4

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
40	Labuhan Batu Selatan	5,00	10,00	37,93	1,46	36,14	68,39	4,22	8,96	34,88	2
41	Labuhan Batu Utara	0,84	10,12	41,39	3,97	32,87	69,09	2,42	8,46	31,23	6
42	Nias Utara	1,53	26,56	51,92	27,92	65,80	68,98	2,91	5,92	45,46	3
43	Nias Barat	2,56	26,72	47,44	18,07	83,03	68,50	0,73	6,19	45,86	2
<b>Sumatera Barat</b>											
44	Kepulauan Mentawai	5,00	14,44	65,01	23,65	59,79	64,49	19,25	7,38	32,40	1
45	Pesisir Selatan	0,36	7,59	33,64	1,69	28,71	70,45	6,68	8,41	26,54	6
46	Solok	0,40	8,88	46,20	2,70	30,14	67,95	3,95	8,39	41,46	6
47	Sawah Lunto/Sijunjung	0,72	7,11	35,67	3,54	29,80	65,69	6,48	8,11	35,00	6
48	Tanah Datar	0,29	5,32	36,62	1,04	19,86	69,38	1,74	8,76	26,27	6
49	Padang Pariaman	0,45	8,04	39,54	1,73	39,31	68,23	1,36	7,94	26,09	6
50	Agam	0,38	6,76	36,56	1,25	36,07	71,83	2,86	8,97	30,04	6
51	Limapuluh Koto	0,31	6,99	41,72	0,99	39,94	69,47	4,98	8,17	40,13	6
52	Pasaman	0,28	7,31	47,53	2,21	29,48	66,82	4,88	8,00	40,56	6
53	Solok Selatan	0,37	7,07	30,87	1,64	39,64	67,21	5,49	8,57	27,72	6
54	Dharmas Raya	1,13	6,42	25,13	0,79	38,51	70,73	5,54	8,35	30,34	6
55	Pasaman Barat	0,52	7,34	40,67	1,35	42,63	67,37	3,97	8,14	35,10	6
<b>Riau</b>											
56	Kuantan Sengingi	1,24	9,92	24,87	1,75	29,46	68,17	5,14	8,59	24,61	6
57	Indragiri Hulu	4,41	6,30	18,30	1,51	22,39	69,97	5,76	8,41	32,21	4
58	Indragiri Hilir	1,12	7,05	38,86	9,76	80,00	67,32	7,51	7,39	32,20	4
59	Pelalawan	3,01	9,73	15,51	2,20	21,52	70,74	9,23	8,67	25,51	5
60	Siak	2,26	5,44	14,86	1,55	16,05	70,79	7,70	9,56	20,96	6
61	Kampar	3,37	8,18	30,94	0,67	30,34	70,35	4,95	8,62	32,05	4
62	Rokan Hulu	5,00	10,95	25,82	1,58	23,61	69,55	6,56	8,36	27,25	3
63	Bengkalis	4,13	6,22	17,71	1,66	38,30	70,85	5,03	9,24	32,27	4
64	Rokan Hilir	1,73	7,06	31,11	3,18	42,79	69,87	4,95	8,35	38,08	5
65	Kepulauan Meranti	2,32	27,79	26,99	10,03	90,23	67,21	4,28	7,73	29,87	3
<b>Jambi</b>											
66	Kerinci	0,34	7,07	30,35	2,51	27,86	69,65	5,10	8,09	42,36	6
67	Merangin	1,16	8,88	26,66	2,63	51,54	71,04	5,24	7,77	34,97	5
68	Sarolangun	2,09	8,73	28,08	4,61	49,63	68,94	5,89	7,74	18,83	5
69	Batanghari	0,93	10,23	35,11	1,93	46,89	70,26	4,92	8,06	32,76	5
70	Muara Jambi	1,72	4,05	36,01	2,25	36,24	71,02	5,27	8,40	20,68	5
71	Tanjung Jabung Timur	0,51	12,38	33,88	2,59	74,25	65,86	6,41	6,68	40,89	5
72	Tanjung Jabung Barat	0,90	11,10	41,64	6,81	61,18	67,87	4,07	7,87	43,99	5
73	Tebo	1,53	6,58	31,69	3,48	38,09	69,77	10,06	7,58	33,03	5
74	Bungo	1,93	5,78	32,84	2,46	36,27	67,42	2,87	8,13	20,74	5
<b>Sumatera Selatan</b>											
75	Ogan Komering Ulu	2,35	12,61	28,88	0,84	38,48	67,83	1,83	8,80	33,19	4
76	Ogan Komering Ilir	0,38	15,28	27,15	1,18	40,46	68,22	7,56	7,11	30,62	6
77	Muara Enim (Liot)	1,32	12,56	31,62	0,54	34,37	68,38	3,71	7,87	34,37	5
78	Lahat	0,81	16,15	34,73	0,72	56,30	65,50	5,47	8,60	48,12	5

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
79	Musi Rawas	0,43	13,76	17,99	0,21	40,48	67,59	4,43	7,43	34,56	6
80	Musi Banyuasin	0,67	16,52	20,46	1,71	34,53	68,33	7,97	7,46	31,07	6
81	Banyuasin	0,16	11,32	23,73	1,97	55,51	68,55	7,21	7,37	29,30	6
82	Ogan Komering Ulu Selatan	0,70	10,64	46,44	6,49	58,40	66,49	4,69	8,09	26,39	5
83	Ogan Komering Ulu Timur	0,18	10,57	27,97	0,43	40,94	68,65	1,50	7,68	27,16	6
84	Ogan Ilir	0,39	13,19	31,68	1,63	41,71	64,96	1,73	7,85	43,92	5
85	Empat Lawang	0,80	12,25	42,90	4,15	73,97	64,56	3,81	7,32	36,02	4
86	Penukal Abab Lematang Ilir	1,26	13,81	19,75	0,42	38,54	67,88	2,27	6,40	39,50	5
87	Musi Rawas Utara	1,98	19,12	37,59	5,52	46,55	65,21	8,63	6,59	33,24	4
<b>Bengkulu</b>											
88	Bengkulu Selatan	0,45	18,65	32,67	1,33	59,92	67,45	1,17	9,36	33,74	5
89	Rejang Lebong	0,89	16,23	28,96	5,13	59,64	67,95	1,79	8,26	26,01	5
90	Bengkulu Utara	1,62	11,81	34,89	1,64	63,03	67,67	3,27	7,81	26,81	4
91	Kaur	0,67	19,40	35,16	1,24	56,11	66,15	4,39	8,65	34,26	5
92	Seluma	0,81	19,60	32,95	3,67	66,46	67,14	2,92	7,97	35,90	4
93	Mukomuko	1,46	11,40	30,32	0,58	39,46	66,16	4,47	7,95	33,15	5
94	Lebong	0,73	11,59	48,95	2,69	42,68	62,73	4,52	7,99	26,06	5
95	Kepahiang	1,10	14,42	22,52	1,98	43,70	67,39	1,03	8,16	36,67	5
96	Bengkulu Tengah	1,18	8,20	33,86	1,39	50,74	67,82	2,21	7,47	23,27	5
<b>Lampung</b>											
97	Lampung Barat	0,77	13,54	29,30	2,20	40,38	67,09	2,46	7,89	32,96	5
98	Tanggamus	0,77	12,48	28,17	0,43	34,33	68,04	1,44	7,32	29,87	6
99	Lampung Selatan	0,39	14,86	35,46	0,00	28,47	68,87	0,49	7,61	29,09	6
100	Lampung Timur	0,14	15,76	25,02	0,00	57,76	70,31	3,30	7,62	24,71	6
101	Lampung Tengah	0,16	12,62	31,42	0,35	48,59	69,46	1,96	7,60	25,32	6
102	Lampung Utara	0,12	20,85	38,86	0,66	76,69	68,71	0,93	8,50	26,64	5
103	Way Kanan	0,27	13,52	37,29	0,56	72,76	68,95	1,80	7,18	36,07	5
104	Tulang Bawang	0,21	9,70	24,94	2,52	30,15	69,59	2,27	7,66	32,49	6
105	Pesawaran	0,44	15,97	38,49	0,31	36,71	68,53	1,88	7,73	27,50	6
106	Pringsewu	0,52	10,50	26,81	0,15	19,70	69,44	0,35	8,28	20,19	6
107	Mesuji	0,48	7,55	23,52	0,00	23,97	67,71	3,14	6,88	28,16	6
108	Tulang Bawang Barat	0,10	8,10	20,80	0,00	62,24	69,56	1,08	7,02	27,20	6
109	Pesisir Barat	0,48	14,98	45,89	1,75	49,89	62,85	3,50	8,12	24,43	5
<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>											
110	Bangka	3,12	5,47	14,79	0,30	20,15	70,73	0,26	8,38	23,91	5
111	Belitung	5,00	7,56	10,70	0,37	16,30	70,64	0,39	8,24	19,90	3
112	Bangka Barat	4,24	3,05	14,53	1,22	23,93	69,73	0,50	7,58	33,27	4
113	Bangka Tengah	5,00	5,81	18,93	0,35	20,47	70,78	0,45	7,28	26,09	3
114	Bangka Selatan	3,15	3,70	26,21	0,00	25,46	67,47	0,84	6,81	26,92	4
115	Belitung Timur	5,00	7,06	14,44	1,43	17,75	71,59	0,60	8,30	14,72	4
<b>Kepulauan Riau</b>											
116	Karimun	5,00	6,90	17,97	1,15	18,22	70,52	1,46	7,84	31,59	3
117	Bintan	5,00	6,61	13,46	2,72	38,45	70,21	2,03	8,22	21,48	3

No.	Kabupaten	N CPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
118	Natuna	5,00	4,68	19,75	1,42	13,09	64,57	3,31	8,82	22,17	3
119	Lingga	5,00	13,55	23,34	1,79	22,47	61,44	4,23	6,62	22,03	2
120	Kepulauan Anambas	5,00	6,93	18,35	3,02	51,18	66,91	1,19	6,92	26,09	2
<b>DKI Jakarta</b>											
121	Kep. Seribu	5,00	11,98	67,92	0,00	9,49	68,27	0,05	9,67	27,12	3
<b>Jawa Barat</b>											
122	Bogor	2,39	7,14	35,48	0,00	36,61	70,86	0,53	7,94	32,86	5
123	Sukabumi	0,75	6,76	52,99	0,35	49,30	70,49	1,18	7,05	41,35	5
124	Cianjur	0,56	9,81	46,85	0,09	46,04	69,70	1,37	7,14	33,51	6
125	Bandung	1,83	6,65	30,64	0,00	18,54	73,26	0,61	8,60	35,21	6
126	Garut	0,48	9,27	58,77	0,11	42,71	71,03	0,87	7,68	34,64	6
127	Tasikmalaya	0,52	9,85	58,30	0,07	51,69	68,96	1,19	7,31	33,80	5
128	Ciamis	0,63	7,22	29,46	0,07	39,12	71,32	0,81	7,70	33,39	6
129	Kuningan	0,46	12,22	54,11	0,00	23,95	73,11	0,47	7,60	28,68	6
130	Cirebon	0,70	10,70	47,64	0,15	22,98	71,66	0,30	6,77	33,70	6
131	Majalengka	0,37	10,79	49,86	0,00	23,85	69,68	0,54	6,95	36,62	6
132	Sumedang	0,48	9,76	31,62	0,15	31,34	72,14	0,89	8,37	32,22	6
133	Indramayu	0,23	11,89	51,16	0,00	13,12	71,11	1,06	5,54	33,98	6
134	Subang	0,29	8,67	39,22	0,00	32,90	71,92	0,88	6,84	28,64	6
135	Purwakarta	0,84	7,99	28,81	0,00	37,84	70,61	0,56	7,96	41,01	6
136	Karawang	0,39	8,06	35,17	0,16	20,61	71,81	0,39	7,54	33,11	6
137	Bekasi	1,17	4,37	21,07	0,15	9,73	73,43	0,36	9,01	26,37	6
138	Bandung Barat	1,41	10,06	33,78	0,00	31,47	72,03	0,81	8,03	36,69	5
139	Pangandaran	0,35	8,12	27,75	0,00	30,73	70,84	1,32	7,77	32,71	6
<b>Jawa Tengah</b>											
140	Cilacap	0,38	11,25	26,59	0,20	27,72	73,39	0,77	6,74	32,10	6
141	Banyumas	0,89	13,50	25,41	0,00	26,71	73,45	0,29	7,54	32,02	6
142	Purbalingga	0,77	15,62	30,12	0,17	23,05	72,98	0,40	7,14	28,88	6
143	Banjarnegara	0,88	15,46	31,95	0,15	38,97	73,91	0,65	6,46	24,08	6
144	Kebumen	0,43	17,47	34,86	0,00	39,12	73,11	0,46	7,30	33,89	6
145	Purworejo	0,42	11,67	31,48	0,56	31,26	74,40	0,57	7,46	23,33	6
146	Wonosobo	0,80	17,58	29,85	0,12	12,68	71,46	0,78	7,00	31,49	6
147	Magelang	0,85	11,23	27,21	0,32	30,15	73,47	0,81	7,63	33,95	6
148	Boyolali	0,55	10,04	16,76	0,00	32,01	75,79	0,54	7,32	28,51	6
149	Klaten	0,52	12,96	38,54	0,00	31,21	76,67	0,21	8,17	29,62	6
150	Sukoharjo	0,45	7,41	23,00	0,19	20,26	77,54	0,15	8,91	31,32	6
151	Wonogiri	0,15	10,75	31,30	0,11	19,29	76,05	0,99	6,95	27,90	6
152	Karanganyar	0,51	10,01	27,71	0,00	19,93	77,36	0,49	8,37	28,02	6
153	Sragen	0,27	13,12	27,80	0,24	21,13	75,60	0,37	7,22	33,16	6
154	Grobogan	0,27	12,31	47,37	0,22	14,31	74,55	0,67	6,55	39,16	6
155	Blora	0,23	11,90	32,52	0,00	18,43	74,12	0,99	6,37	32,86	6
156	Rembang	0,38	15,41	26,13	0,00	17,16	74,39	0,72	7,02	25,73	6
157	Pati	0,28	9,90	25,74	0,00	17,96	75,93	0,48	7,25	37,90	6

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
158	Kudus	0,74	6,98	11,88	0,00	21,92	76,47	0,15	8,63	29,38	6
159	Jepara	0,65	7,00	38,91	0,00	20,62	75,71	0,46	7,65	33,57	6
160	Demak	0,29	12,54	27,41	0,00	16,46	75,29	0,56	7,44	26,11	6
161	Semarang	0,85	7,29	15,77	0,00	15,70	75,62	0,60	7,90	24,86	6
162	Temanggung	1,12	9,87	22,25	0,12	23,19	75,47	0,57	7,16	30,26	6
163	Kendal	0,69	9,84	24,59	0,08	13,54	74,30	0,58	7,17	25,48	6
164	Batang	0,71	8,69	34,45	0,00	19,38	74,56	0,61	6,86	25,28	6
165	Pekalongan	2,24	10,06	33,47	0,00	28,04	73,53	0,51	7,07	35,12	5
166	Pemalang	0,63	16,04	50,67	0,16	27,24	73,11	0,45	6,35	33,68	6
167	Tegal	1,26	7,94	33,93	0,00	24,50	71,28	0,26	6,82	30,59	6
168	Brebes	0,64	17,17	35,33	0,00	28,19	68,84	0,55	6,08	38,53	5
<b>DI Yogyakarta</b>											
169	Kulon Progo	0,68	18,30	30,33	0,00	22,07	75,12	0,41	8,44	22,65	6
170	Bantul	1,44	13,43	15,53	0,17	23,56	73,66	0,20	9,36	22,89	6
171	Gunung Kidul	0,21	17,12	34,22	0,16	29,92	73,92	1,03	6,89	32,51	6
172	Sleman	1,47	7,65	12,94	0,00	20,68	74,69	0,09	10,53	14,69	6
<b>Jawa Timur</b>											
173	Pacitan	0,39	14,19	36,40	0,44	30,64	71,52	1,07	7,32	26,34	6
174	Ponorogo	0,24	10,36	32,24	0,23	19,03	72,43	0,68	7,28	30,50	6
175	Trenggalek	0,53	12,02	36,13	0,00	48,88	73,35	0,72	7,60	39,89	6
176	Tulungagung	0,56	7,27	24,61	0,11	31,13	73,74	0,47	8,33	26,17	6
177	Blitar	0,62	9,72	24,21	0,00	33,56	73,16	0,71	7,43	27,36	6
178	Kediri	0,78	11,31	32,73	0,00	35,64	72,37	0,57	7,80	29,36	6
179	Malang	0,89	10,37	29,25	0,00	24,73	72,26	0,98	7,38	31,74	6
180	Lumajang	0,50	9,98	39,89	0,00	33,70	69,70	1,03	6,20	34,01	6
181	Jember	0,52	9,98	44,62	0,56	47,42	68,74	0,80	5,87	38,31	5
182	Banyuwangi	0,49	7,80	30,25	0,13	26,76	70,34	1,91	6,75	32,01	6
183	Bondowoso	0,42	14,39	52,12	0,00	39,98	66,27	0,78	5,90	37,98	5
184	Situbondo	0,51	11,82	51,53	0,00	39,57	68,73	1,51	6,11	30,66	5
185	Probolinggo	0,82	18,71	51,18	0,21	40,86	66,71	0,78	5,83	39,90	5
186	Pasuruan	0,69	9,45	42,71	0,00	36,83	70,01	0,73	7,07	39,70	6
187	Sidoarjo	1,68	5,69	14,03	0,09	13,59	73,82	0,09	9,93	27,05	6
188	Mojokerto	0,52	10,08	26,95	0,00	25,37	72,24	0,27	8,17	29,90	6
189	Jombang	0,45	9,56	35,80	0,00	28,23	72,04	0,32	8,18	29,78	6
190	Nganjuk	0,39	12,11	47,73	0,42	28,82	71,25	0,61	7,72	29,65	6
191	Madiun	0,27	11,42	40,58	0,09	19,81	70,97	0,73	7,51	32,43	6
192	Magetan	0,29	10,31	33,60	0,00	14,18	72,30	0,38	7,66	30,25	6
193	Ngawi	0,18	14,83	36,10	0,50	22,58	71,92	0,59	7,03	40,47	6
194	Bojonegoro	0,27	13,16	39,16	0,33	21,40	71,07	0,93	6,93	34,91	6
195	Tuban	0,27	15,31	37,56	0,00	16,93	71,01	0,95	6,71	30,76	6
196	Lamongan	0,21	13,80	26,72	0,15	11,31	72,04	0,51	7,88	35,49	6
197	Gresik	0,60	11,89	22,75	0,09	2,21	72,46	0,40	9,02	27,16	6
198	Bangkalan	0,59	19,59	53,76	0,56	40,25	69,94	0,45	5,64	41,87	5

No.	Kabupaten	N CPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
199	Sampang	0,66	21,21	70,62	0,23	23,58	67,79	0,64	5,02	47,93	5
200	Pamekasan	1,08	14,47	48,62	0,00	30,02	67,22	0,31	6,45	44,12	5
201	Sumenep	0,57	20,16	51,55	0,28	21,93	70,94	0,97	5,26	34,33	5
<b>Banten</b>											
202	Pandeglang	0,48	9,61	50,44	0,16	58,50	64,24	2,53	6,84	39,47	5
203	Lebak	0,60	8,41	54,26	1,53	54,88	66,79	1,52	6,05	40,19	5
204	Tangerang	2,19	5,18	21,98	0,00	16,45	69,61	0,26	8,18	23,23	5
205	Serang	0,64	4,30	42,56	0,49	29,69	64,22	1,50	7,26	32,04	6
<b>Bali</b>											
206	Jembrana	0,86	5,20	23,02	0,00	33,49	71,91	0,75	7,66	29,07	6
207	Tabanan	0,44	4,46	14,76	0,00	11,16	73,23	0,44	8,20	16,15	6
208	Badung	1,12	1,98	6,62	0,00	5,44	74,71	0,17	9,62	25,24	6
209	Gianyar	0,81	4,19	2,29	0,00	8,92	73,26	0,19	8,58	12,08	6
210	Klungkung	1,32	5,86	29,38	0,29	16,12	70,70	0,26	7,54	21,39	6
211	Bangli	1,84	4,89	20,02	0,93	18,66	70,05	0,38	6,98	43,14	5
212	Karangasem	0,82	6,28	21,36	0,17	21,69	70,05	0,46	5,84	26,23	6
213	Buleleng	1,43	5,36	32,89	0,29	20,49	71,36	0,78	6,69	20,47	6
<b>Nusa Tenggara Barat</b>											
214	Lombok Barat	1,00	15,20	57,01	0,37	31,09	66,16	0,71	6,36	33,61	5
215	Lombok Tengah	0,44	13,87	53,89	0,22	27,31	65,59	0,73	6,04	31,05	5
216	Lombok Timur	0,73	16,55	56,99	0,40	34,98	65,33	0,60	6,76	43,52	5
217	Sumbawa	0,21	14,08	37,25	0,80	21,60	66,90	2,70	7,90	31,53	6
218	Dompu	0,18	12,40	52,88	0,41	32,07	66,20	4,95	8,14	33,83	6
219	Bima	0,37	14,84	54,58	0,34	30,14	65,71	5,71	7,66	32,01	5
220	Sumbawa Barat	0,33	14,17	40,03	0,00	12,23	67,34	2,64	8,20	18,32	6
221	Lombok Utara	0,83	28,83	52,18	0,17	37,08	66,50	1,02	5,93	29,30	4
<b>Nusa Tenggara Timur</b>											
222	Sumba Barat	0,38	28,51	54,45	27,55	46,45	66,58	2,40	6,67	47,77	4
223	Sumba Timur	0,52	30,13	50,36	10,19	43,26	64,45	8,83	6,93	39,26	4
224	Kupang	0,64	23,10	44,28	13,49	30,79	63,86	5,41	7,56	41,44	5
225	Timor Tengah Selatan	0,58	28,06	58,47	40,32	45,99	65,91	8,78	6,39	55,96	4
226	Timor Tengah Utara	0,50	22,31	62,31	22,40	14,55	66,45	2,65	7,52	56,76	5
227	Belu	0,65	15,70	44,21	16,46	39,82	63,81	1,65	6,91	46,78	5
228	Alor	0,96	21,63	62,30	24,37	40,82	60,80	2,61	7,82	45,51	4
229	Lembata	0,87	26,45	42,29	10,94	33,30	66,57	2,47	7,57	43,13	4
230	Flores Timur	0,97	11,05	39,92	8,11	11,04	64,70	2,14	7,40	46,53	5
231	Sikka	0,73	13,82	36,16	17,27	27,20	66,61	2,17	6,86	32,97	5
232	Ende	1,37	24,20	49,21	6,75	16,40	64,75	3,26	7,79	32,77	5
233	Ngada	0,38	12,94	30,77	8,42	33,10	67,59	2,01	8,60	34,70	6
234	Manggarai	0,58	20,83	47,00	9,40	20,37	66,23	1,42	7,51	43,27	5
235	Rote Nda	0,58	28,08	37,40	13,15	21,41	63,80	2,72	7,55	44,04	5
236	Manggarai Barat	0,32	18,14	37,30	12,93	26,59	66,58	6,62	7,18	44,32	5
237	Sumba Tengah	0,53	34,85	64,38	27,67	48,97	67,96	6,62	6,88	45,43	4

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
238	Sumba Barat Daya	0,60	28,88	68,70	40,85	86,32	68,02	2,89	6,11	39,98	3
239	Nageko	0,58	12,98	30,84	7,99	22,58	66,62	3,05	8,20	35,96	6
240	Manggarai Timur	0,48	26,50	73,91	34,03	52,10	67,62	1,86	6,90	48,45	4
241	Sabu Raijua	2,23	30,83	69,03	20,27	42,47	59,53	1,39	7,11	46,50	2
242	Malaka	0,48	16,34	47,81	15,71	49,96	64,52	1,72	6,88	42,97	5
<b>Kalimantan Barat</b>											
243	Sambas	0,72	8,55	29,54	1,85	91,08	68,50	5,01	6,12	38,95	5
244	Bengkayang	0,54	7,17	36,32	12,46	62,70	73,28	5,00	6,59	31,92	5
245	Landak	0,61	11,77	40,46	16,04	65,88	72,34	10,40	6,81	42,04	5
246	Pontianak/ Mempawah	0,77	5,61	41,48	2,74	77,40	70,54	2,23	7,12	33,44	5
247	Sanggau	1,29	4,67	15,32	10,61	54,30	71,05	14,55	6,74	31,88	5
248	Ketapang	1,33	10,93	27,22	7,71	58,50	70,69	21,34	7,14	42,68	5
249	Sintang	2,88	10,35	19,44	16,21	50,93	71,29	28,08	6,75	33,15	4
250	Kapuas Hulu	2,00	9,60	33,22	3,22	43,50	72,12	24,20	7,50	40,61	5
251	Sekadau	1,34	6,17	43,89	17,85	57,47	71,24	8,45	6,16	28,67	5
252	Melawai	5,00	12,83	35,53	10,03	62,08	72,56	19,13	6,73	40,78	2
253	Kayong Utara	0,47	10,08	35,22	3,21	70,10	67,71	13,98	5,77	33,42	5
254	Kubu Raya	1,24	5,07	27,63	0,19	86,39	70,04	6,43	7,51	24,83	5
<b>Kalimantan Tengah</b>											
255	Kotawaringin Barat	4,39	4,27	12,99	0,46	17,03	70,43	10,77	8,16	22,08	4
256	Kotawaringin Timur	1,01	6,21	21,51	2,64	34,48	69,75	16,92	7,84	48,84	6
257	Kapuas	0,13	5,20	35,09	3,34	57,16	68,64	10,50	7,57	41,54	6
258	Barito Selatan	2,12	4,55	30,52	2,48	42,11	66,89	11,78	8,54	40,19	5
259	Barito Utara	0,67	5,00	24,00	4,53	25,21	71,28	14,91	8,51	34,58	6
260	Sukamara	3,12	3,19	19,00	1,25	19,02	71,45	13,95	7,69	24,91	5
261	Lamandau	0,82	3,15	19,83	6,03	27,02	69,31	12,12	7,99	28,34	6
262	Seruyan	3,15	7,43	20,78	1,46	20,83	69,24	24,30	7,62	21,85	4
263	Katingan	0,60	5,22	32,98	1,74	40,35	65,62	24,40	8,38	33,26	6
264	Pulang Pisau	0,24	4,51	34,70	0,67	44,21	67,92	14,87	7,87	32,07	6
265	Gunung Mas	5,00	5,10	32,81	10,28	37,93	70,24	20,33	8,82	38,21	3
266	Barito Timur	0,92	6,56	21,27	4,87	42,44	68,06	7,33	8,77	42,06	6
267	Murung Raya	5,00	6,28	28,24	13,97	57,30	69,43	29,84	7,59	30,81	2
<b>Kalimantan Selatan</b>											
268	Tanah Laut	0,39	4,40	23,24	0,69	42,52	69,08	3,84	7,37	33,23	6
269	Kota Baru	0,82	4,52	24,77	0,75	32,67	68,89	10,80	7,21	28,55	6
270	Banjarnegara	0,54	2,70	23,48	0,44	40,23	66,66	2,38	7,05	33,45	6
271	Barito Kuala	0,21	4,56	31,36	0,99	42,80	65,59	3,16	7,60	34,12	6
272	Tapin	0,23	3,70	29,62	0,79	35,30	69,98	2,84	7,62	36,04	6
273	Hulu Sungai Selatan	0,39	5,21	42,30	1,21	45,37	65,59	1,86	7,74	35,05	6
274	Hulu Sungai Tengah	0,34	6,01	41,79	0,29	38,94	65,54	2,05	7,83	32,44	6
275	Hulu Sungai Utara	0,73	6,38	20,95	0,30	27,96	63,24	1,29	7,48	37,74	6
276	Tabalong	0,73	5,95	29,66	0,28	30,40	70,12	5,44	8,48	39,61	6
277	Tanah Bumbu	0,95	4,88	14,95	0,58	26,17	69,74	3,82	7,74	28,55	6

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
278	Balangan	0,82	5,59	31,62	1,15	28,65	67,37	2,40	7,02	36,22	6
<b>Kalimantan Timur</b>											
279	Pasir	2,36	9,03	18,15	1,46	25,45	72,28	11,32	8,21	27,54	5
280	Kutai Barat	3,22	9,15	15,61	0,81	24,93	72,57	17,61	8,15	30,02	4
281	Kutai	0,78	7,41	14,87	0,65	9,29	71,93	14,04	8,57	35,66	6
282	Kutai Timur	5,00	9,22	12,15	0,84	19,13	72,76	18,36	8,94	30,45	3
283	Berau	0,99	5,04	9,72	1,10	12,03	71,68	19,67	8,99	31,66	6
284	Penajam Paser Utara	0,72	7,40	11,50	0,71	15,18	71,05	4,77	7,94	31,62	6
285	Mahakam Ulu	3,61	11,62	25,51	0,49	24,87	71,56	81,03	7,68	32,83	3
<b>Kalimantan Utara</b>											
286	Malinau	1,36	7,68	9,05	0,85	27,01	71,40	61,74	9,07	24,63	6
287	Bulungan	0,86	9,44	10,87	1,89	33,11	72,55	15,43	8,33	31,22	6
288	Tana Tidung	1,99	5,08	8,61	1,79	38,17	71,35	17,48	8,07	37,57	5
289	Nunukan	1,17	6,71	18,21	2,78	28,42	71,27	15,67	8,01	30,48	6
<b>Sulawesi Utara</b>											
290	Bolaang Mongondow	0,15	7,67	22,62	0,00	32,17	68,86	5,01	7,94	28,86	6
291	Minahasa	0,60	7,30	21,11	0,23	23,74	70,67	1,34	9,93	20,13	6
292	Kep.Sangihe Talaud	5,00	11,82	38,40	5,21	26,72	69,60	0,63	8,43	22,99	3
293	Kepulauan Talaud	1,63	9,50	25,60	1,14	25,40	69,71	2,36	9,24	23,59	6
294	Minahasa Selatan	0,39	9,34	43,98	0,23	33,12	69,47	2,11	9,10	26,12	6
295	Minahasa Utara	0,60	6,99	26,57	0,77	23,41	71,03	1,30	10,21	35,44	6
296	Bolaang Mongondow Utara	0,26	8,64	37,99	0,40	41,02	67,21	4,45	8,73	22,24	6
297	Kep. Siau Tagulandang Biaro	2,37	9,87	26,50	0,28	51,38	70,14	0,70	9,02	19,46	5
298	Minahasa Tenggara	0,64	13,29	42,82	0,23	18,88	69,77	2,38	9,43	27,96	6
299	Bolaang Mongondow Selatan	0,83	13,60	38,89	0,64	20,55	64,19	5,98	8,03	33,27	5
300	Bolaang Mongondow Timur	0,58	6,03	25,77	0,85	35,48	67,51	5,15	7,98	26,28	6
<b>Sulawesi Tengah</b>											
301	Banggai Kepulauan	3,25	15,65	34,26	9,96	28,75	65,12	4,47	8,27	40,48	3
302	Banggai	0,38	9,12	16,57	2,53	22,82	70,32	5,42	8,18	31,90	6
303	Morowali	0,49	14,34	16,99	2,29	19,07	68,45	3,39	9,02	34,81	6
304	Poso	0,37	16,71	23,44	1,47	16,35	70,51	8,49	9,16	26,21	6
305	Donggala	0,55	18,03	30,85	9,77	43,65	66,37	6,88	7,51	36,02	5
306	Toli-Toli	0,45	13,66	25,48	5,82	29,09	64,71	3,28	8,52	31,67	6
307	Buol	0,49	16,08	25,76	5,97	17,33	67,59	12,94	8,95	34,22	6
308	Parigi Moutong	0,33	17,41	30,94	3,66	40,91	63,57	3,39	7,31	33,68	5
309	Tojo Una-Una	0,85	18,27	32,85	5,98	17,78	64,61	5,89	8,43	26,15	5
310	Sigi	0,26	12,60	31,51	7,93	47,56	69,15	5,69	8,48	43,00	6
311	Banggai Laut	5,00	16,32	34,82	9,42	13,20	64,21	0,93	8,85	34,15	2
312	Morowali Utara	0,43	15,53	36,96	5,26	23,06	68,77	18,34	8,61	28,47	6
<b>Sulawesi Selatan</b>											
313	Selayar	2,97	13,13	35,44	3,20	18,03	68,03	2,40	7,94	46,01	4
314	Bulukumba	0,26	7,48	31,07	1,02	21,42	67,27	0,57	7,96	36,23	6
315	Bantaeng	0,19	9,23	19,78	0,71	14,33	70,11	0,77	7,12	21,03	6

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
316	Jeneponto	0,16	15,48	30,86	0,08	10,35	65,89	1,74	6,91	41,29	6
317	Takalar	0,33	9,00	16,25	0,00	18,63	66,64	0,87	7,41	40,57	6
318	Gowa	0,24	7,83	17,29	0,65	22,78	70,11	2,50	7,85	44,45	6
319	Sinjai	0,33	9,28	18,63	4,38	26,79	66,83	0,62	7,64	42,22	6
320	Maros	0,26	10,31	15,47	0,63	25,30	68,74	0,71	7,52	34,87	6
321	Pangkajene Kepulauan	0,44	15,10	22,27	0,39	36,39	66,12	1,77	7,74	50,46	5
322	Barru	0,21	9,04	12,95	3,70	22,87	68,60	0,93	8,02	34,09	6
323	Bone	0,12	10,55	16,21	1,43	24,87	66,50	1,58	7,38	37,31	6
324	Soppeng	0,13	7,50	25,44	1,40	29,34	69,02	2,43	7,87	35,54	6
325	Wajo	0,08	7,50	20,71	1,59	25,35	66,79	3,59	6,87	32,19	6
326	Sidenreng Rappang	0,10	5,16	27,12	0,24	30,55	69,15	2,42	8,02	31,70	6
327	Pinrang	0,11	8,81	26,15	0,00	32,65	68,98	1,04	7,95	43,59	6
328	Enrekang	0,33	12,49	25,33	1,03	46,34	70,55	2,72	8,89	42,65	6
329	Luwu	0,26	13,36	30,51	2,63	33,76	69,84	4,18	8,27	30,31	6
330	Tana Toraja	0,43	12,75	29,86	4,66	51,47	72,80	2,87	8,27	46,98	6
331	Luwu Utara	0,31	13,69	16,35	0,38	35,66	67,90	8,22	7,53	34,68	6
332	Luwu Timur	0,29	7,23	13,31	2,93	32,37	70,03	7,03	8,48	25,31	6
333	Toraja Utara	0,39	13,37	22,89	2,85	45,77	73,09	1,02	8,09	40,70	6
<b>Sulawesi Tenggara</b>											
334	Buton	0,80	13,67	22,35	0,90	21,48	67,60	2,18	8,23	34,91	6
335	Muna	1,44	13,19	18,80	2,03	22,62	69,97	3,29	8,12	26,84	6
336	Konawe/Kab Kendari	0,27	13,48	18,58	0,89	22,68	69,76	6,12	8,86	29,42	6
337	Kolaka	0,79	12,51	13,41	2,94	19,77	70,38	5,41	8,84	28,73	6
338	Konawe Selatan	0,51	10,95	19,89	0,39	26,38	70,24	8,29	7,69	28,02	6
339	Bombana	0,47	11,05	16,59	2,52	22,85	68,17	5,58	7,49	33,87	6
340	Wakatobi	0,44	14,85	16,56	1,59	32,91	69,85	0,92	7,57	29,07	6
341	Kolaka Utara	1,68	14,30	17,47	3,07	27,24	69,94	7,04	8,10	30,62	5
342	Buton Utara	2,27	14,93	20,41	2,53	19,98	70,56	2,78	8,68	37,12	5
343	Konawe Utara	0,84	14,22	17,64	3,87	39,25	68,95	21,12	8,86	37,69	5
344	Kolaka Timur	0,27	13,82	9,02	3,92	16,78	71,99	4,41	8,81	17,58	6
345	Konawe Kepulauan	3,73	17,48	7,90	1,42	41,88	68,06	7,90	9,47	38,89	3
346	Muna Barat	0,73	14,17	16,15	0,00	23,15	69,97	1,81	6,62	31,30	6
347	Buton Tengah	1,75	14,88	19,89	0,19	4,84	67,33	1,44	9,00	19,19	6
348	Buton Selatan	1,33	14,82	14,60	3,45	59,96	67,33	0,94	6,59	34,81	5
<b>Gorontalo</b>											
349	Boalemo	0,25	20,33	21,31	6,23	30,02	68,25	3,57	7,37	44,82	6
350	Gorontalo	0,29	16,81	14,01	4,75	28,64	67,45	1,38	7,26	34,59	6
351	Pohuwato	0,19	19,40	17,64	1,51	8,14	63,25	6,62	7,64	23,62	6
352	Bone Bolango	0,90	17,40	15,49	0,67	22,37	67,95	2,57	8,93	29,11	6
353	Gorontalo Utara	0,24	18,54	20,86	3,03	25,45	65,36	3,77	7,31	33,34	6
<b>Sulawesi Barat</b>											
354	Majene	3,01	13,79	39,20	0,53	31,59	61,05	3,21	8,52	45,89	3
355	Polewali Mamasa	0,41	15,97	39,59	4,17	34,00	61,97	2,79	7,66	38,23	5

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
356	Mamasa	0,39	13,38	38,09	1,77	76,10	70,62	7,51	7,99	43,16	5
357	Mamuju	0,42	7,18	31,07	3,45	37,15	66,94	3,61	7,74	46,46	6
358	Mamuju Utara	0,41	4,53	19,64	6,48	18,92	65,62	8,75	7,91	34,80	6
359	Mamuju Tengah	0,29	7,14	14,34	4,11	48,21	67,79	3,74	7,43	41,59	6
<b>Maluku</b>											
360	Maluku Tenggara Barat	3,45	28,08	39,39	10,53	24,46	63,19	21,01	9,71	28,80	3
361	Maluku Tenggara	2,64	23,27	8,01	9,13	32,14	64,77	8,76	9,68	31,06	4
362	Maluku Tengah	1,96	20,11	24,59	2,83	36,61	66,19	10,09	9,36	42,79	4
363	Buru	0,43	17,03	18,49	3,90	23,14	66,16	11,50	8,89	27,05	6
364	Kepulauan Aru	5,00	27,12	16,64	41,51	35,96	62,52	17,08	8,70	36,02	1
365	Seram Bagian Barat	2,06	25,62	22,21	10,04	38,30	61,20	6,67	9,14	33,60	4
366	Seram Bagian Timur	2,78	23,62	36,69	16,88	43,98	58,84	6,12	8,14	40,56	3
367	Maluku Barat Daya	1,55	30,20	28,79	14,46	48,75	61,87	12,42	8,19	31,09	3
368	Buru Selatan	3,04	16,31	27,49	16,15	34,44	65,92	11,83	7,88	26,80	3
<b>Maluku Utara</b>											
369	Halmahera Barat	1,79	8,74	19,29	2,20	47,36	65,78	3,84	8,03	35,26	5
370	Halmahera Tengah	1,36	13,94	15,38	6,21	25,42	63,16	9,49	8,54	41,37	5
371	Kepulauan Sula	3,61	8,89	27,74	11,29	49,65	62,83	7,95	8,94	38,61	3
372	Halmahera Selatan	1,72	4,80	22,66	7,96	47,60	65,42	9,64	7,72	34,54	5
373	Halmahera Utara	0,67	4,51	23,12	0,63	29,37	69,15	6,61	8,41	25,09	6
374	Halmahera Timur	0,47	15,02	19,99	2,48	47,32	68,19	16,85	7,85	38,41	5
375	Pulau Morotai	0,31	7,16	30,50	1,15	42,32	66,58	9,57	7,24	36,84	6
376	Pulau Taliabu	5,00	7,35	20,18	34,48	51,62	61,58	13,63	7,57	36,98	2
<b>Papua Barat</b>											
377	Fak-Fak	5,00	24,31	32,73	1,87	30,05	68,12	29,36	10,02	18,01	2
378	Kaimana	5,00	16,65	26,83	22,90	43,50	64,25	10,64	9,51	16,75	2
379	Teluk Wondama	5,00	33,32	57,46	20,28	68,75	59,53	86,68	8,88	25,27	1
380	Teluk Bintuni	5,00	31,30	24,57	4,33	32,14	60,15	8,09	8,93	28,54	1
381	Manokwari	1,81	22,21	23,39	0,30	26,47	68,22	11,52	9,43	32,14	5
382	Sorong Selatan	5,00	19,14	32,24	13,09	54,30	65,83	16,63	8,06	39,61	2
383	Sorong	1,67	30,19	27,20	3,76	50,06	65,71	16,41	8,30	32,31	4
384	Raja Ampat	5,00	17,80	38,48	13,14	36,93	64,42	39,13	8,50	27,55	2
385	Tambrau	3,54	34,59	62,87	11,01	70,95	59,56	68,53	8,62	41,50	1
386	Maybrat	3,14	32,89	28,44	11,40	58,54	64,93	19,21	9,54	42,02	2
387	Manokwari Selatan	5,00	30,87	43,00	11,96	57,58	67,16	33,78	8,56	40,26	1
388	Pegunungan Arfak	5,00	35,72	64,81	68,70	74,21	66,89	59,70	5,49	35,00	1
<b>Papua</b>											
389	Merauke	0,35	10,54	19,49	4,46	29,99	66,71	66,56	8,56	22,80	6
390	Jayawijaya	1,16	38,66	23,56	20,85	75,98	58,99	3,04	5,03	31,62	3
391	Jayapura	4,95	13,44	29,43	2,01	36,54	66,66	8,99	9,25	24,57	2
392	Nabire	2,86	25,17	27,26	10,22	22,57	67,72	6,38	9,03	27,36	4
393	Yapen Waropen/ Kep. Yapen	4,47	27,17	24,02	23,01	27,35	68,85	9,98	8,47	46,22	2
394	Biak Namfor	5,00	25,72	17,69	1,13	35,56	68,00	37,89	9,68	43,70	2

No.	Kabupaten	NCPR	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
395	Paniai	0,34	37,35	26,27	55,96	78,58	65,94	83,78	4,34	42,36	3
396	Puncak Jaya	5,00	36,27	67,18	82,42	62,05	64,65	10,88	2,54	35,40	1
397	Mimika	5,00	14,55	9,77	0,18	7,28	72,06	2,36	9,73	27,99	3
398	Boven Digoel	4,14	20,35	31,19	13,96	39,04	59,16	52,15	7,68	39,70	2
399	Mappi	5,00	25,64	63,56	51,05	78,62	64,56	40,35	5,75	33,06	1
400	Asmat	5,00	27,41	39,74	20,18	96,57	56,88	75,63	4,08	32,60	1
401	Yahukimo	5,00	39,25	68,20	94,51	87,22	65,52	42,56	3,16	34,23	1
402	Pegunungan Bintang	2,19	30,75	72,00	47,15	74,49	64,08	52,16	3,87	37,99	1
403	Tolikara	5,00	33,14	65,63	25,01	95,98	65,30	23,35	2,77	21,31	1
404	Sarmi	5,00	14,51	35,45	14,79	55,90	66,00	100,00	8,36	19,03	1
405	Keerom	3,77	16,90	15,08	2,47	39,31	66,35	26,58	7,88	38,21	3
406	Waropen	5,00	30,53	44,11	6,18	59,41	65,99	28,95	8,95	52,59	1
407	Supiori	5,00	39,22	33,22	3,42	68,57	65,53	3,36	8,06	35,05	1
408	Membramo Raya	5,00	30,10	80,95	35,19	93,14	57,18	100,00	4,95	19,37	1
409	Nduga	5,00	38,13	39,35	88,92	99,74	54,82	64,97	2,15	49,79	1
410	Lanny Jaya	5,00	40,06	32,81	55,89	98,12	65,79	18,98	2,49	47,08	1
411	Mamberamo Tengah	5,00	37,02	41,67	95,92	100,00	63,14	36,42	1,81	34,77	1
412	Yalimo	5,00	35,45	51,81	25,43	85,71	65,10	23,19	3,18	0,00	1
413	Puncak	5,00	38,15	96,42	100,00	100,00	65,33	42,80	1,20	26,48	1
414	Dogiyai	5,00	30,48	26,48	72,60	92,30	65,32	26,18	2,07	57,48	1
415	Intan Jaya	5,00	42,71	29,33	69,64	86,65	65,26	79,81	1,42	49,64	1
416	Deiyai	5,00	43,49	24,37	6,00	99,73	64,83	12,37	1,49	23,46	1

**Keterangan:**

NCPR : Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih sereal

Pov : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Food : Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran

Elec : Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

Water : Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih

Life : Angka harapan hidup pada saat lahir

Health : Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk

School : Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun

Stunting : Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*)



## Lampiran 2. Data Indikator Individu dan Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Wilayah Kota

No.	Kabupaten	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
<b>Aceh</b>										
1	Kota Banda Aceh	7,25	8,95	0,00	0,35	71,10	0,02	11,98	26,58	6
2	Kota Sabang	16,31	17,45	0,00	3,12	70,21	0,40	11,21	23,48	5
3	Kota Langsa	10,79	10,81	0,00	13,42	69,16	0,24	11,23	27,52	6
4	Kota Lhokseumawe	11,81	23,88	0,00	4,85	71,27	0,07	10,92	35,41	6
5	Kota Subulussalam	18,51	53,38	0,31	57,11	63,69	1,00	7,99	49,62	1
<b>Sumatera Utara</b>										
6	Kota Sibolga	12,38	34,27	0,00	9,88	68,36	0,07	10,11	23,36	5
7	Kota Tanjung Balai	14,64	48,72	0,00	1,40	62,60	0,16	9,41	35,90	4
8	Kota Pematang Siantar	8,70	31,75	0,00	6,08	72,93	0,06	10,80	20,52	6
9	Kota Tebing Tinggi	10,27	20,26	0,58	20,97	70,47	0,05	10,24	25,92	5
10	Kota Medan	8,25	16,41	0,00	3,94	72,64	0,03	11,35	27,02	6
11	Kota Binjai	5,88	20,72	0,00	8,99	71,95	0,04	10,71	28,28	6
12	Kota Padang Sidempuan	7,69	28,36	0,29	34,70	68,73	0,11	10,87	39,83	4
13	Kota Gunung Sitoli	18,44	19,80	2,59	24,71	70,67	0,53	8,36	40,37	2
<b>Sumatera Barat</b>										
14	Kota Padang	4,70	11,94	0,22	9,31	73,35	0,16	11,40	22,44	6
15	Kota Solok	3,30	14,34	0,48	0,87	73,14	0,09	11,38	23,58	6
16	Kota Sawah Lunto	2,39	26,40	0,89	10,61	69,59	0,87	9,47	20,63	5
17	Kota Padang Panjang	5,88	12,59	0,39	9,15	72,58	0,06	11,22	27,24	6
18	Kota Bukit Tinggi	4,92	11,65	0,00	4,19	73,91	0,02	11,11	17,16	6
19	Kota Payakumbuh	5,77	19,60	0,44	2,27	73,33	0,14	10,48	19,24	6
20	Kota Pariaman	5,03	30,86	0,25	21,58	69,87	0,13	10,57	17,77	6
<b>Riau</b>										
21	Kota Pekanbaru	2,85	12,15	0,19	6,44	71,94	0,15	10,96	16,00	6
22	Kota Dumai	3,71	15,81	0,46	13,26	70,55	1,00	9,91	17,26	5
<b>Jambi</b>										
23	Kota Jambi	8,49	20,60	0,00	11,61	72,43	0,05	10,61	26,22	6
24	Kota Sungai Penuh	2,76	27,72	0,00	10,95	71,84	1,00	10,18	35,75	5
<b>Sumatera Selatan</b>										
25	Kota Palembang	10,95	14,92	0,00	4,97	70,32	0,06	10,25	25,89	6
26	Kota Prabumulih	11,39	14,53	0,00	30,36	69,88	0,27	9,79	26,23	5
27	Kota Pagar Alam	8,77	25,17	0,88	50,43	66,14	0,98	9,44	31,87	3
28	Kota Lubuk Linggau	13,02	32,46	0,00	38,16	68,83	0,43	9,61	31,99	3
<b>Bengkulu</b>										
29	Kota Bengkulu	18,82	9,50	0,17	18,62	69,72	0,06	11,23	17,99	5
<b>Lampung</b>										
30	Kota Bandar Lampung	9,04	16,70	0,20	13,38	71,01	0,05	10,51	25,15	6
31	Kota Metro	9,14	13,54	0,00	19,08	71,29	0,05	10,48	14,75	6
<b>Kep. Bangka Belitung</b>										
32	Kota Pangkal Pinang	4,95	8,64	0,00	6,96	72,86	0,01	9,81	13,32	6

No.	Kabupaten	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
<b>Kepulauan Riau</b>										
33	Kota Batam	5,11	8,62	0,38	2,44	73,24	0,37	10,84	22,92	6
34	Kota Tanjung Pinang	9,24	6,45	0,00	18,00	71,93	0,12	9,86	23,35	6
<b>DKI Jakarta</b>										
35	Kota Jakarta Selatan	2,83	8,49	0,00	13,67	73,93	0,01	11,34	16,23	6
36	Kota Jakarta Timur	3,14	13,19	0,00	10,38	74,27	0,01	11,02	18,36	6
37	Kota Jakarta Pusat	3,59	18,60	0,00	1,13	73,92	0,00	11,06	23,50	6
38	Kota Jakarta Barat	3,39	19,02	0,00	2,38	73,45	0,01	10,11	14,84	6
39	Kota Jakarta Utara	5,35	19,71	0,00	0,33	73,08	0,02	10,33	18,95	6
<b>Jawa Barat</b>										
40	Kota Bogor	5,93	19,76	0,00	19,84	73,21	0,04	9,47	27,79	6
41	Kota Sukabumi	7,12	39,98	0,00	21,57	72,11	0,03	9,23	28,99	5
42	Kota Bandung	3,57	10,24	0,00	6,70	74,00	0,02	10,56	21,74	6
43	Kota Cirebon	8,88	29,62	0,00	2,90	71,99	0,03	9,45	31,18	6
44	Kota Bekasi	4,11	10,33	0,00	12,56	74,76	0,04	10,91	16,75	6
45	Kota Depok	2,14	8,22	0,00	20,56	74,17	0,07	10,44	23,21	6
46	Kota Cimahi	4,94	24,00	0,00	11,94	73,75	0,02	10,65	21,06	6
47	Kota Tasikmalaya	12,71	44,25	0,00	23,33	71,70	0,15	9,09	25,74	4
48	Kota Banjar	5,70	50,40	0,00	19,49	70,59	0,15	8,49	27,89	5
<b>Jawa Tengah</b>										
49	Kota Magelang	7,87	17,24	0,22	9,87	76,72	0,01	9,98	27,55	6
50	Kota Surakarta	9,08	12,49	0,00	16,90	77,11	0,01	10,35	39,51	6
51	Kota Salatiga	4,84	10,20	0,00	7,68	77,11	0,04	10,32	34,24	6
52	Kota Semarang	4,14	9,98	0,00	4,41	77,23	0,04	9,69	29,68	6
53	Kota Pekalongan	6,75	31,80	0,15	32,05	74,25	0,03	8,56	29,73	5
54	Kota Tegal	7,81	12,36	0,00	0,73	74,30	0,02	8,16	20,72	6
<b>DI Yogyakarta</b>										
55	Kota Yogyakarta	6,98	8,64	0,00	20,88	74,45	0,01	11,32	16,93	6
<b>Jawa Timur</b>										
56	Kota Kediri	7,68	20,16	0,00	31,36	73,80	0,03	9,50	34,62	5
57	Kota Blitar	7,44	15,41	0,00	27,59	73,36	0,02	9,49	25,59	6
58	Kota Malang	4,10	8,05	0,00	15,04	72,93	0,03	10,23	23,42	6
59	Kota Probolinggo	7,20	6,54	0,00	17,01	70,00	0,05	8,24	30,02	6
60	Kota Pasuruan	6,77	41,49	0,00	11,07	71,18	0,04	8,69	34,88	5
61	Kota Mojokerto	5,50	14,88	0,00	16,83	73,01	0,03	9,57	20,86	6
62	Kota Madiun	4,49	10,73	0,00	5,85	72,59	0,02	10,14	29,06	6
63	Kota Surabaya	4,88	16,17	0,16	0,15	73,98	0,03	9,40	28,57	6
64	Kota Batu	3,89	16,42	0,41	11,89	72,37	0,22	9,16	28,33	6
<b>Banten</b>										
65	Kota Tangerang	4,76	11,54	0,00	11,18	71,45	0,04	10,17	19,07	6
66	Kota Cilegon	3,25	17,44	0,00	11,75	66,43	0,19	9,70	23,32	6
67	Kota Serang	5,36	36,06	0,00	24,26	67,58	0,16	8,16	24,62	5
68	Kota Tangerang Selatan	1,68	5,70	0,00	15,30	72,26	0,04	10,85	19,85	6

No.	Kabupaten	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
<b>Bali</b>										
69	Kota Denpasar	2,24	6,87	0,23	1,45	74,38	0,03	10,30	18,84	6
<b>Nusa Tenggara Barat</b>										
70	Kota Mataram	8,96	22,92	0,00	6,08	71,24	0,01	9,21	24,49	6
71	Kota Bima	8,79	33,12	0,00	18,26	69,84	0,46	10,28	28,75	5
<b>Nusa Tenggara Timur</b>										
72	Kota Kupang	9,61	15,94	0,25	7,37	68,90	0,18	11,03	23,31	6
<b>Kalimantan Barat</b>										
73	Kota Pontianak	5,00	14,82	0,00	58,70	72,41	0,04	10,06	22,26	5
74	Kota Singkawang	5,12	15,52	0,63	53,55	71,41	0,28	7,76	26,59	4
<b>Kalimantan Tengah</b>										
75	Kota Palangka Raya	3,47	11,52	0,00	8,72	73,16	1,00	11,09	22,91	6
<b>Kalimantan Selatan</b>										
76	Kota Banjarmasin	4,18	19,09	0,00	0,00	70,75	0,02	9,77	28,75	6
77	Kota Banjar Baru	4,19	18,52	0,84	20,47	71,67	0,40	10,63	39,73	5
<b>Kalimantan Timur</b>										
78	Kota Balikpapan	2,64	3,65	0,00	1,29	74,18	0,18	10,19	23,76	6
79	Kota Samarinda	4,59	5,93	0,00	1,37	73,93	0,22	10,14	26,26	6
80	Kota Bontang	4,67	3,01	0,15	2,90	73,94	0,18	10,35	26,63	6
<b>Kalimantan Utara</b>										
81	Kota Tarakan	6,15	6,97	0,00	7,55	73,88	0,41	9,89	22,02	6
<b>Sulawesi Utara</b>										
82	Kota Manado	5,38	10,39	0,01	5,08	71,52	0,06	10,63	19,80	6
83	Kota Bitung	6,67	28,21	0,17	5,82	70,72	0,42	9,65	29,97	5
84	Kota Tomohon	5,95	11,61	0,28	15,59	71,43	0,16	10,79	19,22	6
85	Kota Kotamobago	5,96	12,41	0,00	13,33	69,97	0,16	10,41	29,03	6
<b>Sulawesi Tengah</b>										
86	Kota Palu	6,58	6,34	0,00	14,52	70,31	0,16	10,94	24,07	6
<b>Sulawesi Selatan</b>										
87	Kota Makassar	4,41	12,45	0,00	2,67	71,70	0,02	10,34	25,29	6
88	Kota Pare Pare	5,59	10,39	0,06	9,03	70,88	0,10	10,13	23,29	6
89	Kota Palopo	7,94	11,23	0,36	7,88	70,49	0,29	10,62	36,01	6
<b>Sulawesi Tenggara</b>										
90	Kota Kendari	4,69	6,57	0,18	6,50	73,26	0,12	11,01	22,66	6
91	Kota Bau-Bau	7,57	11,61	0,30	7,26	70,72	0,43	10,21	37,21	6
<b>Gorontalo</b>										
92	Kota Gorontalo	5,57	5,51	0,00	6,22	72,02	0,08	10,45	27,41	6
<b>Maluku</b>										
93	Kota Ambon	4,72	8,63	0,85	11,41	70,12	0,25	11,22	31,25	6
94	Kota Tual	23,42	6,22	1,75	15,66	64,89	0,63	10,21	30,98	3
<b>Maluku Utara</b>										
95	Kota Ternate	3,00	3,31	0,26	8,05	70,50	0,12	11,02	19,64	6
96	Kota Tidore Kepulauan	5,95	6,53	0,21	36,84	68,87	1,00	9,75	28,19	4

No.	Kabupaten	Pov	Food	Elec	Water	Life	Health	School	Stunting	Prioritas
<b>Papua Barat</b>										
97	Kota Sorong	15,85	7,34	0,17	6,27	70,00	0,91	10,56	20,61	5
<b>Papua</b>										
98	Kota Jayapura	11,37	5,22	0,72	7,53	70,15	0,72	10,90	22,81	5

**Keterangan:**

Pov : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Food : Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran

Elec : Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

Water : Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih

Life : Angka harapan hidup pada saat lahir

Health : Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk

School : Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun

Stunting : Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*)



**Badan Ketahanan Pangan**  
Kementerian Pertanian  
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan  
Jakarta 12550 Indonesia  
Telp. (021) 7805035, 7805641  
Fax. (021) 78846536